

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
I. PENDAHULUAN .....	1
II. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA .....	3
III. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN .....	6
IV. STRUKTUR ORGANISASI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA .....	13
V. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA .....	15
VI. PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2025 .....	15
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi .....	30
A. Susunan Anggota Direksi .....	30
B. Ruang Lingkup Pekerjaan Direksi .....	35
C. Tugas dan Tanggung jawab Direksi .....	38
D. Pedoman Kerja Direksi .....	40
E. Rapat Direksi .....	40
F. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi .....	42
G. Peningkatan Kompetensi Direksi .....	42
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris .....	53
A. Susunan Dewan Komisaris .....	53
B. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris .....	55
C. Pedoman Kerja Dewan Komisaris .....	56
D. Rapat Dewan Komisaris .....	56
E. Fokus Pengawasan .....	58
F. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris .....	59
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	62
A. Komite Dewan Komisaris .....	63
B. Rapat Komite .....	68
4. Penanganan Benturan Kepentingan .....	73



5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	73
	A. Direktur Kepatuhan .....	74
	B. Struktur Organisasi Kepatuhan.....	75
	C. Budaya Kepatuhan.....	77
	D. Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan.....	82
	E. Pengelolaan Risiko Kepatuhan.....	85
	F. Laporan Pelaksanaan APU-PPT .....	87
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern.....	86
	A. Divisi Audit Internal .....	91
	B. Struktur Organisasi .....	91
	C. Tugas dan Tanggung jawab.....	94
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	97
8.	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	98
9.	Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> ) .....	111
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.....	112
	A. Kepemilikan Saham Serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga .....	113
	B. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	114
	C. <i>Shares Option</i> .....	115
	D. Sekretaris Perusahaan.....	116
	E. Divisi Hukum .....	129
11.	Rencana Strategis Bank.....	131
	A. Jangka Panjang.....	131
	B. Jangka Menengah dan Pendek .....	135
<b>VII.</b>	<b>HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PAPUA .....</b>	<b>136</b>



## I. PENDAHULUAN

*Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan paradigma yang terus berkembang di Indonesia saat ini. PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau yang sering disebut Bank Papua, semakin menyadari akan pentingnya mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan secara baik dan konsisten dalam upaya peningkatan kualitas perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perusahaan, pembagian tugas, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk unsur perusahaan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur tersebut. Selain itu juga *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur hubungan dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kian menjadi faktor penentu strategis bagi perbankan agar dapat meningkatkan nilai dan memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, pihak – pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional dan regional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Papua secara berkala mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka melihat tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank pada seluruh level jabatan dengan mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF) secara menyeluruh dalam aktivitas kegiatan bisnis Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Papua dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



## II. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

PT Bank Pembangunan Daerah Papua menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan diantaranya yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif.

Pada dasarnya PT Bank Pembangunan Daerah Papua menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan, agar Bank menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola mengacu pada aturan POJK dan SEOJK dengan 5 (lima) prinsip dasar yang disingkat TARIF, antara lain :

### 1. **Keterbukaan** (*Transparency*)

Bank diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat dan mudah diakses oleh siapapun.

Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Bank Papua, antara lain melalui :

- a. Divisi Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada *stakeholders*.



- b. *Website* resmi perusahaan yang selalu diperbaharui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan regulator.
- c. Penyampaian laporan secara rutin dan tepat waktu kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. **Akuntabilitas** (*Accountability*)

Pengelolaan Bank Papua harus dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip Akuntabilitas di Bank Papua tercermin antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- c. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- d. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- e. Memiliki unit kerja yang mengelola anti fraud.
- f. Menyiapkan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan serta rencana kerja lainnya.
- g. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

### 3. **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*)

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu pertanggung jawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini Bank Papua mewujudkan prinsip pertanggung jawaban, antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Bank*) dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
- b. Memiliki kebijakan internal Bank sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas operasional Bank.
- c. Memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank yang berfungsi sebagai *secondline of defense (exante)* serta Divisi Audit Internal (DAI) yang berfungsi sebagai (*third line of defense*), yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- d. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi program-program CSR yang telah ada dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

### 4. **Kemandirian** (*Independency*)

Dalam mewujudkan prinsip kemandirian, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank Papua dalam hal ini :

- a. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
- b. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

- c. Bank telah memiliki peraturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Bank Papua berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 68/DIR-BPD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang mana telah diakomodir penjelasannya pada Buku VIII (Pedoman Etika Berperilaku), Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

#### 5. **Kewajaran** (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh Bank Papua yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan selalu memitigasi dampak risiko yang dihadapi bank. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip kewajaran dan kesetaraan di Bank Papua, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Laporan hasil audit tahunan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan nilai-nilai yang wajar sesuai ketentuan Akuntansi yang berlaku.

### III. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Papua terus berupaya melakukan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dengan merancang serangkaian peraturan internal yang lebih terstruktur, saling melengkapi, ringkas dan mudah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan Bank serta pengambilan



keputusan oleh setiap organ dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Bank Papua di seluruh unit kerja berkomitmen untuk mengimplementasikan serta menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas Bank hingga menjadi bagian di antaranya melalui perumusan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan, serta seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, yang meliputi :

- Pemenuhan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris beserta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi
- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
- Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko.
- Pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Peraturan lainnya terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
- Penyusunan rencana strategis Bank sesuai dengan ketentuan mengenai rencana bisnis Bank.
- Pelaksanaan transparansi laporan keuangan dan non keuangan.
- Direksi melaksanakan amanat POJK tentang pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit internal sebagai fungsi dalam pengelolaan Tata Kelola Bank.
- Ketersediaan pedoman kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan Tata Kelola Bank yang terdiri dari Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank, Pedoman Kerja Komisaris, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Kerja Komite Audit, Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko, Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Pedoman Kerja Kepatuhan, Benturan Kepentingan, Kertas Kerja (*Self Assessment*) *Good Corporate Governance* (GCG) dan pedoman Laporan Tata Kelola Bank *Good Corporate Governance* (GCG).

- Penetapan :

**VISI :** Menjadi Bank Regional yang Kuat, Terpercaya, Berdaya Saing dan Mendukung Pembangunan Ekonomi di Tanah Papua.

**MISI1. MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA STAKEHOLDERS.**

1. Berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dalam memenuhi setiap kebutuhan nasabah melalui variasi produk, layanan dan jaringan yang menjangkau sampai ke pelosok di Tanah Papua.
2. Senantiasa meningkatkan inovatif, kreatif dan profesional dengan dukungan finansial teknologi serta kompetensi SDM yang lebih baik.
3. Menyadari dan memahami karakteristik dan potensi daerah di Tanah Papua, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal.

**MISI 2. MENGELOLA BISNIS MELALUI PRAKTEK PERBANKAN YANG SEHAT.**

1. Penerapan Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian secara *continue* dan konsisten dalam pengelolaan bisnis, agar Bank senantiasa dalam kondisi sehat.
2. Senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagai pengelolaan bisnis.
3. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai selaras dengan pertumbuhan Bank.
4. Senantiasa menjaga pertumbuhan bisnis dengan perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan hasil yang optimal untuk menjaga pertumbuhan keuangan berkelanjutan.



### **MISI 3. MENJALANKAN BISNIS SECARA PROFESIONAL.**

1. Berkomitmen menjunjung prinsip transparansi, akuntabel, responsif, berintegritas dan rasa berkeadilan dalam menjalankan bisnis.
2. Peduli lingkungan dan turut serta melestarikan kearifan dan budaya lokal dengan bersinergi dengan masyarakat dan adat lokal.
3. Berkomitmen menjalin hubungan kerjasama yang profesional dengan semua pihak (*stakeholders*) dengan prinsip saling memberi nilai tambah dan manfaat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

### **MISI 4. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI & PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA.**

1. Sebagai Bank milik Pemerintah Daerah di Tanah Papua dan menjadi mitra dalam menjalankan bisnis, Bank berkomitmen mendukung program-program Pemerintah Daerah melalui layanan perbankan yang ada dan memberikan hasil usaha berupa deviden.
2. Berkomitmen berkontribusi bagi Pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua dalam peran sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana nasabah dan menyalurkan pinjaman dengan variasi produk layanan yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bekerja, PT Bank Pembangunan Daerah Papua memiliki pedoman kerja terhadap Aspek Nilai - Nilai Perilaku Utama Perusahaan (*core values*) yaitu, Semangat **SA IKHLAS** yang terbentuk dari kolaborasi dan pendalaman makna 7 (tujuh) Nilai Budaya Kerja dan 10 (sepuluh) Pedoman Perilaku sebagai berikut :

## **A. Budaya Perusahaan "SA IKHLAS" :**

Semangat **Asah**, **Asih** dan **Asuh** merupakan bentuk pelayanan yang tulus kepada setiap orang yang dilakukan dengan motivasi saling mendidik, saling mengasahi dan saling membina oleh setiap insan Bank Papua secara terus menerus guna kepuasan semua pihak tanpa terkecuali, dengan 6 (enam) perilaku utama, yaitu :

### **1. Integritas**

Insan Bank Papua yang mampu berpikir, berkata dan bertindak terpuji sehingga dapat menjunjung nilai-nilai kejujuran, ketulusan serta berempati dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang berdampak pada efisiensi dan efektifitas perusahaan.

### **2. Konsisten**

Insan Bank Papua yang bekerja dengan penuh disiplin, dilakukan secara terus menerus sehingga mampu meminimalisasi risiko yang akan terjadi.

### **3. Harmonis**

Insan Bank Papua yang berlandaskan kerjasama, saling menghargai dan mempunyai rasa saling memiliki sehingga dapat menciptakan, rasa aman dan nyaman di lingkungan kerja.

### **4. Loyal**

Insan Bank Papua yang memiliki sikap melayani dengan sepenuh hati serta peduli terhadap lingkungan guna menumbuhkan asas manfaat terhadap perusahaan.

### **5. Adaptif**

Insan Bank Papua yang memiliki jiwa wirausaha yang mampu beradaptasi dan berorientasi pada nilai tambah dengan melakukan inovasi, proaktif, kreatif serta perbaikan secara terus menerus.

### **6. Solusi**

Insan Bank Papua yang responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan hasil terbaik.

## B. Logo Budaya Perusahaan :



1. Makna warna :
  - a) Biru merupakan simbol dari unsur **kepercayaan, loyalitas, tanggung jawab** dan **keamanan**;
  - b) Kuning keemasan merupakan simbol dari unsur **prestasi, kesuksesan, kemenangan, kemewahan** hingga **kemakmuran**.
2. Komposisi warna :
  - a) Biru, komposisi RGB; **39, 58, 136** dan
  - b) Kuning keemasan RGB; **255, 192, 0**
3. Bentuk Huruf :
  - a) **SA** menggunakan jenis huruf **century gothic regular**, dan
  - b) **IKHLAS** menggunakan jenis huruf **century gothic bold**
4. Makna 3 garis pada huruf **A** :

Merupakan gambaran satu kesatuan dari semangat **Asah, Asih** dan **Asuh** yang diharapkan dapat dimaknai oleh setiap insan Bank Papua melalui saling mendidik (saling memberikan pembelajaran, koreksi, saran dan masukan), saling mengasihi (saling menghargai dan menghormati) dan saling membina (saling memperhatikan, saling menjaga dan saling membantu) sehingga membentuk karakter yang kuat yang dapat berkontribusi terhadap tujuan perusahaan.

## C. Kode Etik Pengurus dan Pegawai :

PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah memiliki Kode Etik (*Code of Conduct*) yang merupakan penjabaran dari aturan dan budaya Bank yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap Insan Bank Papua untuk mencapai

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. C. S.', is written over the page number and extends into the footer area.

tujuan bersama serta menjadi acuan bagi Insan Bank Papua dalam mengambil keputusan, bertindak, dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional dan beretika.

Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pengurus dan pegawai Bank, maka peraturan Kode Etik (*Code of Conduct*) diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 68/DIR-BPD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Buku VIII Pedoman Etika Berperilaku pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

#### **D. Budaya Kepatuhan :**

Budaya kepatuhan Bank Papua merupakan sistem nilai-nilai yang diyakini semua insan Bank Papua untuk dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan dan berfungsi sebagai perekat yang menjadi acuan dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian diatas mengisyaratkan, bahwa dengan kekuatan budaya kepatuhan yang dibangun dan mengakar pada suatu entitas akan mampu mendorong setiap individu yang terlibat didalamnya secara sadar diri mematuhi dan menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen berlandaskan nilai-nilai dasar yang telah disepakati. Ini semua mampu dicapai berkat peran aktif manajemen dan seluruh pegawai, untuk memahami dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku pada setiap fungsi operasional bisnis yang dijalankan. Hal tersebut dilakukan didalam budaya kepatuhan yang isinya sebagai berikut :

##### **1. Komitmen Kepatuhan**

Sebagai komitmen dalam menegakkan penerapan (*Good Corporate Governance*), Seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam

melakukan penanda-tanganan pernyataan komitmen kepatuhan dan pernyataan benturan kepentingan yang dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali yang diwajibkan dalam pedoman budaya kepatuhan. pernyataan komitmen kepatuhan dan pernyataan benturan kepentingan juga ditanda tangani oleh seluruh pegawai dari berbagai tingkat jenjang jabatan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial.

## 2. Indeks Kepatuhan

Implementasi indeks kepatuhan Bank Papua digunakan untuk menetapkan dan mengukur indeks kepatuhan pegawai berupa perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perusahaan sebagai salah satu hasil penambah ataupun pengurang dari *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai.

## IV. STRUKTUR ORGANISASI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

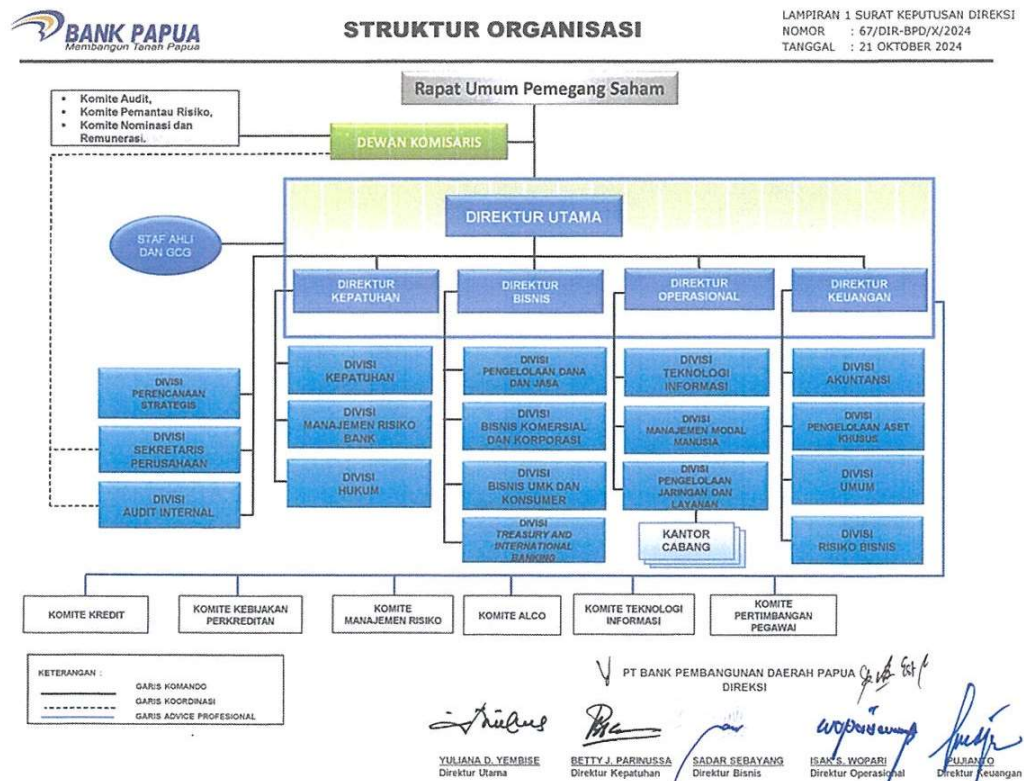
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Bank disusun untuk menetapkan kejelasan dan pemisahan tugas dan tanggung jawab serta mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan dan pelaporan dalam organ-organ yang ada di Bank Papua dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi yang memadai akan mendukung proses penerapan prinsip tata kelola menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Papua, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung sehingga manajemen dapat melaksanakan tugas secara efektif.

Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.

Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 82/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagai berikut :



## V. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Laporan Tata Kelola Bank Papua terdiri dari 2 laporan, yaitu :

### 1. Laporan *Self Assessment* GCG

PT Bank Pembangunan Daerah Papua melakukan *self assessment* GCG berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagai pedoman pelaksanaan laporan penilaian sendiri di Bank Papua. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan periode laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu 2 (dua) kali dalam setahun (semester) pada bulan Juni dan Desember, serta melakukan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan agar Bank dapat melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap kinerja operasional Bank. Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

### 2. Laporan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Laporan Tata Kelola dibuat sekali di setiap tahun, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 4 (empat) bulan setelah batas waktu pelaporan.

## VI. PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Bank Papua yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut

pengembangan dan masa depan Perseroan secara *fair* dan transparan. Selain itu, Pemegang Saham berhak mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yaitu RUPS Tahunan Perseroan Terbatas dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025.

## 1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 9 (sembilan) Kantor Gubernur Provinsi Papua, Provinsi Papua yang dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya menghasilkan keputusan sesuai Salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 09, tanggal 20 Maret 2025 , sebagai berikut :

Tabel 1.0

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2025  
(tanggal 20 Maret 2025)

No.	Mata Acara RUPS Tahunan	Keputusan RUPS Tahunan
1	Mengenai persetujuan tentang pemindahan tempat dan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima)	- Menyetujui pemindahan lokasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) di Jayapura pada tanggal 20 – 03 – 2024 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat).
2	Mengenai Peraturan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 20 – 03 – 2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima).	- Menyetujui Peraturan dimaksud menjadi Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 20 – 03 – 2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima).
3	Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).	- Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
4	Mengenai permintaan Pengesahan Keputusan bersama Penjabat Gubernur Papua selaku Pemegang Saham Pengendali dan Mayoritas dan Gubernur Papua Barat selaku selaku Pemegang Saham Pengendali.	- Menyetujui Permintaan Pengesahan Keputusan bersama Penjabat Gubernur Papua selaku Pemegang Saham Pengendali dan Mayoritas dan Gubernur Papua Barat selaku selaku Pemegang Saham Pengendali untuk melakukan perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Bisnis dan Direktur

		Operasional terhitung mulai tanggal 05 – 03 – 2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima) sampai dengan terpilihnya Direktur Bisnis dan Direktur Operasional Definitif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5	Mengenai permintaan persetujuan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2025 (dua ribu dua puluh lima).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk memperpanjang sementara masa jabatan Tuan <b>Sadar Sebayang</b> sebagai Direktur Bisnis dan Tuan <b>Isak Samuel Wopari</b> sebagai Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua terhitung mulai tanggal 05 – 03 – 2025 (lima Maret dua ribu dua puluh lima).</li> <li>2. Perpanjangan sementara masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, akan berakhir setelah diterbitkannya hasil kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap calon Direktur Bisnis dan Direktur Operasional terpilih periode tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dan ditetapkan secara definitif serta diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li> <li>3. Selama Direksi sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas melaksanakan jabatan perpanjangan sementara, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya yang diterima dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua</li> </ol>
6	Mengenai permintaan persetujuan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2025 (dua ribu dua puluh lima).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk memperpanjang sementara masa jabatan Tuan Dortheis Sesa, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</li> <li>2. Perpanjangan sementara masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, akan berakhir setelah adanya penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait jabatan Komisaris Independen periode tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).</li> <li>3. Selama Komisaris Independen sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas melaksanakan jabatan perpanjangan sementara, maka semua penghasilan dan fasilitas lainnya yang diterima dibebankan kepada anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Papua</li> </ol>
7	Mengenai permintaan persetujuan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup.</li> <li>2. Menyetujui untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua berikutnya untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) diselenggarakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.</li> </ol>
8	Mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	Menyetujui dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagai berikut : A. Mengubah Ketentuan <b>Pasal 10 ayat 1,</b>

sehingga untuk selanjutnya Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di Wilayah kedudukan Perseroan/Kantor Pusat atau pada Kantor-kantor Cabang Perseroan melakukan kegiatan usahanya di Wilayah Tanah Papua.
- 2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
- 3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan.
- 4) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atas kuasa dari Pemegang Saham.
- 5) Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dipimpin oleh Direktur Utama, namun Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- 6) Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
- 7) Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dipimpin oleh Komisaris Utama, namun Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- 8) Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh seorang anggota Direksi.
- 9) Jika semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat.

B. Mengubah dan menambah ketentuan dalam **Pasal 12 ayat 3**, sehingga selanjutnya Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

		<p>1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.</p> <p>2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi :</p> <p>a) <b>Persyaratan Umum :</b> Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>II. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah</li> <li>III. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara</li> <li>IV. Sehat Jasmani dan Rohani</li> <li>V. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan</li> <li>VI. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan</li> </ol> <p>b) <b>Persyaratan Khusus :</b> Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>c) <b>Persyaratan Lainnya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>II. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</li> </ol> <p>3a. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>3b. Kepada Direksi yang akan masa jabatannya, maka perlu dipersiapkan calon-calonnya paling lama 1 (satu) tahun sebelum jatuh tempo masa jabatan, dikecualikan dari ketentuan pasal 12 ayat 9.</p> <p>3c. Kepada Direksi yang telah habis masa jabatan dan belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi tersebut tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
--	--	---



		<p>3d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3c tersebut diatas, hanya berlaku sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berikutnya terkait pengangkatan anggota Direksi definitif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>4. Tata Cara Pengangkatan : Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>5. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p> <p>7. Jika suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengundurkan diri;</li> <li>Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>Meninggal Dunia;</li> <li>Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li> </ol> <p>C. Mengubah dan menambah ketentuan dalam <b>Pasal 15 ayat 4</b>, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dan paling banyak sama dengan anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</li> <li>Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai</li> </ol>
--	--	---



		<p>kompetensi dan profesional dalam bidang perbankan dan keuangan serta bersifat independen dan dapat bekerja menjalankan tugasnya dengan menyediakan waktu yang cukup.</p> <p>3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris :</p> <p><b>a) Persyaratan Umum :</b>  Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>II. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah</li> <li>III. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara</li> <li>IV. Sehat Jasmani dan Rohani</li> <li>V. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela di bidang perbankan</li> <li>VI. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan</li> </ol> <p><b>b) Persyaratan Khusus :</b>  Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</p> <p><b>c) Persyaratan Lainnya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>II. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</li> </ol> <p>4a. Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan lain, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>4b. Kepada Komisaris yang akan habis masa jabatannya, maka perlu dipersiapkan calon-calonnya paling lama 1 (satu) tahun sebelum jatuh tempo masa jabatan, dikecualikan dari ketentuan pasal 15 ayat 9.</p> <p>4c. Kepada Komisaris yang telah habis masa jabatan dan belum ditetapkan penggantinya Oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris tersebut</p>
--	--	--



		<p>tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>4d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4c tersebut diatas hanya berlaku sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa (RUPSLB) berikutnya terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris definitif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>5. Tata cara pengangkatan : Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris, secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>6. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus ada diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p> <p>8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika : a) Mengundurkan diri; b) Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan; c) Meninggal Dunia; d) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
9	<p>Mengenai Pengesahan laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).</p>	<p>- Menyetujui dan menerima serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sepanjang tindakan mereka</p>



		tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku perseroan.
10	Mengenai Pembagian dan Pengesahan Penggunaan Laba Bersih (Cadangan Umum dan Deviden).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebesar RP. 452.679.773.426,- (empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam rupiah) yang pembagiannya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Deviden sebesar 60% (enam puluh persen) dengan nilai nominal sebesar RP. 271.607.864.056,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima puluh enam rupiah)</li> <li>3. Cadangan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai nominal sebesar RP. 181.071.909.370,- (seratus delapan puluh satu miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).</li> </ol> </li> </ol>
11	Mengenai pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua bersumber dari cadangan yang dipisahkan dari laba bersih sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 24 (dua puluh empat). Jumlah Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang sudah dicadangkan dan akan dibayarkan adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).</li> <li>2. Bahwa Tantiem yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersumber dari Cadangan yang dipisahkan dari Laba Bersih dalam Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai PSAK (Pernyataan Akuntansi Keuangan) 24 (dua puluh empat) adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar RP. 22.633.988.671,- (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan standar tahun sebelumnya berdasarkan laporan keuangan <i>audited</i>, dengan ketentuan Pajak penghasilan ditanggung masing – masing penerima</li> </ol>
12	Mengenai Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)	<p>- Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang memuat antara lain :</p> <p>Rencana pertumbuhan dari posisi per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Asset</b> di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp 34.056.000.000.000 (tiga puluh empat triliun lima puluh enam miliar rupiah) atau tumbuh 6,05% (enam koma nol lima persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp 32.115.000.000.000,- (tiga puluh dua triliun seratus lima belas miliar rupiah).</li> <li>b) <b>Kredit</b> di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp 23.537.</li> </ol>

		<p>000.000.000,- (dua puluh tiga triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) atau tumbuh 8% (delapan persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp 21.794.000.000.000,- (dua puluh satu triliun tujuh ratus Sembilan puluh empat miliar rupiah)</p> <p>c) <b>Dana Pihak Ketiga</b> di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp 26.690.000.000.000,- (dua puluh enam triliun enam ratus Sembilan puluh miliar rupiah) atau tumbuh 8% (delapan persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp 24.714.000.000.000,- (dua puluh empat triliun tujuh ratus empat belas miliar rupiah)</p> <p>d) <b>Total Pendapatan</b> di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp 3.160.000.000.000,- (tiga triliun seratus enam puluh miliar rupiah) atau tumbuh 18,12% (delapan belas koma dua belas persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp 2.675.000.000.000,- (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah)</p> <p>e) <b>Biaya</b> di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp 2.557.000.000.000,- (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar rupiah) atau tumbuh 22,41% (dua puluh dua koma empat puluh satu persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp 2.092.000.000.000,- (dua triliun sembilan puluh dua miliar rupiah)</p> <p>f) <b>Lab/Rugi</b> di Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp 603.000.000.000,- (enam ratus tiga miliar rupiah) atau tumbuh 3,45% (tiga koma empat puluh lima persen) dari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp 583.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar rupiah).</p> <p>➤ Sedangkan posisi Rasio-Rasio penting yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CAR (Capital Adequacy Ratio)</b> : 26,23% (dua puluh enam koma dua puluh tiga persen)</li> <li>- <b>ROA (Return On Asset)</b> : 1,82 % (satu koma delapan puluh dua persen)</li> <li>- <b>ROE (Return On Equity)</b> : 10,10% (sepuluh koma sepuluh persen)</li> <li>- <b>BOPO (Biaya Operasional Penerimaan Operasional)</b> : 86,25% (delapan puluh enam koma dua puluh lima persen)</li> <li>- <b>LDR (Loan to Deposit Ratio)</b> 88,29% (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen)</li> <li>- <b>NIM (Net Interest Margin)</b> : 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen)</li> <li>- <b>NPL (Net Performing Loan) Gross</b> : 2,21% (dua koma dua puluh satu persen)</li> <li>- <b>NPL (Net Performing Loan) Nett</b> :</li> </ul>
--	--	---

		0,64% (nol koma enam puluh empat persen)
13	Mengenai Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan Bank	- Menyetujui Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan Bank yang sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir bulan November 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dalam periode tersebut belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
14	Mengenai Pengesahan Setoran Modal yang belum didukung Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp 71.025.000.000,- (tujuh puluh satu miliar dua puluh lima juta rupiah)	- Menyetujui dan mengesahkan Setoran Modal sebesar Rp 77.355.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 15.471 (lima belas ribu empat ratus tujuh puluh satu) lembar saham, sehingga dengan pengesahan ini maka jumlah saham yang disetor oleh para Pemegang Saham menjadi Rp 2.848.205.000.000,- (dua triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima juta rupiah) atau 569.641 (lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu) lembar saham.
15	Tentang Realisasi dan Komitmen Setoran Modal Tahun 2021 – 2026 (dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh enam) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	- Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan komunikasi secara langsung kepada para Pemegang Saham
16	Tentang pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)	- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa dan atau melakukan audit Laporan Keuangan. - Laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara tertulis kepada periode tersebut belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
17	Mengenai usulan tentang cuti Dewan Komisaris dan Direksi untuk perjalanan rohani (disamakan dengan peraturan perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tentang Cuti Wisata Rohani dan Usulan Tentang <i>Medical CheckUp</i> Dewan Komisaris dan Direksi yang semula 4 (empat) hari kerja menjadi 7 (tujuh) hari kerja termasuk waktu perjalanan pergi dan pulang selama 2 (dua) hari kerja.	- Menyetujui <i>Medical CheckUp</i> dan Wisata Rohani Dewan Komisaris dan Direksi serta menyetujui perubahan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 12/SK/RUPS-BPD/V/2014 tanggal 14 – 05 – 2014 (empat belas Mei dua ribu empat belas) tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Pegawai Pensiunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, sebagai berikut : 1. Pasal 4 Ayat (2) angka 2.4 diubah sehingga berbunyi : <i>Medical CheckUp</i> diberikan kepada Direksi 1 (satu) tahun sekali, dengan fasilitas : a) Penggantian seluruh biaya <i>Medical CheckUp</i> b) Biaya Perjalanan Dinas selama 7 (tujuh) hari kerja termasuk waktu perjalanan pergi dan pulang selama 2 (dua) hari kerja 2. Pasal 7 Ayat (2) angka 2.3 diubah sehingga berbunyi : <i>Medical CheckUp</i> diberikan kepada Dewan Komisaris 1 (satu) tahun sekali, dengan fasilitas : a) Penggantian seluruh biaya <i>Medical CheckUp</i> b) Biaya Perjalanan Dinas selama 7

		<p>(tujuh) hari kerja termasuk waktu perjalanan pergi dan pulang selama 2 (dua) hari kerja</p> <p>3. Menambahkan 1 (satu) Ayat pada Pasal 4 yaitu Pasal 4 Ayat 13, berbunyi : 13) Memberikan kesempatan pada Direksi untuk melaksanakan cuti wisata rohani 1 (satu) kali selama menjabat sebagai Direksi dan untuk pelaksanaan wisata rohani dengan mempertimbangkan kewajaran waktu pelaksanaannya.</p> <p>4. Menambahkan 1 (satu) Ayat pada Pasal 7 yaitu Pasal 7 Ayat 11, berbunyi : 11) Memberikan kesempatan pada Dewan Komisaris untuk melaksanakan cuti wisata rohani 1 (satu) kali selama menjabat sebagai Direksi dan untuk pelaksanaan wisata rohani dengan mempertimbangkan kewajaran waktu pelaksanaannya.</p>
--	--	--

## 2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 9 (sembilan) Kantor Gubernur Provinsi Papua, Provinsi Papua, yang dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya oleh Pemegang Saham, menghasilkan keputusan sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 10 tanggal 20 Maret 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.0

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025  
(tanggal 20 Maret 2025)

No.	Mata Acara RUPS - LB	Keputusan RUPS - LB
1	Tentang peraturan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 20 - 03 - 2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima).	<p>- Menyetujui peraturan dimaksud menjadi Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 20 - 03 - 2025 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh lima) dengan beberapa catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 3 Ayat (1) dirubah menjadi : Pemimpin rapat adalah Pemegang Saham Pengendali dan Mayoritas Provinsi Papua, Pemegang Saham Pengendali (Provinsi Papua Barat).</li> <li>2. Pasal 4 Ayat (2) dihilangkan.</li> <li>3. Pasal 5 Ayat (4) dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Penyampaian Laporan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) tentang Rekomendasi Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris</li> </ol>

		<p>Independen dan Calon Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang akan jatuh tempo pada Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)</p> <p>4. Pasal 5 Ayat (5) dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Pembahasan dan Penetapan Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</p> <p>5. Pasal 9 Ayat (1) dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Pemimpin rapat dan seluruh Pemegang Saham melakukan pembahasan dan pemilihan Penetapan Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen untuk periode Tahun 2025 yang akan jatuh tempo pada Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan)</p> <p>6. Pasal 10 Ayat (6) dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Pemegang Saham hanya dapat memilih 1 (satu) Calon Direktur Bisnis, 1 (satu) Calon Direktur Operasional, 1 (satu) Calon Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Calon Komisaris Independen dan 1 (satu) Calon Komisaris Non Independen Perseroan dari calon – calon yang diusulkan.</p> <p>7. Pasal 10 Ayat (9) dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut : Kepada Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).</p>
2	<p>Tentang Penetapan Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).</p>	<p>A.</p> <p>1. Menetapkan nama – nama dibawah ini sebagai bakal Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional, Calon Direktur Kepatuhan, Calon Komisaris Independen dan Calon Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), sebagai berikut :</p> <p><b>a) Bakal Calon Direktur Bisnis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jonathan Aparay</li> <li>- Petrus Agus Soleman Maliatallo</li> </ul> <p><b>b) Bakal Calon Direktur Operasional :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erna M. Kapissa</li> <li>- Simon Giay</li> <li>- Andarias Baunik</li> <li>- Bertha Affar</li> </ul> <p><b>c) Bakal Calon Direktur Kepatuhan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betty Juliaantje Parinussa</li> <li>- Usman Badiaraja Saragih</li> </ul>



- Meaky GA. Bolang  
d) **Bakal Calon Komisaris Independen**  
:

- M. Ridwan Rumasukun
- Dortheis Sesa

e) **Bakal Calon Komisaris Non Independen** :

- Ali Baham Temongmere
- Abia Ullu

2. Untuk pemilihan Calon Direktur Bisnis, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Komisaris Independen dan Komisaris non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) atas musyawarah untuk mufakat dari peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilakukan dengan voting. Kecuali untuk Bakal Calon Direktur Kepatuhan dan Bakal Calon Komisaris Independen yang sekarang ini masih aktif, dimana apabila masa jabatan mereka telah berakhir masih dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen, maka atas musyawarah untuk mufakat dari peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) apabila voting suara terbanyak dari pemilihan calon tersebut jatuh kepada mereka, langsung ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan pertimbangan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang sudah lulus *Fit and Proper Test* dalam periode sebelumnya, apabila diperpanjang/diangkat kembali dalam periode berikutnya maka tidak perlu mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

B. Dari hasil pemilihan Calon Direktur Bisnis, Calon Direktur Operasional dan Calon Direktur Kepatuhan, telah terpilih :

1. **Calon Direktur Bisnis Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) :**

- a) Nama : Jonathan Auparay  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Alamat : Jalan Asrama Haji Gang Jeruk Nomor 08, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Vim,

Kecamatan Abepura, Kota Jayapura,  
Provinsi Papua  
NIK : 9171030803740002

b) Nama : Petrus Agus Soleman Malitallo  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Alamat : BTN *Skyline* Blok E Nomor 54  
Kotaraja, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 002, Kelurahan WayMhorock,  
Kecamatan Abepura, Kota Jayapura,  
Provinsi Papua  
NIK : 9203012510680004

**2. Calon Direktur Operasional Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) :**

a) Nama : Bertha Affar  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Alamat : Jalan Elang Nomor 50, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 050,  
Kelurahan/Desa Kuala Kencana,  
Kecamatan Kuala Kencana,  
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua  
Tengah  
NIK : 9109016912730001

b) Nama : Andarias Baunik  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Alamat : Perum Citra Buana I Nomor  
113, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 006, Kelurahan/Desa  
Dobonsolo, Kecamatan Sentani,  
Kabupaten Sentani, Provinsi Papua  
NIK : -

**3. Direktur Kepatuhan Terpilih Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) :**

a) Nama : Betty Juliaantje Parinussa  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Alamat : Jalan Jati Luhur Raya DB  
Nomor ---2, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 012, Kelurahan Jaka —  
Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat,  
Provinsi Jawa Barat  
NIK : 3275024111530010

4. Dewan Komisaris agar melakukan proses administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Calon Direktur Bisnis dan Calon Direktur Operasional

5. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi beban PT Bank Pembangunan Daerah Papua

	<p>C. Dari hasil pemilihan Calon Komisaris Independen dan Komisaris non Independen, telah terpilih :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Komisaris Independen Terpilih Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Dortheis Sesa Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Furia Jalur 03 Nomor 128, Rukun Tetangga 003, Rukun Warge Warga 003, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua NIK : 9204010312610002</li> </ul> </li> <li>2. <b>Calon Komisaris Non Independen Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Ali Baham Temongmere Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Yos Sudarso, Rukun Tetangga Tetangga 001, Rukun Warga 001, , Kelurahan/Desa Kapaurtutin, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat NIK : 9204010312610002</li> </ul> </li> <li>3. Dewan Komisaris agar melakukan proses administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Calon Komisaris Non Independen</li> <li>4. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi beban PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</li> </ol>
--	---

## 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### A. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab atas jalannya pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi memiliki wewenang serta bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perseroan. Secara garis besar, masing-masing Direktur dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi bertanggung

jawab terhadap pengelolaan Perseroan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bank Papua menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Bank Papua untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bank.

Pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya, menghasilkan keputusan :

- a) Memperpanjang sementara masa jabatan Saudara Sadar Sebayang sebagai Direktur Bisnis dan Saudara Isak Samuel Wopari sebagai Direktur Operasional terhitung mulai tanggal 05 Maret 2025 (lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima) berdasarkan Surat Keputusan RUPS Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 Tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ;
- b) Perpanjangan sementara masa jabatan sesuai poin (a) diatas akan berakhir setelah diterbitkannya hasil kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Calon Direktur Bisnis dan Calon Direktur Operasional terpilih Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun



- 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dan ditetapkan secara definitiv serta diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- c) Bahwa masa jabatan Saudari Betty Juliaantje Parinussa selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan berakhir pada tanggal 06 – 12 – 2025 (enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima) dan untuk melakukan pengangkatan kembali pada jabatan tersebut telah ditetapkan melalui mekanisme voting dengan suara terbanyak jatuh pada yang bersangkutan dan sudah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga musyawarah untuk mufakat dari peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) bahwa apabila hasil voting suara terbanyak jatuh kepada Direktur Kepatuhan yang masih aktif maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan terpilih untuk Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) ;
- d) Mengangkat kembali Saudari Betty Juliaantje Parinussa menjadi Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan Surat Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), yang berlaku efektif sejak tanggal 07 – 12 – 2025 (tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 06 – 12 – 2029 (enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sembilan).

Seluruh jajaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan

moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.

Bank Papua telah memenuhi ketentuan pihak otoritas yaitu berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang Direksi, maka susunan anggota Direksi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.0

Komposisi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua.  
Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Keputusan RUPS	Keputusan OJK
1	Yuliana Dolfince Yembise	Direktur Utama	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR - 130/D.03/2023
2	Betty Juliaantje Parinussa	Direktur Kepatuhan	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021
3	Sadar Sebayang	Direktur Bisnis	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 125/D.03/2016
4	Pujianto	Direktur Keuangan	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 04/SK/RUPSLB-BPD/III/2024 tanggal 08 Agustus 2024	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 39/D.03/2024
5	Isak Samuel Wopari	Direktur Operasional	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 127/D.03/2016

Berdasarkan *Curriculum Vitae*, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yakni telah memiliki pengalaman di bidang operasional selama 5 (lima) tahun dan pernah menjabat sebagai pejabat Eksekutif Bank.

3 (tiga) Anggota Direksi berasal dari Internal PT Bank Pembangunan Daerah Papua sedangkan 2 (dua) Anggota Direksi lainnya berasal dari Bank lain dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengalaman Bidang Perbankan Direksi  
PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Nama& Jabatan	Pengalaman Bidang Perbankan	Tahun
Yuliana D. Yembise (Direktur Utama)	a Kepala Kantor Cabang Bank Papua Timika	(2006 s/d 2007)
	b Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan	(2008 s/d 2009)
	c Kepala Divisi <i>Treasury &amp; Internasional</i>	(2009)

	<p>Bank Papua</p> <p>d Senior <i>Executive Specialis</i> Auditor Umum Bank Papua</p> <p>e Kepala Satuan Audit Internal (SKAI) Bank Papua</p> <p>f Pemimpin Divisi Umum Bank Papua</p> <p>g Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia Bank Papua</p> <p>h Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <p>i Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <p>j Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <p>k Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua</p>	<p>(2012 s/d 2013)</p> <p>(2013 s/d 2017)</p> <p>(2017 s/d 2019)</p> <p>(2019 s/d 2021)</p> <p>(2021 s/d 2023)</p> <p>(2022 s/d 2023)</p> <p>(2023 s/d 08 Agustus 2024)</p> <p>(2023 s/d sekarang ini)</p>
Betty J. Parinussa (Direktur Kepatuhan)	<p>a Peneliti Eksekutif / Ketua Fokus Group Pengaturan-2 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP)</p> <p>b Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank KEB Indonesia</p> <p>c Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank Hana</p> <p>d Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank KEB Hana Indonesia</p> <p>e Komisaris Independen PT Bank KEB Hana Indonesia</p> <p>f Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <p>g Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode I</li> <li>• Periode II</li> </ul>	<p>(2005 s/d 2009)</p> <p>(2010 s/d 2013)</p> <p>(2013 s/d 2014)</p> <p>(2014 s/d 2015)</p> <p>(2015 s/d 2018)</p> <p>(2018 s/d 2021)</p> <p>(2021 s/d 2025)</p> <p>(2025 s/d sekarang ini)</p>
Sadar Sebayang (Direktur Bisnis)	<p>a Kepala Bagian Analisa Kredit Kantor Cabang BCA Asemka</p> <p>b Kepala Bidang Kredit Kantor Cabang BCA Kuningan</p> <p>c Kepala Biro Pengkajian dan Pengendalian Risiko Bank BCA</p> <p>d Kepala Biro Kredit Korporasi dan <i>Financial Institution</i> Divisi Kredit Bank BCA</p> <p>e Kepala Biro Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BCA</p> <p>f Kepala Biro <i>Enterprise Risk Profile, Corporate &amp; Commercial Risk</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank BCA</p> <p>g Kepala Biro <i>Corporate &amp; Commercial Credit</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank BCA</p> <p>h Kepala Biro <i>Corporate &amp; Commercial Credit</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank BCA</p> <p>i Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode I</li> <li>• Periode II</li> <li>• Periode III (Perpanjangan Sementara)</li> </ul>	<p>(1995 s/d 1998)</p> <p>(1998 s/d 1999)</p> <p>(1999 s/d 2001)</p> <p>(2001 s/d 2002)</p> <p>(2002 s/d 2007)</p> <p>(2007)</p> <p>(2007 s/d 2010)</p> <p>(01 Desember 2010 s/d Maret 2017)</p> <p>(2018 s/d 2021)</p> <p>(2021 s/d 2025)</p> <p>(2025)</p>
Pujianto (Direktur Keuangan)	<p>a Wakil Kepala Cabang Manokwari</p> <p>b Kepala Departemen Pendukung Kredit</p> <p>c Kepala Departemen Kredit Menengah dan Korporasi</p> <p>d Kepala Departemen Kredit Korporasi</p>	<p>(2012 s/d 2013)</p> <p>(2013 s/d 2014)</p> <p>(2014 s/d 2015)</p> <p>(2015 s/d 2017)</p>

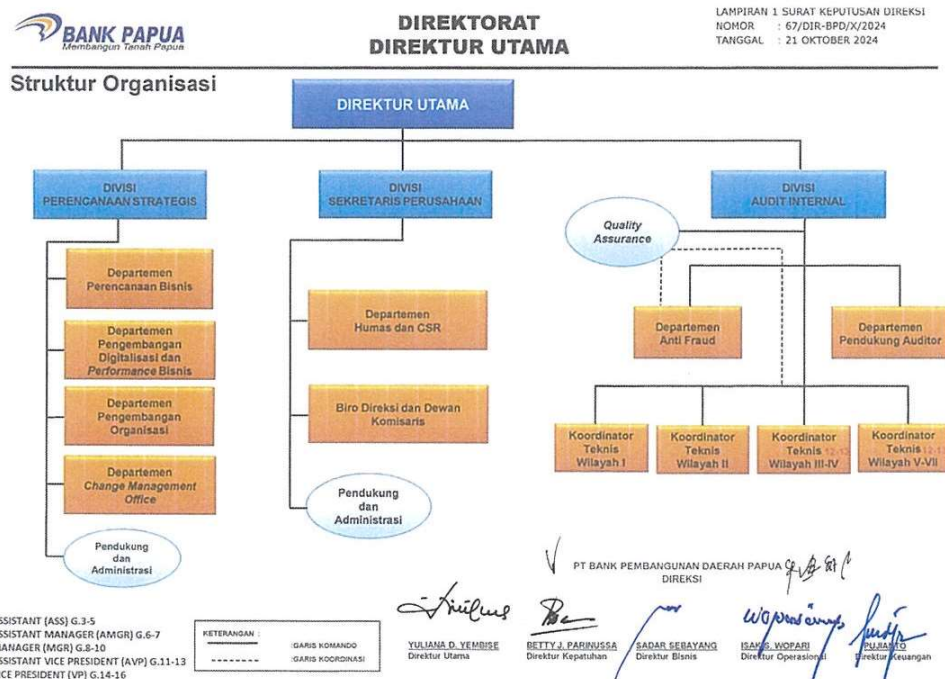
	<p>e Kepala Divisi Kredit Khusus Bank Papua</p> <p>f Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Bank Papua</p> <p>g Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Bank Papua</p> <p>h Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p>	<p>(2017 s/d 2018)</p> <p>(2018 s/d 2019)</p> <p>(2019 s/d 2024)</p> <p>(2024 s/d sekarang ini)</p>
Isak S. Wopari (Direktur Operasional)	<p>a Kepala Kantor Cabang Bank Papua Biak</p> <p>b Kepala Kantor Cabang Bank Papua Wamena</p> <p>c Ketua Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) Bank Papua</p> <p>d Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode I</li> <li>• Periode II</li> <li>• Periode III (Perpanjangan Sementara)</li> </ul>	<p>(2011 s/d 2013)</p> <p>(2013 s/d 2016)</p> <p>(2016 s/d 2017)</p> <p>(2018 s/d 2021)</p> <p>(2021 s/d 2025)</p> <p>(2025)</p>

## B. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DIREKSI

### 1. Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua anggota Direksi dan sesuai struktur organisasi Bank Papua membawahi Direktorat yang meliputi :

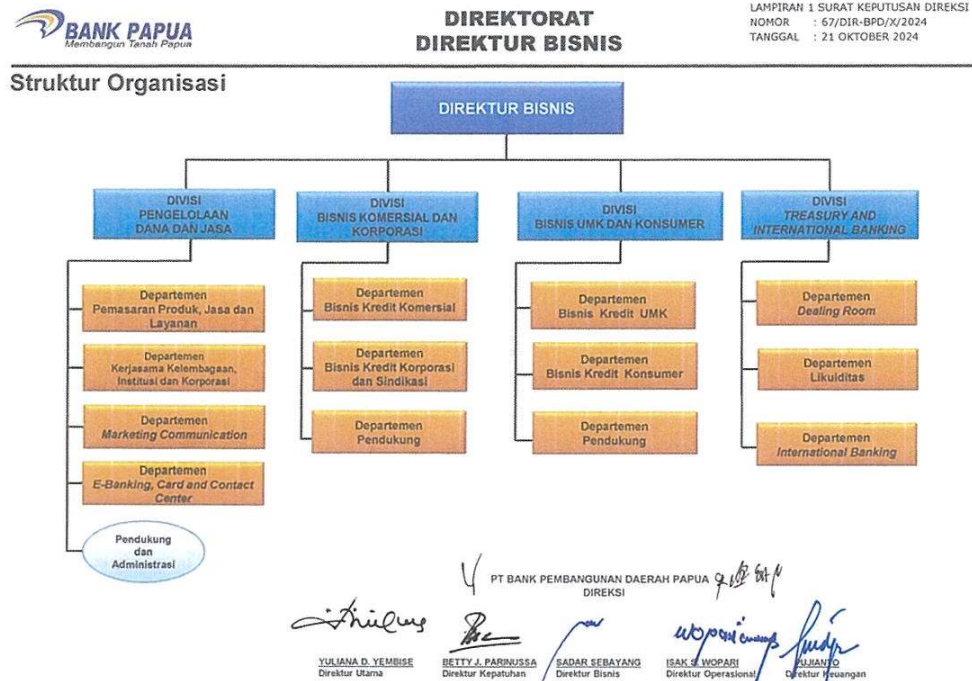
- Divisi Perencanaan Strategis
- Divisi Sekretaris Perusahaan
- Divisi Audit Internal



## 2. Direktur Bisnis

Sesuai Struktur Organisasi, membawahi Direktorat yang meliputi :

- Divisi Pengelolaan Dana & Jasa
- Divisi Bisnis Komersial & Korporasi
- Divisi Bisnis UMK & Konsumer
- Divisi *Treasury & International Banking*

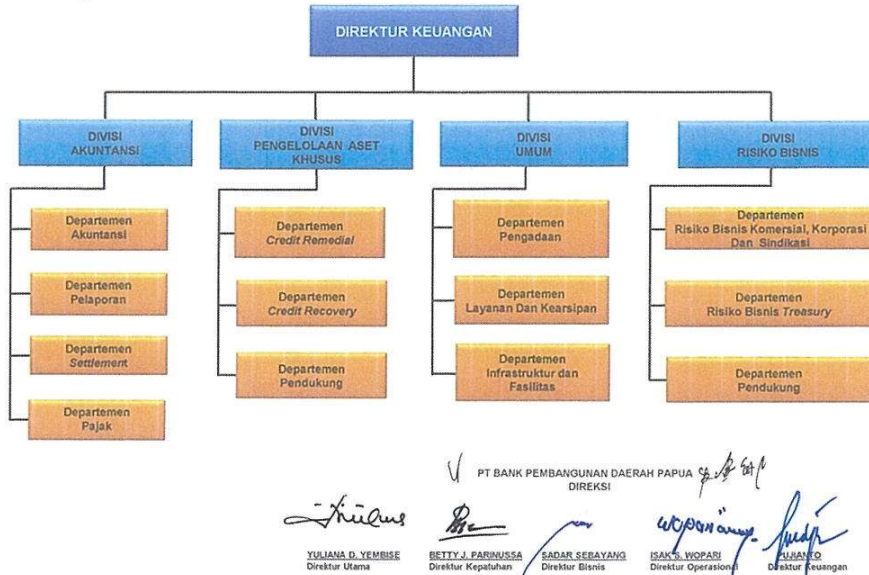


## 3. Direktur Keuangan

Sesuai Struktur Organisasi, membawahi Direktorat yang meliputi :

- Divisi Akuntansi
- Divisi Pengelolaan Aset Khusus
- Divisi Umum
- Divisi Risiko Bisnis

**Struktur Organisasi**

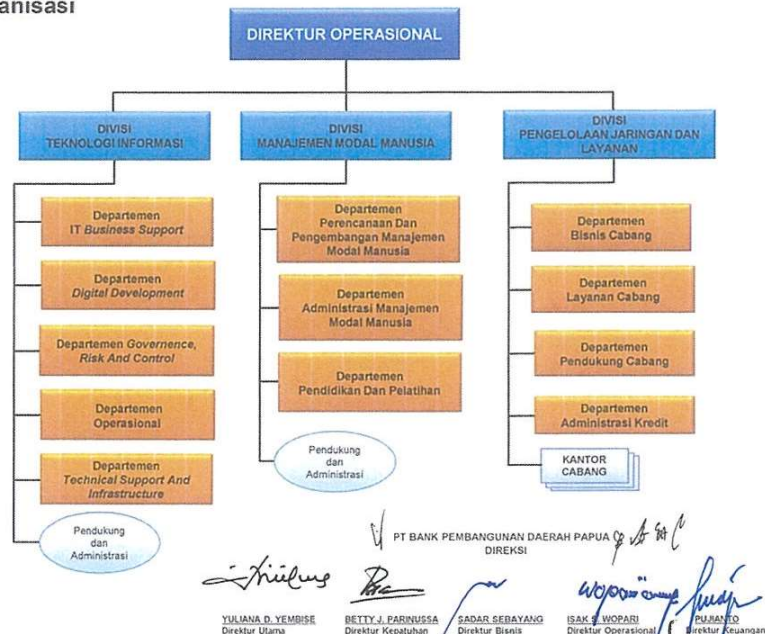


**4. Direktur Operasional**

Sesuai Struktur Organisasi, membawahi Direktorat yang meliputi :

- Divisi Teknologi Informasi
- Divisi Manajemen Modal Manusia
- Divisi Pengelolaan Jaringan & Layanan

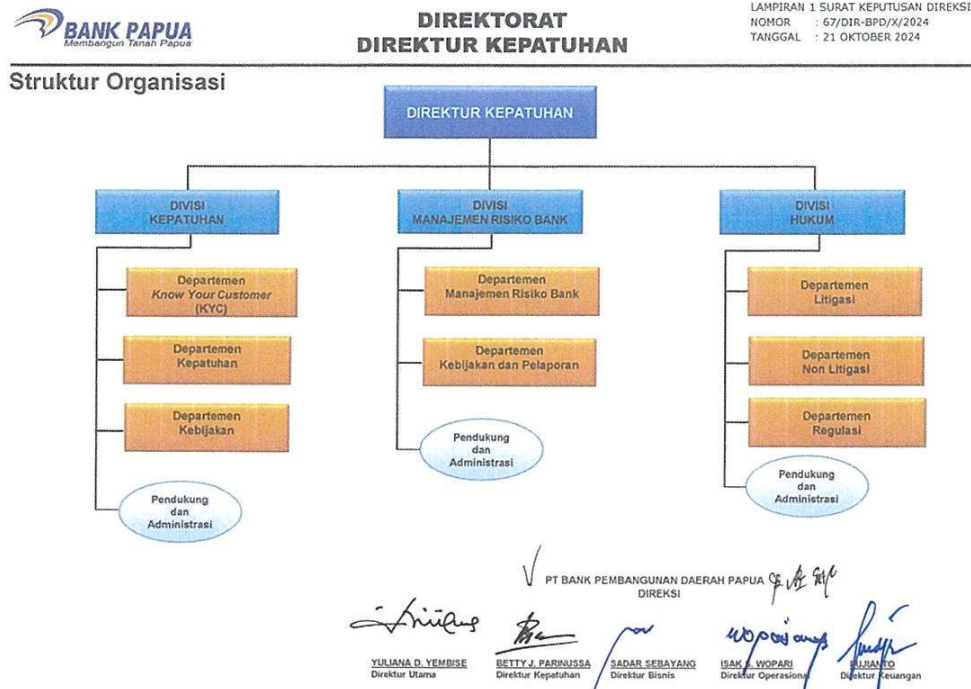
**Struktur Organisasi**



## 5. Direktur Kepatuhan

Sesuai Struktur Organisasi, membawahi Direktorat yang meliputi :

- Divisi Kepatuhan
- Divisi Manajemen Risiko Bank, dan
- Divisi Hukum



## C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam mengelola dan mengurus Bank guna memastikan tercapainya tujuan operasional Bank, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Secara umum, Direksi memikul tanggung jawab penuh sebagai organ yang berwenang mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam setiap tindakan maupun peristiwa hukum, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam regulasi, Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam hal RUPS, tidak menetapkan keputusan mengenai penetapan tugas bagi masing-

masing anggota Direksi, penetapan tugas masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.

Sebagaimana diatur sesuai dengan BPP GCG Buku II (Pedoman Kerja Direksi Bank Papua) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG), didalamnya termuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
9. Wajib melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.



10. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

#### **D. PEDOMAN KERJA DIREKSI**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada :

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Rapat Umum Pemegang Saham
4. Regulasi Bank Indonesia
5. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan
6. Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG)

#### **E. RAPAT DIREKSI**

Rapat Direksi adalah rapat yang dihadiri oleh Direksi yang dapat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Anggota Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan suara kuasa. Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melakukan 11 (sebelas) kali Rapat Direksi (Radisi) yang mana rapat Direksi dilakukan secara tatap muka langsung dan/atau melalui *video conference/zoom meeting*:

**Tabel 4.0**  
**Rapat Direksi**  
**PT Bank Pembangunan Daerah Papua**  
**Tahun 2025**

No	Tanggal	Nomor Rapat	Agenda / Materi Rapat	Peserta Rapat
1	07 Januari 2025	01/RD-BPD/I/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Kegiatan <i>Government Engagement Gathering</i> (Tim GEG)</li> <li>- Panitia Penarikan Undian Simpeda BPD-SI</li> <li>- KUPVA</li> <li>- Persiapan RUPS Tahunan Tahun 2025</li> <li>- Usulan Temuan yang Tidak Dapat Ditindak lanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
2	20 Januari 2025	02/RD-BPD/I/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Progres Tindak Lanjut KAP</li> <li>- Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025</li> <li>- Persiapan <i>Bussiness Meeting</i> Tahun 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
3	17 Maret 2025	04/RD-BPD/III/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Pemberian Dana Talangan atas SP2D Mitra Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang Belum Terdebet dari RKUD</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
4	14 April 2025	05/RD-BPD/IV/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Penting RUPS Tahunan dan Luar Biasa</li> <li>- Usulan dan Masukan dari Gubernur Se- Tanah Papua</li> <li>- Laporan Keuangan Tahunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
5	15 April 2025	06/RD-BPD/IV/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Bunga Teknis</li> <li>- Hasil Pengembangan Usaha Selama Tahun 2024</li> <li>- Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025</li> <li>- Pagar Tanah di Aimas Sorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Pujianto</li> </ul>
6	05 Juni 2025	07/RD-BPD/VI/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Perjalanan Dinas dan Pakaian Dinas Karyawan /Karyawati Bank Papua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
7	22 Juli 2025	08/RD-BPD/VII/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Pembelian Gedung Kantor Cabang Abepura</li> <li>- Lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Direktur Kepatuhan</li> <li>- Usulan <i>Review Business Meeting</i> Tahun 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
8	19 Agustus 2025	09/RD-BPD/VIII/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Bantuan Mobil Kebakaran oleh Pemerintah Kota Jayapura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
9	16 September 2025	10/RD-BPD/IX/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semarak Undian Tabungan Bank Papua Periode I Tahun 2025</li> <li>- Kalender Bank Papua Tahun 2026</li> <li>- Pembiayaan Mobil Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Jayapura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
10	03 November 2025	11/RD-BPD/XI/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Pembelian Gedung Kantor KC. Abepura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Usulan <i>Sponsorship</i> Persipura Jayapura dan PSBS Biak</li> <li>- Pembahasan CSR Mobil Siaga di KC. Supiori</li> <li>- Pembahasan Membangun Asisten AI Internal Bank Papua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>
11	26 November 2025	12/RD-BPD/XI/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Tindak Lanjut Temuan OJK Perubahan Nomenklatur Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)</li> <li>- Pembahasan Usulan Lokasi dan Relokasi Kantor Cabang Teminabuan</li> <li>- Pembahasan Usulan Lokasi dan Relokasi Kantor Cabang Agats</li> <li>- Pembahasan Usulan Lokasi dan Relokasi Kantor Cabang Aimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yuliana D. Yembise</li> <li>- Sadar Sebayang</li> <li>- Pujianto</li> <li>- Isak S. Wopari</li> <li>- Betty J. Parinussa</li> </ul>

#### F. HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank. Dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab antara Dewan Komisaris dan Direksi telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a Visi Misi
- b *Corporate Plan* dan *Bisnis Plan*
- c Kebijakan perusahaan, ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, *Prudential Banking* termasuk komitmen untuk menghindari segala benturan kepentingan.
- d Menyelenggarakan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### G. PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah mengikuti beberapa seminar/*workshop* dan peningkatan kompetensi tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang mana

dilakukan secara tatap muka langsung dan/atau melalui *video conference/zoom meeting*, sebagai berikut :

**Tabel 5.0**  
**Pelatihan, Seminar/Workshop dan/atau Tugas Bidang Lainnya Direksi**  
**Tahun 2025**

➤ Nama : Yuliana D. Yembise  
Jabatan : Direktur Utama

NO	TANGGAL	PELATIHAN, SEMINAR/WORKSHOP dan PENINGKATAN KOMPETENSI
1	15 s/d 16 Januari 2025	- <i>Workshop</i> Kebijakan dan Aspek Hukum Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Instansi Pemerintah, Badan Layanan Publik, Korporasi dan Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022
2	29 s/d 30 April 2025	- <i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bank sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank
3	18 s/d 19 Juni 2025	- Event Inagurasi <i>Certified Risk Management (CRM)</i> BSMR Seminar Nasional
4	04 Juli 2025	- Gala Dinner dan Malam Apresiasi <i>The Most Outstanding Women 2025</i>
5	28 s/d 29 Juli 2025	- Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Timur
6	06 s/d 07 Agustus 2025	- <i>Welcome Party</i> (Makan Malam) Bersama Seluruh Peserta Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda - Seminar Nasional BPDSI - Acara Puncak Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda
7	21 s/d 22 Agustus 2025	- Diskusi Progres dan Tantangan <i>Road Map</i> Penguatan BPD Tahun 2024 s/d tahun 2027 (Materi dari OJK dan BPK)
8	01 September 2025	- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke dan Wakil Bupati Merauke - Survei Lokasi Pembiayaan Kredit Kantor Cabang Utama Merauke
9	07 s/d 09 September 2025	- Arahkan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Kantor Cabang Utama Nabire - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Nabire - Supervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siriwini dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Samabusa
10	10 s/d 12 September 2025	- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Siang Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati

		<p>Kabupaten Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite KKI Bersama BPKAD dan Inspektorat Kota Sorong</li> </ul>
11	20 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Workshop</i> Implementasi GRC dan Perlindungan Hukum</li> </ul>
12	25 s/d 26 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua dan Ketua Komisi II DPR-RI</li> <li>- <i>Workshop</i> Implementasi GRC dan Perlindungan Hukum</li> </ul>
13	29 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 25.000 Unit dan Penyerahan Simbolis oleh Presiden Republik Indonesia (RI)</li> </ul>
14	06 s/d 09 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS)</li> <li>- Pertemuan Bersama Tim Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi Tentang Pembahasan Pertemuan dengan Bapak Tommy Soeharto</li> <li>- Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua</li> </ul>
15	13 s/d 14 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri Upacara Bendera Memperingati HUT Provinsi Papua Barat ke-26 (dua puluh enam) Tahun 2025 dan Jamuan Makan Malam bersama Gubernur Papua Barat</li> </ul>
16	17 s/d 18 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Direksi Bersama Tim dan <i>Owner</i> dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi <i>Fraud</i> pada Fitur QRIS <i>Mobile Banking</i> dan Transaksi <i>Internet Banking</i> Bisnis Bank Papua</li> <li>- Menghadiri Acara Festival Budaya Biak</li> <li>- Pertemuan Bersama Wakil Gubernur Provinsi Papua</li> </ul>
17	24 s/d 26 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi Kantor Kas Bupati – Kantor Cabang Wasior</li> <li>- Supervisi Kantor Cabang Wasior</li> <li>- Jamuan Makan Malam dengan Tim BPK-RI</li> </ul>
18	07 s/d 10 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Audience</i> Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Mimika.</li> <li>- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan Bersama dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Kantor Cabang Timika</li> </ul>
19	13 s/d 14 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar <i>The 9<sup>th</sup> Indonesia Outlook</i> (IRMO) 2026 dengan <i>Key Note Speech</i> Bapak Purbaya – Menteri Keuangan Republik Indonesia</li> <li>- Finalisasi Tarif PASK 71 Tahun 2021</li> <li>- <i>High Level Meeting</i> Kepala OJK dan Pengurus Bank Pembangunan Daerah (Direktur Utama &amp; Komisaris Utama) Kegiatan Recycling BPD se- Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2025</li> </ul>
20	21 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Peresmian Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat</li> </ul>

		<p>Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya</li> </ul>
21	28 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025</li> </ul>
22	04 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Dialog Akhir Tahun antara Dewan Komisiner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025</li> </ul>
23	13 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>High Level Meeting</i> Penguatan Proses Bisnis dan Digitalisasi Perencanaan Strategis Bank Papua dengan Vendor Nursiam Bangun Santoso (<i>Managing Director of LM University BPD</i>)</li> <li>- Pembahasan BPP/SOP Bank Devisa</li> <li>- Pertemuan dengan Manajemen PT HSS dan HAS</li> <li>- Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo untuk Presentasi PT Sarana Pactindo</li> </ul>
24	22 s/d 23 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Workshop</i> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Peta Pasal yang Relevan Terhadap Bank</li> <li>- <i>Exit Meeting</i> Interim Audit Umum Laporan Keuangan Bank Papua Bersama Tim KAP secara <i>Offline</i> dan Pemimpin Divisi (<i>Zoom</i>)</li> <li>- Komite Kredit dengan Agenda Pembahasan Kredit Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen</li> </ul>

Tabel 5.1

➤ Nama : Betty J. Parinussa  
 Jabatan : Direktur Kepatuhan

NO	TANGGAL	PELATIHAN, SEMINAR/WORKSHOP dan PENINGKATAN KOMPTENSI
1	15 s/d 16 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Workshop</i> Kebijakan dan Aspek Hukum Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Instansi Pemerintah, Badan Layanan Publik, Korporasi dan Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022</li> </ul>
2	29 s/d 30 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bank sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank</li> </ul>
3	18 s/d 19 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Event Inagurasi <i>Certified Risk Management</i> (CRM) BSMR Seminar Nasional</li> </ul>
4	04 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gala Dinner dan Malam Apresiasi <i>The Most Outstanding Women 2025</i></li> </ul>
5	01 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Pertemuan Bank Papua (Direktur Kepatuhan dan Tim Divisi Hukum) dengan Bpk. Bambang Widjajanto</li> </ul>
6	07 s/d 14 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dan Makan Siang Bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata Deputi IV (BSSN) Dalam Rangka Menerima Penyerahan Laporan Hasil Audit Forensik BSSN atas Insiden Anomali Transaksi QRIS M-banking Bank Papua</li> <li>- Pembahasan Hasil Audit Forensik BSSN</li> </ul>

		<p>Antara Tim Bank Papua dengan Pihak Vendor PT Sarana Pactindo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan Konsultasi ke Bank Indonesia c.q Departemen Suvelains Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen</li> <li>- Kunjungan Konsultasi ke PPATK Deputi Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I</li> <li>- Pembahasan Bersama PT Arta Jasa Atas Tindaklanjut Hasil Konsultasi Bank Papua dengan Bank Indonesia</li> </ul>
7	27 s/d 28 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional dan Syariah (SEOJK 14/SEOJK.03/2025)</li> </ul>
8	07 s/d 12 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Kantor Cabang Utama Nabire</li> <li>- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Nabire</li> <li>- Supervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siriwini dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Samabusa</li> <li>- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Siang Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati Kabupaten Sorong</li> <li>- Komite KKI Bersama BPKAD dan Inspektorat Kota Sorong</li> </ul>
9	25 s/d 26 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberitahuan Penjadwalan Ulang / <i>Reschedule</i> Undangan Seminar Program Eksekutif Bagi Bank Pembangunan Daerah dengan Tema; "Implementasi <i>Governance Risk and Compliance</i> (GRC) dan Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Bisnis dan Pembangunan Daerah"</li> </ul>
10	08 s/d 09 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua</li> </ul>
11	15 s/d 18 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan FGD Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial - Direktur Kepatuhan</li> <li>- Pertemuan Direksi Bersama Tim dan <i>Owner</i> dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi <i>Fraud</i> pada Fitur QRIS <i>Mobile Banking</i> dan Transaksi <i>Internet Banking</i> Bisnis Bank Papua</li> </ul>
12	27 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Audiensi Bank Papua dengan PPATK Pusat Deputi Analisis dan Pemeriksaan</li> </ul>
13	06 s/d 07 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Audience</i> Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Mimika</li> </ul>

14	13 s/d 14 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seminar <i>The 9<sup>th</sup> Indonesia Outlook (IRMO) 2026</i> dengan <i>Key Note Speech</i> Bapak Purbaya – Menteri Keuangan Republik Indonesia</li> <li>- Finalisasi Tarif PASK 71 Tahun 2021</li> </ul>
15	04 s/d 05 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Woman Empower Woman Award 2025</i></li> <li>- Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo terkait Pembahasan Lanjutan Penggantian Kerugian Finansial yang Dialami oleh Bank Papua Akibat Terjadinya Anomali Transaksi QRIS</li> </ul>
16	10 s/d 13 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan Keterangan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya</li> <li>- Pertemuan Direktur Kepatuhan, Pemimpin Divisi Hukum dan Team dengan Bpk. Piter Lie</li> <li>- Pelaksanaan Penyusunan Kertas Kerja Budgeting RBB sebagai Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK dan <i>High Level Meeting</i> Penguatan Proses Bisnis dan Digitalisasi Perencanaan Strategis Bank Papua dengan Vendor Nursiam Bangun</li> </ul>
17	19 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audiensi dan Penyerahan CSR Motor Pengangkut Sampah untuk Kabupaten Merauke</li> </ul>
18	22 s/d 23 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Workshop</i> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Peta Pasal yang Relevan Terhadap Bank</li> </ul>

Tabel 5.2

➤ Nama : Sadar Sebyang  
 Jabatan : Direktur Bisnis

NO	TANGGAL	PELATIHAN, SEMINAR/WORKSHOP dan PENINGKATAN KOMPTENSI
1	17 Januari 2025	- <i>Refreshment</i> Sertifikasi <i>Treasury</i> Jenjang VII (Tujuh)
2	29 s/d 30 April 2025	- <i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bank sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank
3	18 s/d 19 Juni 2025	- Event Inagurasi <i>Certified Risk Management (CRM) BSMR</i> Seminar Nasional
4	22 s/d 24 Juli 2025	- Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan T.A 2025
5	05 s/d 08 Agustus 2025	- Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda
6	22 Agustus 2025	- Penandatanganan MoU dan PKS tentang Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana SP2DD secara <i>Online</i> melalui Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
7	01 September 2025	- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati

		Merauke dan Wakil Bupati Merauke
8	06 s/d 08 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan PKS dengan PT Jamkrindo</li> <li>- Penandatanganan PKS dengan PT Jasindo</li> <li>- Penandatanganan PKS dengan PT Asuransi Ramayana</li> <li>- Penandatanganan PKS dengan PT BRI Asuransi (BRINS)</li> <li>- Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua</li> </ul>
9	14 s/d 16 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Aprov Final Fisik Kalender dan Agenda Bank Papua Tahun 2026</li> <li>- Penandatanganan PKS dengan PT Solo Murni</li> </ul>
10	06 s/d 07 November 2025	- <i>Audience</i> Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Mimika.
11	14 s/d 20 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisasi Tarif PASK 71 Tahun 2021</li> <li>- <i>High Level Meeting</i> Kepala OJK dan Pengurus Bank Pembangunan Daerah (Direktur Utama &amp; Komisaris Utama) Kegiatan Recycling BPD se- Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2025</li> <li>- Penandatanganan PKS <i>Sponsorship</i> antara Bank Papua dan PT Persipura</li> <li>- Penandatanganan PKS <i>Sponsorship</i> antara Bank Papua dan PSBS Biak</li> <li>- Penandatanganan <i>Addendum</i> Perjanjian Kredit Sindikasi</li> <li>- Diskusi dengan Direksi PT Askrindo</li> </ul>
12	05 Desember 2025	- Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo terkait Pembahasan Lanjutan Penggantian Kerugian Finansial yang Dialami oleh Bank Papua Akibat Terjadinya Anomali Transaksi QRIS
13	22 s/d 23 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Workshop</i> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Peta Pasal yang Relevan Terhadap Bank</li> <li>- Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS)</li> </ul>

Tabel 5.3

➤ Nama : Isak S. Wopari  
 Jabatan : Direktur Operasional

NO	TANGGAL	PELATIHAN, SEMINAR/WORKSHOP dan PENINGKATAN KOMPTENSI
1	29 s/d 30 April 2025	- <i>Workshop</i> Penerapan Kebijakan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bank sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Laporan Keuangan Bank
2	03 s/d 04 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 "Kilas Balik Kejahatan Siber"</li> <li>- Gala Dinner dan Malam Apresiasi <i>The</i></li> </ul>

		<i>Most Outstanding Women 2025</i>
3	08 Juli 2025	- Pembukaan Pelatihan Perisapan Masa Purna Bhakti
4	08 Agustus 2025	- Menghadiri Undangan Acara Penutupan Festival Lembah Baliem ke - 33 Kabupaten Jayawijaya - Provinsi Papua Pegunungan
5	13 Agustus 2025	- <i>Meeting</i> finalisasi kesiapan infrastruktur (Aplikasi, Database, Jaringan) - <i>Workshop</i> Strategi Tata Kelola AI di Industri Keuangan Perspektif Praktis untuk Bank Daerah
6	10 September 2025	- Inagurasi Gelar <i>Certified Risk Management (CRM)</i> dan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko J7 oleh IRPA
7	16 September 2025	- Kegiatan <i>Sport Gathering</i> - <i>Launcing</i> Kanal Bayar luran BPJS Ketenagakerjaan
8	18 s/d 20 September 2025	- Kegiatan <i>Members Meeting &amp; ATM</i> Bersama <i>Awards 2025</i> bersama Info Bank - Penyerahan Bantuan CSR Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar Bersama Pimpinan Kantor Cabang Makassar
9	08 s/d 09 Oktober 2025	- Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua - Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS) Pembahasan Penyelesaian Angsuran Kredit
10	13 s/d 14 Oktober 2025	- Menghadiri Upacara Bendera Memperingati HUT Provinsi Papua Barat ke-26 (dua puluh enam) Tahun 2025 dan Jamuan Makan Malam bersama Gubernur Papua Barat
11	17 s/d 18 Oktober 2025	- Pertemuan Direksi Bersama Tim dan <i>Owner</i> dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi <i>Fraud</i> pada Fitur QRIS <i>Mobile Banking</i> dan Transaksi <i>Internet Banking</i> Bisnis Bank Papua
12	20 s/d 22 Oktober 2025	- Pertemuan dan Makan Malam dengan Bupati Kabupaten Jayawijaya - Pembukaan Kegiatan <i>Ree-Treat</i> dengan Bupati dan Ibu Wamendagri - Supervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jibama dan Kantor Cabang Utama (KCU) Wamena
13	27 s/d 28 Oktober 2025	- Pertemuan Rapat Koordinasi Tindakan Pemulihan Aset Kasus Peretasan Bank Papua
14	13 s/d 14 November 2025	- <i>Workshop "BPD Go Digital Compliance and Innovation"</i> - Menghadiri Penutupan Program Pemimpin Cabang Angkatan 207 dan Pemimpin Cabang Syariah Angkatan 28
15	17 November 2025	- Menghadiri Undangan "Peringatan Hari Ulang Tahun Ke- 13 Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025
16	17 s/d 22 November 2025	- Penandatanganan PKS <i>Sponsorship</i> antara Bank Papua dan PT Persipura - Menghadiri Seminar " <i>When Security</i>

		<p><i>Becomes the Greatest Risk in Financial Industry"</i> dari Info Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan PKS <i>Sponsorship</i> antara Bank Papua dan PSBS Biak</li> <li>- Menghadiri Undangan dan Memberikan Ucapan Selamat pada Wisuda XVIII Mahasiswa S2 Bank Papua Tahun 2025</li> </ul>
17	01 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri Perayaan Natal Bersama <i>Christmas Celebration</i> STFT Jaffray &amp; Bank Papua KC. Makassar</li> </ul>
18	05 s/d 06 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Bank Papua dengan Pihak Pemerintah Daerah (Plt. Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan) Kabupaten Nduga Agenda Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Kredit ke V</li> </ul>
19	13 s/d 21 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Penyusunan Kertas Kerja Budgeting RBB sebagai Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK dan <i>High Level Meeting</i> Penguatan Proses Bisnis dan Digitalisasi Perencanaan Strategis Bank Papua dengan Vendor Nursiam Bangun</li> <li>- Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS)</li> <li>- Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo untuk Presentasi PT Sarana Pactindo</li> <li>- Peresmian Kantor Kas Yukase - Kantor Cabang Maybrat</li> <li>- Menghadiri dan Mewakili Manajemen (Direksi dan Komisaris) untuk Pemakaman di Rumah Duka Almarhum Bapak Dortheis Sesa, SE., Komisaris Independen</li> </ul>
20	29 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi Kantor Cabang Surabaya</li> </ul>

Tabel 5.4

➤ Nama : Pujianto  
 Jabatan : Direktur Keuangan

NO	TANGGAL	PELATIHAN, SEMINAR/WORKSHOP dan PENINGKATAN KOMPTENSI
1	17 Januari 2025	- <i>Refreshment</i> Sertifikasi <i>Treasury</i> Jenjang VII (Tujuh)
2	15 Mei 2025	- Analisis Kerawanan Bank Umum dan Strategi Anti <i>Fraud</i>
3	12 s/d 14 Juni 2025	- Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Pemerintah (PBJS) Level I
4	04 Juli 2025	- Gala Dinner dan Malam Apresiasi <i>The Most Outstanding Women 2025</i>
5	04 s/d 09 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dengan Bapak Edit Prima Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan BSSN Beserta Tim</li> <li>- Pertemuan Bersama Direktur Teknologi dan Operasional Beserta Tim PT Artajasa Pembayaran Elektronik, Membahas Progress Penanganan Transaksi Anomali QRIS <i>M-Banking Papua Mobile</i> dan Meminta PT AJ Menjembatani untuk Kemungkinan Pertemuan, antara Bank Papua dengan PT GOPAY, Bank Nobu</li> </ul>

		dan PT Bank Mandiri
6	14 s/d 16 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Briefing</i> Dirkeu Bersama Tim Divisi Hukum dan Divisi Pengelolaan Aset Khusus (Ibu Asmi, Bapak Alpius, Ibu Agustina, Bapak Roy Pongtiku) Terkait Pemanggilan Kejaksaan Minahasa Selatan</li> <li>- Mewakili Ibu Direktur Utama Memenuhi Panggilan Kejaksaan Minahasa Selatan</li> <li>- Bersama Tim Divisi Hukum dan Divisi Pengelolaan Aset Khusus Meninjau Lokasi Jaminan Milik PT Muintan Gemajaya</li> </ul>
7	07 s/d 14 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dan Makan Siang Bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata Deputi IV (BSSN) Dalam Rangka Menerima Penyerahan Laporan Hasil Audit Forensik BSSN atas Insiden Anomali Transaksi QRIS <i>M-banking</i> Bank Papua</li> <li>- Pembahasan Hasil Audit Forensik BSSN Antara Tim Bank Papua dengan Pihak Vendor PT Sarana Pactindo</li> <li>- Kunjungan dan Konsultasi ke Bank Indonesia c.q Departemen Suvelains Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen</li> <li>- Kunjungan dan Konsultasi ke PPAK Deputi Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I</li> <li>- Pembahasan Bersama PT Artajasa atas Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bank Papua dan Bank Indonesia</li> </ul>
8	20 s/d 21 Agustus 2025	- RAKORWIL SULAMPUA Triwulan III Bank Indonesia
9	02 September 2025	- Inaugurasi Gelar <i>Certified Risk Management</i> (CRM) dan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko J7024
10	09 September 2025	- Penandatanganan <i>Addendum</i> PK Restrukturisasi Sindikasi PT Sahid Inti Dinamika
11	24 s/d 26 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT OKI Pulp &amp; Paper Mills</li> <li>- Pelatihan Program Eksekutif GRC ASBANDA</li> <li>- Menghadiri sosialisasi sistem pembayaran "<i>Strengthening Cybersecurity in the Payment System Industry to Safeguard National Interests in the Digital Economy</i>"</li> <li>- Menghadiri penandatanganan Perjanjian Induk Derivatif Antar Bank Secara Bersama dan Peluncuran <i>Matchmaking</i> OIS</li> </ul>
12	06 s/d 09 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS)</li> <li>- Pertemuan Bersama Tim Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi Tentang Pembahasan Pertemuan dengan Bapak Tommy Soeharto</li> <li>- Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua</li> <li>- Pertemuan dengan vendor PT Kertajaya Gemilang</li> </ul>

13	17 s/d 18 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Direksi Bersama Tim dan <i>Owner</i> dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi <i>Fraud</i> pada Fitur QRIS <i>Mobile Banking</i> dan Transaksi <i>Internet Banking</i> Bisnis Bank Papua</li> </ul>
18	20 s/d 26 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan PKS Pemda Kab. Biak Numfor dengan PT BPD Papua</li> <li>- Menghadiri Acara Festival Budaya Biak</li> <li>- Supervisi Kantor Kas Bupati – Kantor Cabang Wasior</li> <li>- Supervisi Kantor Cabang Wasior</li> <li>- Jamuan Makan Malam dengan Tim BPK-RI</li> </ul>
19	05 s/d 14 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koodinasi Dalam Rangka Mempercepat dan Memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atas Pengeluaran Daerah, Khususnya Penggunaan KKPD serta Membahas Kendala Teknis Penerapan KKPD di Beberapa Pemerintah Daerah</li> <li>- Pembahasan SPT PPh Badan Bank Papua Tahun 2025 Melalui Aplikasi Coretax Bersama Konsultan</li> <li>- Evaluasi Tarif PSAK 71 Periode Tahun 2025</li> <li>- Menghadiri Pemberian Apresiasi Bagi Mitra Kerja Kemenkes RI yang telah Berkomitmen Dalam Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Menerima penghargaan dari KEMENDUK Bangga/ BKKBN selaku Mitra <i>Pentahelix</i> Kategori BUMD</li> <li>- Menghadiri seminar <i>The 9th Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2026</i> dengan tema : "<i>Navigating Banking Business Amid Economic Landscape Turmoil</i>"</li> </ul>
20	12 s/d 15 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IRPA <i>Annual Risk Professional Summit 2025</i></li> <li>- Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo untuk Presentasi PT Sarana Pactindo</li> <li>- Peresmian Kantor Kas Yukase - Kantor Cabang Maybrat</li> <li>- Menghadiri Pemakaman di Rumah Duka Almarhum Bapak Dortheis Sesa, SE., Komisararis Independen</li> </ul>



## 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

### A. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Tata Kelola Bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas memastikan Bank telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, memberikan nasihat strategis kepada Direksi demi terciptanya praktik manajemen yang sehat, menjamin penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh tingkatan organisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi ketentuan pihak otoritas yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah 5 (lima) orang Anggota Dewan Komisaris yang ada, yaitu 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen, maka Pada tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya, menghasilkan keputusan, antara lain :

- a) Memperpanjang sementara masa jabatan Saudara Dorteis Sesa, SE sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua terhitung mulai tanggal 19 April 2025 (sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima) berdasarkan Surat Keputusan RUPS Nomor : 03/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 Tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ;



- b) Perpanjangan sementara masa jabatan sesuai poin (a) diatas akan berakhir setelah adanya penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait masa jabatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan Tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);

Pada tanggal 15 Desember Tahun 2025 (lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima), salah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu Saudara Dortheis Sesa, SE telah dipanggil berpulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima), jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua mengalami 1 (satu) kali perubahan , yaitu :

**Tabel 6.0**  
**Komposisi Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua**  
**Periode 01 Januari 2025 s/d 15 Desember 2025**

No	Nama	Jabatan	Keputusan RUPS
1	Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama (Non Independen)	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023
2	Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020
3	Dortheis Sesa	Komisaris Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020
4	H. Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022
5	Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024

**Tabel 6.1**  
**Komposisi Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua**  
**Periode 16 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025**

No	Nama	Jabatan	Keputusan RUPS	Keputusan OJK
1	Yorgemes Derek Hegemur	Komisaris Utama (Non Independen)	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR - 131/D.03/2023
2	Nataniel D. Mandacan	Komisaris Non Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 169/D.03/2018
3	H. Arobi Ahmad Aituarauw	Komisaris Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 92/D.03/2022
4	Victor Abraham Abaidata	Komisaris Independen	SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEPR – 41/D.03/2024

## B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Bank maupun usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Bank, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank serta ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris yang berlaku untuk setiap anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;

- b Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
- c Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f Rencana strategis Bank;
- g Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank;
- h Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.

### **C. PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris Bank Papua telah memiliki pedoman kerja yang menjadi panduan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Buku III (Pedoman Kerja Dewan Komisaris).

### **D. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan dan dapat diinisiasi dari Dewan Komisaris atau Direksi sehingga diperoleh kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan diantaranya Dewan

Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi.

Sepanjang tahun 2025, Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tatap muka langsung dan/atau melalui *video conference/zoom meeting*, dimana Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 5 (lima) Rapat Internal Dewan Komisaris, termasuk di antaranya 5 (lima) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagai berikut :

**Tabel 7.0**  
**Rapat Dewan Komisaris**  
**(Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi)**  
**PT Bank Pembangunan Daerah Papua**  
**Tahun 2025**

No	Jenis Rapat	Tanggal	Nomor Rapat	Agenda / Materi Rapat
1	Rapat Internal Dewan Komisaris	21 Januari 2025	01/RI/DK-BPD/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Papua Triwulan I Tahun 2024 Penyusunan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025 dan Evaluasi Program Tahun 2024.</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
2	Rapat Internal Dewan Komisaris	10 Februari 2025	02/RI/DK-BPD/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS LB</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
3	Rapat Internal Dewan Komisaris	14 April 2025	03/RI/DK-BPD/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2025</li> <li>- Pembahasan Materi Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
4	Rapat Internal Dewan Komisaris	19 Mei 2025	04/RI/DK-BPD/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang Disampaikan oleh Plt. Direktur Utama (Bpk. Pujiyanto) dalam Rapat Komite Audit Tanggal 29 April 2025 Terkait Adanya Anomali Transaksi pada MBanking QRIS Bank Papua</li> <li>- Surat Bank Indonesia Nomor : 27/231/DSPK/Srt/Rhs Tanggal 02 Mei 2025 Tentang Sanksi atas Insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi Menggunakan Kanal Q-RIS pada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) PT BPD Papua (Bank Papua)</li> <li>- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-35/KO.1604/2025 Tanggal 05 Mei 2025 Tentang Perkembangan Terkini, Tindak Lanjut Insiden dan Isu Strategis Terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Keamanan Siber dan <i>Digital Banking</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua</li> <li>- Rapat Internal Komite Pemantau Risiko Tanggal 14</li> </ul>

				Mei 2025 Terkait Dengan Insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi Menggunakan <i>Mobile Banking</i> Kanal QRIS
5	Rapat Internal Dewan Komisaris	01 Juli 2025	7/RI/DK-BPD/2025	- Pembahasan Hasil Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Lain-lain
6	Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi	21 Januari 2025	1/RG/DK-BPD/2025	- Evaluasi Kinerja Bisnis Bank Tahun 2024 - Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 - Lain-lain
7	Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi	10 Februari 2025	2/RG/DK-BPD/2025	- Pembahasan Materi RUPS dan Lokasi Pelaksanaan RUPS Tahunan - Lain-lain
8	Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi	15 April 2025	3/RG/DK-BPD/2025	- Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2025 - Laporan Singkat Progres Persiapan ASBANDA Tahun 2025 - Penyesuaian Jadwal Kegiatan Direksi dan Komisaris Tahun 2025 - Lain-lain
9	Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi	29 Oktober 2025	/RG/DK-BPD/2025	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan - Isu Terkini Permasalahan Hukum - Lain-lain
10	Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi	27 November 2025	6/RG/DK-BPD/2025	- Pembahasan Rancangan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 - Perkembangan Terkini Hasil Tindak Lanjut Insiden Teknologi Informasi (TI) - Lain-lain

## E. FOKUS PENGAWASAN

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komunikasi yang intensif selalu dilaksanakan untuk membahas isu-isu signifikan, termasuk konsistensi pelaksanaan rencana bisnis Bank. Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris dilakukan secara formal maupun informal kepada Direksi didalam menjalankan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris harus melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola Bank agar dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Fungsi pengawasan dapat terwujud dengan baik apabila setiap nasehat yang diberikan dapat diaplikasikan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris fokus kepada Pengawasan Strategik, Pengawasan Risiko, Pengawasan Penggunaan Modal, Pengawasan terhadap Tata Kelola Bank.

- Pengawasan Strategik dengan mengarah kepada pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan strategik.
- Pengawasan terhadap pengelolaan risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan strategik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada peraturan Bank Indonesia maupun regulasi lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola Bank.

#### **F. PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS**

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan program pelatihan untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan anggota Dewan Komisaris mengenai informasi-informasi perkembangan industri perbankan terkini maupun pengetahuan lainnya melalui program pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dilakukan secara tatap muka langsung dan/atau melalui *video conference/zoom meeting*, adapun pelatihan/*workshop* dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel 8.0**  
**Pelatihan, Seminar/Workshop dan/atau Tugas Bidang Lainnya**  
**Dewan Komisaris**  
**Tahun 2025**

➤ Nama : Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH  
 Jabatan : Komisaris Utama/Komisaris Non Independen

NO	TANGGAL	PELATIHAN
1	30 s/d 31 Januari 2025	- Sistem Pengendalian Internal Bank
2	07 s/d 09 Mei 2025	- Program Pemeliharaan ( <i>refreshment</i> ) Manajemen Risiko Jenjang IV-VII - Pelatihan Sistematis Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
3	22 Mei 2025	- Membangun Ketahanan Siber di Era <i>Digital Banking</i>
4	11 s/d 12 Juni 2025	- Pelatihan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
5	10 Juli 2025	- Arah Kebijakan Dalam <i>Road Map</i> Bank Pembangunan Daerah
6	22 s/d 23 Agustus 2025	- Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023
7	27 s/d 28 Agustus 2025	- <i>Workshop</i> SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
8	09 s/d 10 Oktober 2025	- Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal

**Tabel 8.1**

➤ Nama : Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si  
 Jabatan : Anggota Komisaris Non Independen

NO	TANGGAL	PELATIHAN
1	30 s/d 31 Januari 2025	- Sistem Pengendalian Internal Bank
2	07 s/d 09 Mei 2025	- Program Pemeliharaan ( <i>refreshment</i> ) Manajemen Risiko Jenjang IV-VII - Pelatihan Sistematis Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
3	22 s/d 24 Mei 2025	- Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V
4	11 s/d 12 Juni 2025	- Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang VI
5	22 s/d 23 Agustus 2025	- Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023
6	27 s/d 28 Agustus 2025	- <i>Workshop</i> SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
7	09 s/d 10 Oktober 2025	- Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal



Tabel 8.2

➤ Nama : Dorthois Sesa, SE (Almarhum)  
 Jabatan : Anggota Komisaris Independen

NO	TANGGAL	PELATIHAN
1	30 s/d 31 Januari 2025	- Sistem Pengendalian Internal Bank
2	21 Februari 2025	- FGD Penyelarasan Pemahaman dan/atau Persepsi Mengenai Perizinan PKK Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum
3	07 s/d 09 Mei 2025	- Program Pemeliharaan ( <i>refreshment</i> ) Manajemen Risiko Jenjang IV-VII - Pelatihan Sistematis Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
4	22 Mei 2025	- Membangun Ketahanan Siber di Era <i>Digital Banking</i>
5	11 s/d 12 Juni 2025	- Pelatihan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
6	10 Juli 2025	- Arah Kebijakan Dalam <i>Road Map</i> Bank Pembangunan Daerah
7	22 s/d 23 Agustus 2025	- Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023
8	27 s/d 28 Agustus 2025	- <i>Workshop</i> SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
9	09 s/d 10 Oktober 2025	- Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal

Tabel 8.3

➤ Nama : H. Arobi Ahmad Aituarauw, SE, MM  
 Jabatan : Anggota Komisaris Independen

NO	TANGGAL	PELATIHAN
1	30 s/d 31 Januari 2025	- Sistem Pengendalian Internal Bank
2	21 Februari 2025	- FGD Penyelarasan Pemahaman dan/atau Persepsi Mengenai Perizinan PKK Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum
3	07 s/d 09 Mei 2025	- Program Pemeliharaan ( <i>refreshment</i> ) Manajemen Risiko Jenjang IV-VII - Pelatihan Sistematis Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
4	22 Mei 2025	- Membangun Ketahanan Siber di Era <i>Digital Banking</i>
5	09 s/d 11 Juni 2025	- Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang VI
6	11 s/d 12 Juni 2025	- Pelatihan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
7	10 Juli 2025	- Arah Kebijakan Dalam <i>Road Map</i> Bank Pembangunan Daerah
8	22 s/d 23 Agustus 2025	- Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023

9	09 s/d 10 Oktober 2025	- Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal
10	18 s/d 19 Desember 2025	- <i>Workshop</i> POJK No. 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tabel 8.4

➤ Nama : Victor Abraham Abaidata, SH  
 Jabatan : Anggota Komisaris Independen

NO	TANGGAL	PELATIHAN
1	30 s/d 31 Januari 2025	- Sistem Pengendalian Internal Bank
2	21 Februari 2025	- FGD Penyelarasan Pemahaman dan/atau Persepsi Mengenai Perizinan PKK Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum
3	07 s/d 09 Mei 2025	- Program Pemeliharaan ( <i>refreshment</i> ) Manajemen Risiko Jenjang IV-VII - Pelatihan Sistematis Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
4	15 s/d 16 Mei 2025	- Analisis Kerawanan Bank Umum dan Strategi Anti <i>Fraud</i>
5	22 Mei 2025	- Membangun Ketahanan Siber di Era <i>Digital Banking</i>
6	11 s/d 12 Juni 2025	- Pelatihan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
7	10 Juli 2025	- Arah Kebijakan Dalam <i>Road Map</i> Bank Pembangunan Daerah
8	22 s/d 23 Agustus 2025	- Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023
9	27 s/d 28 Agustus 2025	- <i>Workshop</i> SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
10	09 s/d 10 Oktober 2025	- Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal
11	18 s/d 19 Desember 2025	- <i>Workshop</i> POJK No. 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12	21 s/d 22 Desember 2025	- <i>Workshop</i> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru Pasal yang Relevan Terhadap Bank

### 3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diperlukan organ komite di bawah Dewan Komisaris. Komite – komite di bawah Dewan komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan

memperhatikan Peraturan Perundang - undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Adapun komite-komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

#### **A. KOMITE DEWAN KOMISARIS**

Seluruh komite di tingkat Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensinya. Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

Sepanjang tahun 2025, terdapat 2 (dua) kali perubahan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris, Mendasari masing – masing antara lain :

- a) Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua ;
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang

Sehingga susunan Komite Dewan Komisaris Bank Papua sebagai berikut :

**Tabel 9.0**  
**Komposisi Komite Dewan Komisaris**  
**Periode Tahun 2025**

**1. A. Komite Audit**  
**Periode 01 Januari 2025 s/d 02 Maret 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	H. Arobi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
4	Dortheis Sesa, SE	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
5	Victor Abraham Abaidata, SH	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
6	Jonathan Sesa, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
7	Marthin Yanis Warikar, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

**Tabel 9.1**

**B. Komite Audit**  
**Periode 03 Maret 2025 s/d 16 Desember 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	H. Arobi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Dortheis Sesa, SE	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Victor Abraham Abaidata, SH	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
4	Jonathan Sesa, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
5	Marthin Yanis Warikar, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
6	Ludia Kiding	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

**Tabel 9.2**

**C. Komite Audit**  
**Periode 17 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	H. Arobi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Dortheis Sesa, SE	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Victor Abraham Abaidata, SH	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
4	Jonathan Sesa, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
5	Marthin Yanis Warikar, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
6	Ludia Kiding	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
7	Yohanes Mandang, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Tabel 9.3

2. A. Komite Pemantau Risiko  
Periode 01 Januari 2025 s/d 02 Maret 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	Victor Abraham Abaidata, SH	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
4	H. Arabi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
5	Dortheis Sesa, SE	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
6	Yohanes Mandang, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Tabel 9.4

B. Komite Pemantau Risiko  
Periode 03 Maret 2025 s/d 16 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	Victor Abraham Abaidata, SH	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
4	H. Arabi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
5	Dortheis Sesa, SE	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
6	Yohanes Mandang, SE	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
7	Anita Erari	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
8	Daud Sitepu	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
9	Yunus B. Toding Allo	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Tabel 9.5

C. Komite Pemantau Risiko  
Periode 17 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	Victor Abraham Abaidata, SH	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
4	H. Arabi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
5	Dortheis Sesa, SE	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
6	Anita Erari	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

7	Daud Sitepu	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
8	Yunus B. Toding Allo	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Tabel 9.6

**3. A. Komite Remunerasi dan Nominasi  
Periode 01 Januari 2025 s/d 15 Desember 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	Dortheis Sesa, SE	Ketua	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
2	Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Drs. Nataniel Domingus Mandacan, M.Si	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
4	H. Arobi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
5	Victor Abraham Abaidata, SH	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
6	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusai	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Tabel 9.7

**B. Komite Remunerasi dan Nominasi  
Periode 16 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Sertifikasi Kompetensi
1	-	Ketua	-	-
2	Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
3	Drs. Nataniel Domingus Mandacan, M.Si	Anggota	Komisaris Non Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
4	H. Arobi Ahmad Aituarauw, SE.,MM	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
5	Victor Abraham Abaidata, SH	Anggota	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
6	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusai	Anggota	Pihak Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

**NB :** Pada tanggal 15 Desember 2025, Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga sampai dengan periode 31 Desember 2025, terdapat kekosongan pada jabatan Ketua **Komite Remunerasi dan Nominasi**.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Komite Komisaris dalam hal – hal, sebagai berikut :

**1. Komite Audit :**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan

efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal serta melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan, yaitu :

- a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit.
- b. Melakukan *review* terhadap pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) agar sesuai dengan standart audit, kesesuaian laporan keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas (hasil temuan DAI dan Akuntan Publik) dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Komite Pemantau Risiko :

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan, yaitu :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- b. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

## 3. Komite Remunerasi dan Nominasi :

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk

membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perseroan, yaitu :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang evaluasi kebijakan remunerasi. Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Memberikan rekomendasi calon Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

### 3. RAPAT KOMITE

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyelenggarakan rapat apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.

Rapat Komite dilaksanakan melalui tatap muka dan/atau *video conference/zoom meeting*, adapun Rapat Komite telah mengadakan beberapa kali rapat, sebagai berikut :

#### a. Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit melangsungkan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mencakup pengesahan risalah rapat sebelumnya, pembahasan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian.

Tabel 10.00  
Rapat Komite Audit  
Tahun 2025

No	Jenis Rapat	Tanggal	Nomor Rapat	Agenda / Materi Rapat
1	Rapat Komite Audit	24 Januari 2025	01/RKA/DK-BPD/2025	- Evaluasi Pelaksanaan PKAT Tahun 2024 - Laporan Tindak Lanjut Temuan Triwulan IV Tahun 2024 - Lain-lain

2	Rapat Komite Audit	05 Maret 2025	02/RKA/DK-BPD/2025	- Tindak Lanjut Temuan KAP Tahun Buku 2023 dan 2024 Tentang <i>Management Letter</i>
3	Rapat Komite Audit	12 Agustus 2025	6/RKA/DK-BPD/2025	- Verifikasi Dokumen Administratif Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Tahun Buku 2025
4	Rapat Komite Audit	23 Agustus 2025	07/RKA/DK-BPD/VIII/2025	- Finalisasi Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP)
5	Rapat Komite Audit	25 Agustus 2025	08/RKA/DK-BPD/VIII/2025	- Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Hertanto Grace Karunawan (HGK), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain
6	Rapat Komite Audit	26 Agustus 2025	09/RKA/DK-BPD/VIII/2025	- Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF Indonesia), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain
7	Rapat Komite Audit	04 September 2025	10/RKA/DK-BPD/IX/2025	- Kompilasi Materi Rapat Tanggal 23 Agustus 2025, 25 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025 - Lain-lain

#### b. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko melangsungkan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, yang mencakup pengesahan risalah rapat sebelumnya, pembahasan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian.

Tabel 10.01  
Rapat Komite Pemantau Risiko  
Tahun 2025

No	Jenis Rapat	Tanggal	Nomor Rapat	Agenda / Materi Rapat
1	Rapat Komite Pemantau Risiko	23 Januari 2025	01/RKPR/DK-BPD/I/2025	- Review Tingkat Kesehatan Bank Triwulan IV Tahun 2024
2	Rapat Komite Pemantau Risiko	24 Februari 2025	02/RKPR/DK-BPD/II/2025	- Penyaluran Kredit sampai dengan Desember 2024 - Kolektibilitas Kredit - Pencapaian Kredit UMK - Realisasi Penjualan asset AYDA
3	Rapat Komite Pemantau Risiko	17 Maret 2025	03/RKPR/DK-BPD/III/2025	- Laporan Divisi Kepatuhan Semester II Tahun 2024, Khususnya Tentang APU-PPT dan P3SPM
4	Rapat Komite	14 Mei 2025	04/RKPR/DK-BPD/V/2025	Tindak Lanjut atas Surat Otoritas

	Pemantau Risiko			<p>Jasa Keuangan atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang Disampaikan oleh Plt. Direktur Utama (Bpk. Pujiyanto) dalam Rapat Komite Audit Tanggal 29 April 2025 Terkait Adanya Anomali Transaksi pada MBanking QRIS Bank Papua</li> <li>• Surat Bank Indonesia Nomor : 27/231/DSPK/Srt/Rhs Tanggal 02 Mei 2025 Tentang Sanksi atas Insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi Menggunakan Kanal Q-RIS pada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) PT BPD Papua (Bank Papua)</li> <li>• Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-35/KO.1604/2025 Tanggal 05 Mei 2025 Tentang Perkembangan Terkini, Tindak Lanjut Insiden dan Isu Strategis Terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Keamanan Siber dan <i>Digital Banking</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua</li> </ul>
5	Rapat Komite Pemantau Risiko	23 Mei 2025	05/RKPR/DK-BPD/V/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang Disampaikan oleh Plt. Direktur Utama (Bpk. Pujiyanto) dalam Rapat Komite Audit Tanggal 29 April 2025 Terkait Adanya Anomali Transaksi pada MBanking QRIS Bank Papua</li> <li>- Surat Bank Indonesia Nomor : 27/231/DSPK/Srt/Rhs Tanggal 02 Mei 2025 Tentang Sanksi atas Insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi Menggunakan Kanal Q-RIS pada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) PT BPD Papua (Bank Papua)</li> <li>- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-35/KO.1604/2025 Tanggal 05 Mei 2025 Tentang Perkembangan Terkini, Tindak Lanjut Insiden dan Isu Strategis Terkait Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Keamanan Siber dan <i>Digital Banking</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua</li> <li>- Rapat Internal Komite Pemantau Risiko Tanggal 14 Mei 2025 Terkait Dengan Insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi pada <i>Mobile Banking</i> Kanal QRIS</li> <li>- Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Tanggal 19 Mei 2025 Anggota Komite Dewan Komisaris Terkait Dengan Insiden <i>Fraud</i> Anomali Transaksi pada <i>Mobile Banking</i> Kanal</li> </ul>

				QRIS.
6	Rapat Komite Pemantau Risiko	24 Juli 2025	06/RKPR/DK-BPD/VII/2025	- Pembahasan Tentang Laporan APU-PPT dan PPPSPM Semester I (pertama) Tahun 2025
7	Rapat Komite Pemantau Risiko	24 Juli 2025	07/RKPR/DK-BPD/VII/2025	- Evaluasi atas Realisasi Kebijakan Penetapan <i>Risk Appetite dan Risk Tolerance</i> - Stres Testing untuk Kebutuhan Likuiditas Akhir Tahun 2024 - Lain-lain
8	Rapat Komite Pemantau Risiko	11 Agustus 2025	08/RKPR/VIII/2025	- Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Papua Semester I Tahun 2025 - Lain-lain
9	Rapat Komite Pemantau Risiko	13 Agustus 2025	09/RKPR/DK-BPD/VIII/2025	- Laporan Perkembangan Perkreditan Semester I Tahun 2025 - Isu-isu Terkait Penyaluran Kredit UMK - Penyiapan Kebijakan Intern Format Analis Kredit UMK - Pembagian Tugas Antara <i>Account Officer (AO)</i> Produktif dan Konsumer - Kajian atas Penyusunan Kebijakan Intern Penerapan CKPN Individu - Target Pertumbuhan Kredit pada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua - Lain-lain
10	Rapat Komite Pemantau Risiko	30 September 2025	10/RKPR/DK-BPD/IX/2025	- Kasus <i>Fraud</i> Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Lanny Jaya - Lain-lain
11	Rapat Komite Pemantau Risiko	30 Oktober 2025	12/RKPR/DK-BPD/X/2025	- Laporan Progres Tindak Lanjut Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) dan Tata Kelola <i>Security System</i> Teknologi Informasi (TI) Bank Papua - Laporan Progres Tindak Lanjut Anomali Transaksi QRIS / <i>M-Banking</i> - Laporan Perkembangan Penerapan Risiko Siber, Teknologi Informasi (TI), Risiko Iklim dan Risiko <i>Outsourcing</i>

Selain Rapat-rapat tersebut di atas, secara periodik setiap semester, Komite Pemantau Risiko termasuk seluruh Anggota Dewan Komisaris secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi “Komite Manajemen Risiko” yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank dan diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan para Pemimpin Divisi, Komite Pemantau Risiko, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 10.02  
Rapat Manajemen Risiko  
Tahun 2025**

No	Jenis Rapat	Tanggal	Agenda / Materi Rapat
1	Rapat Manajemen Risiko Bank	25 Juli 2025	- Komite Manajemen Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2025.
2	Rapat Manajemen Risiko Bank	26 Januari 2026	- Komite Manajemen Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2025.

**c. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi**

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi melangsungkan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yang mencakup pengesahan risalah rapat sebelumnya, pembahasan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian.

**Tabel 10.03  
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi  
Tahun 2025**

No	Jenis Rapat	Tanggal	Nomor Rapat	Agenda / Materi Rapat
1	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	22 Januari 2025	01/RKNR/DK-BPD/2025	- Pembahasan Calon Direksi & Dewan Komisaris - Pembahasan Mekanisme dan Progres Persyaratan Rekrutmen Anggota Komite
2	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	17 Februari 2025	02/ RKNR/DK-BPD/2025	- Progres Rekrutmen Calon Anggota Komite - Lain-lain
3	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	27 Februari 2025	03/ RKNR/DK-BPD/2025	- Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi atas Penjaringan <i>Assessment</i> Anggota Komite Dewan Komisaris
4	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	28 Februari 2025	04/ RKNR/DK-BPD/2025	- Progres Rekrutmen Calon Anggota Komite Dewan Komisaris - Lain-lain
5	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	21 Maret 2025	05/ RKNR/DK-BPD/2025	- Tambahan Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang Jatuh Tempo di Bawah 1 (satu) Tahun
6	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	19 Mei 2025	06/ RKNR/DK-BPD/2025	- Penelitian <i>Assessment</i> Dokumen Pencalonan Komisaris Non Independen, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional
7	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	01 Juli 2025	8/RKNR/DK-BPD/2025	- Pembahasan Pemberian Tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai
8	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	18 September 2025	9/KRN/DK-BPD/2025	- Penjelasan Tentang Penerapan Manajemen Karir PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi No. 57/DIR-

				<p>BPD/IX/2018 Tanggal 12 September 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres Pelaksanaan Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> sesuai Surat Keputusan Direksi No. 67/DIR-BPD/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024</li> <li>- Perkembangan Rekrutmen Pegawai Baru Tahun 2025 sesuai RBB Tahun 2025</li> <li>- Pemenuhan Staf/Tenaga Auditor sesuai Pembagian <i>Cluster</i> dan Pemenuhan SDM (sesuai Temuan OJK)</li> <li>- Progres dan Rencana Revisi Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
9	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	24 November 2025	10/RKNR/DK-BPD/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Akhir Masa Jabatan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang Bukan Dewan Komisaris</li> </ul>

#### 4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT Bank Pembangunan Daerah Papua memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian ketentuan tentang pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan) sebagai pedoman bagi karyawan dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan berikut jenis transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. Selama pelaporan semester I dan II tahun 2025 tidak terdapat indikasi tindakan benturan kepentingan yang dapat mengurangi atau merugikan keuntungan Bank.

#### 5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Tujuan dari penerapan Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu organ tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam upaya preventif (*ex-ante*) untuk meminimalkan potensi risiko pada kegiatan usaha Bank.



## A. DIREKTUR KEPATUHAN

PT Bank Pembangunan Daerah Papua memiliki Direktur Kepatuhan yang saat ini dijabat oleh Sdri. **Betty J. Parinussa**, yang diangkat berdasarkan :

- a) Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ;
- b) Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), yang berlaku efektif sejak tanggal 07 – 12 – 2025 (tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 06 – 12 – 2029 (enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sembilan), serta telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021 tanggal 02 Juli 2021.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah diatur mengenai Tugas & Tanggung jawab Direktur Kepatuhan yaitu :

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang dari Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan diantaranya adalah pengendalian Gratifikasi.

## B. STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar Bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank.

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*) yang merupakan satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dengan demikian fungsi kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya (*culture*) yang terinternalisasi dan terorganisasi. Sesuai

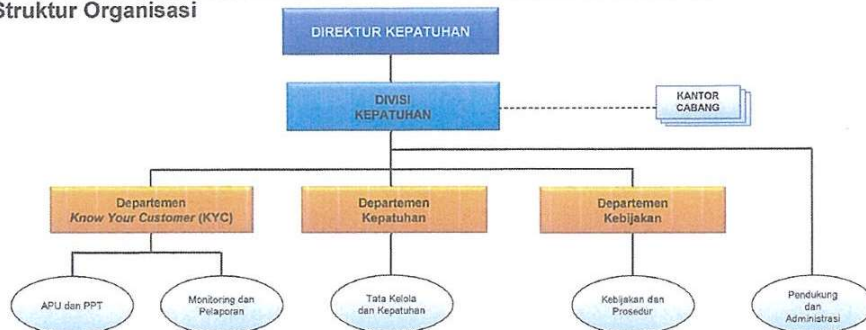
dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 82/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Divisi Kepatuhan berada dalam kelembagaan yang independen terhadap satuan kerja lainnya, serta berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan.



Divisi Kepatuhan (KPH)

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
 NOMOR : 67/DIR-BPD/X/2024  
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

Struktur Organisasi



KETERANGAN :  
 ———— (GARIS KOMANDO)  
 - - - - - (GARIS KOORDINASI)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA  
 DIREKSI

YULIANA D. YEMBISE  
 Direktur Utama

BETTY J. PARINUSSA  
 Direktur Kepatuhan

SADAR SEBAYANG  
 Direktur Bisnis

ISAK S. WOPARI  
 Direktur Operasional

SUKIDI  
 Direktur Keuangan

Divisi Kepatuhan memiliki pejabat definitif yang dipimpin oleh Sdr. **Sukidi** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 08/PKP-PKWT/IX/2025 tanggal 03 September 2025.

### C. BUDAYA KEPATUHAN

Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan terciptanya budaya kepatuhan, segenap insan Bank Papua telah melakukan, antara lain.

#### 1. Komitmen Kepatuhan

Komitmen Kepatuhan yang dilakukan oleh seluruh insan Bank yang merupakan pernyataan berisikan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen kesanggupan untuk melaksanakan seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sesuai etika dan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam *Code of Conduct*.

Selama periode tahun 2025, Adapun insan Bank telah melakukan penandatanganan komitmen kepatuhan, sebagai berikut :

Tabel 11.00  
Pernyataan Komitmen Kepatuhan Bank Papua  
Komisaris, Direksi & Divisi  
Tahun 2025

NO	DIVISI	PROSENTASE
1	KOMISARIS	100
2	DIREKSI	100
3	DIVISI KEPATUHAN	100
4	DIVISI AUDIT INTERNAL	100
5	DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK	100
6	DIVISI RISIKO BISNIS	100
7	DIVISI HUKUM	100
8	DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA	100
9	DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	100
10	DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS	100
11	DIVISI BISNIS KOMERSIAL & KORPORASI	100
12	DIVISI TREASURY	100
13	DIVISI PENGELOLAAN DANA & JASA	100
14	DIVISI UMK & KONSUMER	100
15	DIVISI AKUNTANSI	100
16	DIVISI PENGELOLAAN JARINGAN & LAYANAN	100
17	DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI	100
18	DIVISI UMUM	100
19	DIVISI PENGELOLAAN ASET KHUSUS	100

**Tabel 11.01**  
**Pernyataan Komitmen Kepatuhan Bank Papua**  
**Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu**  
**Tahun 2025**

NO	KANTOR CABANG & KCP	PROSENTASE
1	KCU JAYAPURA	100%
	KCP HAMADI	100%
	KCP DOK IX	100%
	KCP RUKO PASIFIK PERMAI	100%
	KCP ENTROP	100%
2	KC SORONG	100%
	KCP KLASAMAN	100%
	KCP PSR REMU	100%
	KCP BOSWEZEN	100%
	KCP JALAN BARU	100%
	KCP BASUKI RAHMAT	100%
3	KCU MANOKWARI	100%
	KCP PRAFI	100%
	KCP KANTOR GUBERNUR PAPUA BARAT	100%
	KCP ANGGI	100%
4	KC MERAUKE	100%
	KCP KURIK	100%
	KCP PSR AMPERA	100%
	KCP TANAH MIRING	100%
	KCP SIMPATI MUTING	100%
5	KC BIAK	100%
	KCP NUMFOR TIMUR	100%
	KCP KAMPUNG BARU	100%
	KCP BOSNIK	100%
	KCP DARFUAR	100%
6	KC OKSIBIL	100%
7	KC FAKFAK	100%
	KCP DANAWERIA	100%
8	KC WAMENA	100%
	KCP KOBAKMA	100%
	KCP KENYAM	98%
	KCP JIBAMA	99%
9	KC SERUI	100%
	KCP MENAWI	99%
10	KC NABIRE	100%
	KCP KALISEMEN	100%
	KCP SUGAPA	100%
	KCP SAMABUSA	100%
	KCP KARANG TUMARITIS	100%
	KCP RSUD NABIRE	98%
11	KC TIMIKA	100%
	KCP TEMBAGAPURA	100%
	KCP SP IV TIMIKA	100%
	KCP SP II TIMIKA	100%
	KCP PSR SENTRAL TIMIKA	98%
12	KC SENTANI	100%
	KCP DOYO BARU	100%
	KCP NIMBOKRANG	100%
	KCP HAWAI	100%
13	KC KAIMANA	100%
	KCP PASAR BARU KROOY	99%
14	KC TEMINABUAN	100%

	KCP KANTOR BUPATI SESNA	100%
15	KC BINTUNI	100%
	KCP BABO	100%
	KCP TOFOI	100%
16	KC JAKARTA	100%
17	KC SARMI	100%
	KCP BONGGO	100%
18	KC ARSO	100%
	KCP SKAMTO	100%
19	KC WAISAI	100%
20	KC MULIA	100%
21	KC ENAROTALI	100%
22	KC AGATS	100%
	KCP ATSY	100%
23	KC AIMAS	100%
	KCP SP III AIMAS	100%
24	KC KEPPI	100%
	KCP BADE	100%
	KCP ASSUE	100%
25	KC KARUBAGA	100%
26	KC WAREN	100%
	KCP URFAS	100%
27	KC MAKASSAR	100%
	KCP TANAH TORAJA	100%
28	KC SURABAYA	100%
29	KC TANAH MERAH	100%
30	KC KASONAWEJA	100%
31	KC YOGYAKARTA	100%
32	KC ABEPURA	100%
	KCP ABEPURA	100%
	KCP WAENA	100%
	KCP CIGOMBONG	100%
	KCP PASAR YOUTEFA	100%
	KCP MUARA TAMI	100%
KCP TANAH HITAM	100%	
33	KC WAGHETE	99%
34	KC ILAGA	100%
35	KC DEKAI	100%
36	KC WASIOR	98%
	KCP WINDESI	100%
37	KC RANSIKI	100%
38	KC MOANEMANI	100%
39	KC TIOM	100%
40	KC SUPIORI	100%
	KCP KORIDO	98%
41	KC TAMBRAUW	100%
	KCP SAUSAPUR	100%
42	KC MAYBRAT	100%
	KCP AYAMARU	98%
43	KC ELELIM	100%

## 2. Indeks Kepatuhan

Merupakan penilaian yang dilakukan kepada seluruh insan Bank untuk mengukur pemahaman terhadap penerapan kepatuhan di dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, yang meliputi budaya kepatuhan, tata kelola, termasuk program pengendalian gratifikasi sehingga ketika karyawan didalam melaksanakan seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab, apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, etika dan budaya kerja maka menjadi pengurang dari *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai sehingga turut mempengaruhi penilaian kantor cabang. Adapun pencapaian indeks kepatuhan selama periode tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 11.02  
Pencapaian Indeks Kepatuhan Bank Papua  
Divisi Tahun 2025

NO.	DIVISI	INDEKS CAPAIAN	PREDIKAT
1	DIVISI BISNIS KOMERSIAL & KORPORASI	100%	BAIK
2	DIVISI MANAJEMEN RISIKO BANK	100%	BAIK
3	DIVISI AKUNTANSI	100%	BAIK
4	DIVISI PENGELOLAAN ASET KHUSUS	100%	BAIK
5	DIVISI RISIKO BISNIS	100%	BAIK
6	DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI	100%	BAIK
7	DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS	100%	BAIK
8	DIVISI AUDIT INTERNAL	100%	BAIK
9	DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA	100%	BAIK
10	DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN	100%	BAIK
11	DIVISI BISNIS UMK & KONSUMER	100%	BAIK
12	DIVISI PENGELOLAAN JARINGAN & LAYANAN	100%	BAIK
13	DIVISI TREASURY	100%	BAIK
14	DIVISI HUKUM	97.78%	CUKUP
15	DIVISI UMUM	95.83%	CUKUP
16	DIVISI KEPATUHAN	95.40%	CUKUP
17	DIVISI PENGELOLAAN JARINGAN & LAYANAN	99.64%	CUKUP

Tabel 11.03  
Pencapaian Indeks Kepatuhan Bank Papua  
Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu  
Tahun 2025

NO.	KANTOR CABANG & KCP	INDEKS CAPAIAN	PREDIKAT
1	KANTOR CABANG UTAMA MANOKWARI	100%	BAIK
2	KANTOR CABANG UTAMA MERAUKE	100%	BAIK
3	KANTOR CABANG UTAMA NABIRE	100%	BAIK
4	KANTOR CABANG UTAMA SORONG	100%	BAIK
5	KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA	99.04%	CUKUP
6	KANTOR CABANG UTAMA WAMENA	99.91%	CUKUP

7	KANTOR CABANG AGATS	100%	BAIK
8	KANTOR CABANG AIMAS	100%	BAIK
9	KANTOR CABANG ARSO	100%	BAIK
10	KANTOR CABANG ENAROTALI	100%	BAIK
11	KANTOR CABANG JAKARTA	100%	BAIK
12	KANTOR CABANG KAIMANA	100%	BAIK
13	KANTOR CABANG KASONAWEJA	100%	BAIK
14	KANTOR CABANG MOANEMANI	100%	BAIK
15	KANTOR CABANG SARMI	100%	BAIK
16	KANTOR CABANG SUPIORI	100%	BAIK
17	KANTOR CABANG TAMBRAUW	100%	BAIK
18	KANTOR CABANG TIMIKA	100%	BAIK
19	KANTOR CABANG YOGYAKARTA	100%	BAIK
20	KANTOR CABANG ABEPURA	98.75%	CUKUP
21	KANTOR CABANG WAGHETE	98.06%	CUKUP
22	KANTOR CABANG BIAK	96.43%	CUKUP
23	KANTOR CABANG BINTUNI	98.53%	CUKUP
24	KANTOR CABANG DEKAI	99.89%	CUKUP
25	KANTOR CABANG ELELIM	96.59%	CUKUP
26	KANTOR CABANG FAK-FAK	99.00%	CUKUP
27	KANTOR CABANG ILAGA	98.24%	CUKUP
28	KANTOR CABANG KARUBAGA	99.11%	CUKUP
29	KANTOR CABANG KEPPI	98.28%	CUKUP
30	KANTOR CABANG MAKASSAR	97.71%	CUKUP
31	KANTOR CABANG MAYBRAT	97.99%	CUKUP
32	KANTOR CABANG MULIA	97.94%	CUKUP
33	KANTOR CABANG OKSIBIL	98.74%	CUKUP
34	KANTOR CABANG RANSIKI	99.35%	CUKUP
35	KANTOR CABANG SENTANI	98.08%	CUKUP
36	KANTOR CABANG SERUI	98.50%	CUKUP
37	KANTOR CABANG SURABAYA	99.77%	CUKUP
38	KANTOR CABANG TANAH MERAH	99.46%	CUKUP
39	KANTOR CABANG TEMINABUAN	90.20%	CUKUP
40	KANTOR CABANG TIOM	99.50%	CUKUP
41	KANTOR CABANG WAISAI	99.34%	CUKUP
42	KANTOR CABANG WAREN	99.57%	CUKUP
43	KANTOR CABANG WASIOR	97.56%	CUKUP
44	KANTOR CABANG PEMBANTU ASSUE	100%	BAIK
45	KANTOR CABANG PEMBANTU BADE	100%	BAIK
46	KANTOR CABANG PEMBANTU BASUKI RAHMAT	100%	BAIK
47	KANTOR CABANG PEMBANTU BONGGO	100%	BAIK
48	KANTOR CABANG PEMBANTU BOSNIK	100%	BAIK
48	KANTOR CABANG PEMBANTU BOSWESEN	100%	BAIK
49	KANTOR CABANG PEMBANTU DANAWERIA	100%	BAIK
50	KANTOR CABANG PEMBANTU DOK IX JAYAPURA	100%	BAIK
51	KANTOR CABANG PEMBANTU DOYO BARU	100%	BAIK
52	KANTOR CABANG PEMBANTU ENTROP	100%	BAIK
53	KANTOR CABANG PEMBANTU HAMADI	100%	BAIK
54	KANTOR CABANG PEMBANTU JALAN BARU	100%	BAIK
55	KANTOR CABANG PEMBANTU KAMPUNG BARU SAMAUFA	100%	BAIK
56	KANTOR CABANG PEMBANTU KANTOR GUBERNUR PAPUA BARAT	100%	BAIK
57	KANTOR CABANG PEMBANTU KARANG TUMARITIS	100%	BAIK
58	KANTOR CABANG PEMBANTU KENYAM	100%	BAIK
59	KANTOR CABANG PEMBANTU KORIDO	100%	BAIK
60	KANTOR CABANG PEMBANTU KURIK	100%	BAIK
61	KANTOR CABANG PEMBANTU MENAWI	100%	BAIK
62	KANTOR CABANG PEMBANTU NIMBOKRANG	100%	BAIK
63	KANTOR CABANG PEMBANTU NUMFOR TIMUR	100%	BAIK

64	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR AMPERA	100%	BAIK
65	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU KROOY	100%	BAIK
66	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR JIBAMA	100%	BAIK
67	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR MUARA TAMI	100%	BAIK
68	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR REMU	100%	BAIK
69	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR SENTRAL TIMIKA	100%	BAIK
70	KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR YOUTEFA	100%	BAIK
71	KANTOR CABANG PEMBANTU RSUD NABIRE	100%	BAIK
72	KANTOR CABANG PEMBANTU RUKO PASIFIK PERMAI	100%	BAIK
73	KANTOR CABANG PEMBANTU SAMABUSA	100%	BAIK
74	KANTOR CABANG PEMBANTU SIMPATI MUTING	100%	BAIK
75	KANTOR CABANG PEMBANTU SKAMTO	100%	BAIK
76	KANTOR CABANG PEMBANTU SP II AIMAS	100%	BAIK
77	KANTOR CABANG PEMBANTU SP II KALISEMEN	100%	BAIK
78	KANTOR CABANG PEMBANTU SP II TIMIKA	100%	BAIK
79	KANTOR CABANG PEMBANTU SP IV TIMIKA	100%	BAIK
80	KANTOR CABANG PEMBANTU SUGAPA	100%	BAIK
81	KANTOR CABANG PEMBANTU TANAH HITAM	100%	BAIK
82	KANTOR CABANG PEMBANTU TANAH MIRING	100%	BAIK
83	KANTOR CABANG PEMBANTU TEMBAGAPURA	100%	BAIK
84	KANTOR CABANG PEMBANTU TORAJA	100%	BAIK
85	KANTOR CABANG PEMBANTU URFAS	100%	BAIK
86	KANTOR CABANG PEMBANTU WAENA	100%	BAIK
87	KANTOR CABANG PEMBANTU WINDESI	100%	BAIK
88	KANTOR CABANG PEMBANTU ABEPURA	98.46%	CUKUP
89	KANTOR CABANG PEMBANTU ANGGI	99.66%	CUKUP
90	KANTOR CABANG PEMBANTU ATSY	99.44%	CUKUP
91	KANTOR CABANG PEMBANTU AYAMARU	96.13%	CUKUP
92	KANTOR CABANG PEMBANTU BABO	99.70%	CUKUP
93	KANTOR CABANG PEMBANTU BUPATI SESNA	99.00%	CUKUP
94	KANTOR CABANG PEMBANTU CIGOMBONG	98.00%	CUKUP
95	KANTOR CABANG PEMBANTU DARFUAR	94.79%	CUKUP
96	KANTOR CABANG PEMBANTU KOBAKMA	99.80%	CUKUP
97	KANTOR CABANG PEMBANTU PRAFI	99.79%	CUKUP
98	KANTOR CABANG PEMBANTU SAUSAPOR	99.44%	CUKUP
99	KANTOR CABANG PEMBANTU SENTANI KOTA	92.78%	CUKUP
100	KANTOR CABANG PEMBANTU TOFOI	99.40%	CUKUP

#### D. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEPATUHAN

Kebijakan pengelolaan kepatuhan dilakukan secara *continue* guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan, meliputi :

- Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkinian secara berkala.
- Melakukan uji Kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
- Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan peraturan eksternal.
- Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

- Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan terkait pelaporan kebijakan dan prosedur.
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah.
- Meningkatkan kesadaran akan kewajiban Kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diimplementasikan ke dalam Kebijakan internal Bank Papua berupa Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Mendorong dan membudayakan penyelenggaraan Bank yang berintegritas dengan **slogan Anti Gratifikasi** oleh seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Bank Papua. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 69/DIR-BPD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua serta adanya Unit Khusus yang melakukan pengelolaan terhadap pelaporan berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor : 83/DIR-BPD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Monitoring laporan pelaksanaan pemantauan gratifikasi oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Papua periode tahun 2025, sebagai berikut :



**Tabel 11.04**  
**Monitoring Gratifikasi Bank Papua**  
**Divisi, Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu**  
**Tahun 2025**

Unit Kerja	SEM I 2025	SEM II 2025	Telah Melapor	Persentase	Keterangan
Divisi	17	17	17	100%	Patuh
Kantor Cabang	43	43	43	100%	Patuh
KCP	59	59	59	100%	Patuh

- Selama periode tahun 2025, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Papua telah melakukan tindak lanjut atas 1 (satu) laporan gratifikasi dan hasil tindak lanjut atas laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

➤ Pemantauan dan pelaporan Tata Kelola Bank (*Self Assesment*) secara periodik.

Disamping kebijakan tersebut Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsinya, sebagai berikut :

- Menjadi penyedia informasi terkini mengenai Regulasi Bank Indonesia atau OJK dan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Mengupayakan setiap rencana kegiatan Bank yang bersifat strategis agar sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, OJK dan ketentuan peraturan perundangan.
- Memenuhi komitmen yang telah dibuat kepada Bank Indonesia, OJK dan atau regulator lainnya.
- Menjadi penghubung antara pihak internal Bank dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi terkait lainnya.
- Memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- Memastikan setiap kegiatan Bank selaras dengan prinsip Tata Kelola Bank yang baik.



## E. PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi sekaligus dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan. Upaya yang terus menerus dalam melakukan identifikasi dan analisa sejak dini terhadap faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan dan prinsip kehati-hatian.

Dalam pengelolaan risiko kepatuhan sepanjang tahun 2025, Bank Papua menekankan pada aktivitas, sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas berlakunya ketentuan, peraturan perundangan, baik yang baru maupun perubahan-perubahannya serta memastikan penerapannya.
- Menganalisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang akan diterbitkan untuk memastikan keterpenuhan unsur kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengidentifikasi dan menganalisa kepatuhan atas rencana dan pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.
- Mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap seluruh pegawai dan manajemen Bank.
- Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*), antara lain; terkait Kecukupan Modal (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL)

Berikut potensi-potensi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, yaitu antara lain :



- Kesalahan Teknologi / Sistem Terdapat ketidaksesuaian sistem aplikasi internal yang belum dapat diimplementasikan pada sistem pelaporan Regulator. Masih terdapat *error* validasi yang disebabkan ketidaksesuaian / ketidakakuratan data.
- Kesalahan Data dan/atau pengisian pelaporan Terdapat kesalahan proses pelaporan yakni kesalahan pegawai pada saat melakukan input ke sistem pelaporan kepada Regulator.
- Keterlambatan Pelaporan Penyebab atas terjadinya keterlambatan pelaporan adalah kurangnya internal kontrol dan monitoring dalam penyampaian laporan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.
- Hasil Pemeriksaan Regulator Penyebab atas terjadinya pengenaan denda oleh Regulator adalah hasil pemeriksaan oleh Regulator terhadap Bank Pelapor, atas laporan-laporan yang telah dikirimkan Bank kepada Regulator.

Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi-potensi risiko kepatuhan dimaksud di atas, Divisi Kepatuhan melakukan beberapa upaya mitigasi risiko kepatuhan, antara lain:

- Melakukan Intenalisasi kepada Unit Kerja Bisnis (*first line of defense*) untuk wajib mengetahui peraturan regulasi yang berlaku terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/ atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik yang akan dikeluarkan antara lain namun tidak terbatas pada Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru.
- Mengingat kembali kewajiban pelaporan ke seluruh Divisi terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik.



## F. LAPORAN PELAKSANAAN APU PPT

### 1. Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maka Bank telah melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam bentuk Laporan LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).

Penyampaian Laporan LTKT oleh setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu ke Departemen KYC Divisi Kepatuhan. Pelaporan dilakukan secara *online* melalui aplikasi APU-PPT dan selanjutnya dilaporkan ke PPATK oleh Departemen KYC Divisi Kepatuhan melalui aplikasi GRIPS PPATK.

Untuk penyampaian Laporan LTKM dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, berdasarkan :

- Hasil analisa LTKM yang disampaikan oleh Kantor Cabang/KCP atas transaksi yang dinilai memenuhi unsur kecurigaan.
- Laporan LTKM berdasarkan permintaan yang disampaikan PPATK ke Bank Papua.

Pelaporan LTKM ke PPATK oleh Departemen KYC dilakukan melalui aplikasi GRIPS dan dilengkapi dengan pengiriman dokumen pendukung LTKM yang berupa bukti rekening koran, *copy* warkat transaksi, informasi profil nasabah dan penyetor dan hal-hal lain yang terkait dengan proses analisa transaksi yang memenuhi unsur mencurigakan.

Adapun data penyampaian LTKT & LTKM selama periode tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 12.00  
Pelaporan LTKT dan LTKM  
Tahun 2025

	SEMESTER I 2025	SEMESTER II 2025		+/-	%
LTKT	3,130	6,553	↑	3,423	52
LTKM	51	13	↓	(38)	292

- Pelaporan LTKT periode Semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 6.553 transaksi, mengalami peningkatan sebesar 3.423 transaksi atau mencapai 52%, jika dibandingkan dengan pelaporan LTKT periode Semester I tahun 2025 yang hanya sebanyak 3.130 transaksi. Kenaikan jumlah LTKT ini disebabkan oleh peningkatan volume transaksi tunai nasabah, frekuensi setoran dan penarikan yang lebih tinggi, serta aktivitas operasional yang lebih dinamis.
- Pelaporan LTKM periode Semester II tahun 2025 sebanyak 13 transaksi, mengalami penurunan sebanyak 38 transaksi atau mencapai 292%, jika dibandingkan dengan pelaporan LTKM periode Semester I tahun 2025 sebanyak 51 transaksi

## 2. Pemenuhan Permintaan Data/Informasi

Selain melaksanakan kewajiban pelaporan LTKT dan LTKM ke PPATK, dalam rangka pelaksanaan program APU-PPT, maka Bank Papua melalui Divisi Kepatuhan senantiasa menindaklanjuti permintaan data dan informasi yang disampaikan oleh PPATK dalam rangka analisis transaksi serta ke KPK-RI dalam rangka penyidikan termasuk menindaklanjuti adanya permintaan blokir rekening oleh KPK-RI.

## 3. Sosialisasi APU-PPT & PPPSPM

Sepanjang tahun 2025, Departemen KYC – Divisi Kepatuhan Bank Papua telah melakukan sosialisasi dan edukasi secara bertahap di beberapa Kantor Cabang Bank Papua tentang Program APU-PPT

& PPPSPM secara langsung dan/atau secara virtual lewat *zoom meeting* serta tetap melakukan sosialisasi menggunakan aplikasi komunikasi *WhatsApp* (WA) grup.

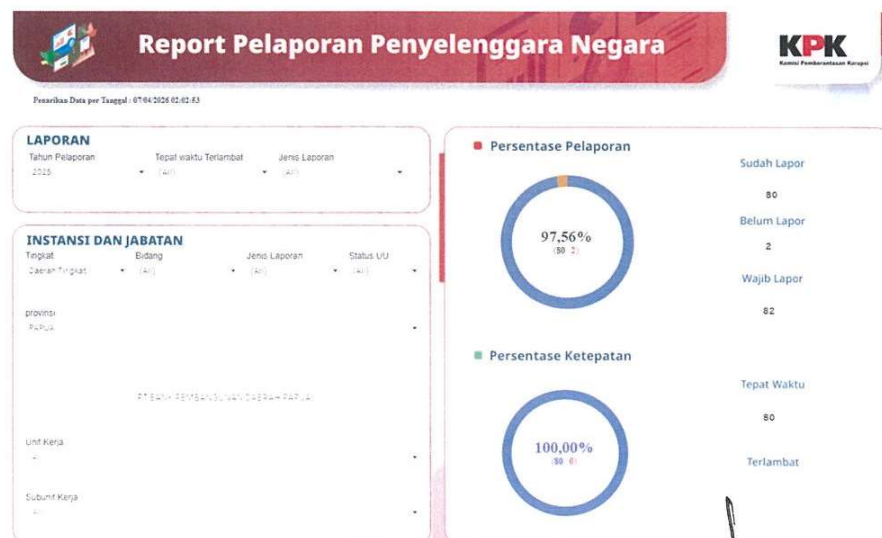
Tabel 12.01  
**Sosialisasi APU-PPT& PPPSPM  
 Tahun 2025**

No	Kantor Cabang	Realisasi Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	KC. Yogyakarta	05 s/d 07 Mei 2025	terlaksana
2	KC. Makassar	14 s/d 16 Mei 2025	terlaksana
3	KC. Jakarta	26 s/d 28 Mei 2025	terlaksana
4	KC. Surabaya	02 s/d 04 Juni 2025	terlaksana
5	KC. Waisai	10 s/d 13 Juni 2025	terlaksana
6	KC. Aimas	16 s/d 19 Juni 2025	terlaksana
7	KC. Sorong	19 s/d 21 Juni 2025	terlaksana
8	KC. Teminabuan	23 s/d 27 Juni 2025	terlaksana

**4. Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).**

Membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan tentang tata cara pelaporan LHKPN sesuai ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada seluruh Wajib Laport Bank Papua. Penyampaian LHKPN untuk periode tahun 2025 adalah sebanyak 80 (delapan puluh tujuh) Wajib Laport dengan status PATUH dari jumlah keseluruhan 82 (delapan puluh dua) Wajib Laport.

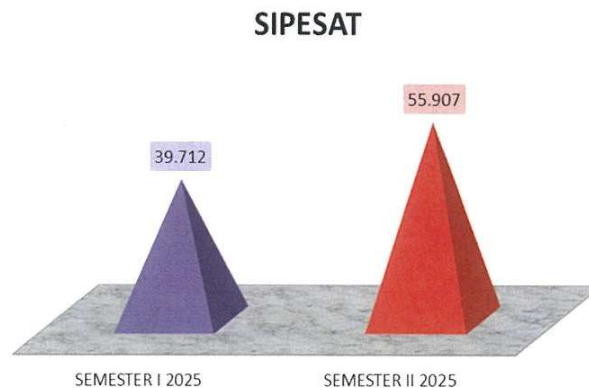
Tabel 12.02  
**Penyampaian LHKPN  
 Tahun 2025**



## 5. Pelaporan SIPESAT

Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK (PERKA) No. 02/1.02/PPATK/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), maka setiap Bank wajib menyampaikan laporan SIPESAT ke PPATK secara periodik triwulanan. Kinerja pelaporan data SIPESAT yang dilaporkan ke PPATK dengan status data sukses pada Semester II tahun 2025 sebanyak 55.907 CIF, mengalami kenaikan sebanyak 16.195 atau mencapai 29%, jika dibandingkan pelaporan SIPESAT pada Semester I 2025 sebanyak 39.712. Penyampaian laporan SIPESAT dilakukan secara online oleh Departemen KYC unit kerja APU PPT melalui *Website* GRIPS SIPESAT PPATK oleh petugas yang ditunjuk dan memiliki fasilitas login GRIPS SIPESAT PPATK.

Tabel 12.03  
Pelaporan SIPESAT  
Tahun 2025



Pemantauan tersebut untuk melihat Kepatuhan dalam pelaksanaannya atas dasar hukum POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan

Layanan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

### A. DIVISI AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal memegang peran sebagai *Third line of defense*, Divisi Audit Internal memastikan bahwa pengendalian internal di setiap *line of defense* berperan dalam kegiatan pemantauan dan mendorong tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan untuk berperan dalam memastikan kecukupan dan efektivitas pengelolaan *risk management* dan *internal control*. Oleh karena itu Divisi Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools audit* sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

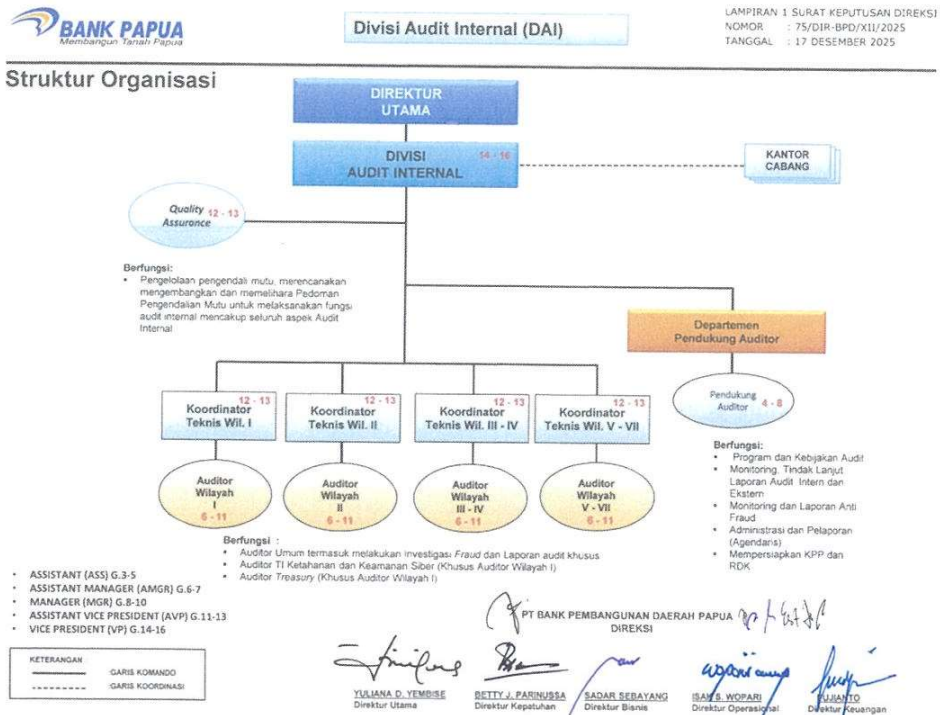
Bank Papua telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 58/DIR-BPD/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Penetapan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank pembangunan Daerah Papua. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan Divisi Audit Internal. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam *Internal Audit Charter* telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

### B. STRUKTUR ORGANISASI

Divisi Audit Internal dijabat oleh seorang Pemimpin Divisi yaitu Sdr. **Bang Yudi Poluan**, dimana keberadaannya dalam kelembagaan yang independen terhadap satuan kerja lainnya serta berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif.

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal telah diatur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2025

tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



Sampai dengan periode 31 Desember 2025, Jumlah pegawai pada Divisi Audit Internal (DAI) adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang pegawai dan untuk menangani :

- 17 (tujuh belas) Divisi
- 6 (enam) Kantor Cabang Utama
- 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Cabang
- 59 (lima puluh sembilan) Kantor Cabang Pembantu
- 121 (seratus puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Kelas IV (Kantor Kas)

Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak ditemukan penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan Divisi Audit Internal Bank.

Realisasi atas target telah berjalan sesuai Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan *Surprise* Audit Tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel 13.00**  
**Realisasi Program Kerja Audit Tahunan**  
**(PKAT)**  
**Tahun 2025**

No	Auditee	Realisasi Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Kantor Cabang Sarmi	03 s/d 15 Februari 2025	Terlaksana
2	Kantor Cabang Aimas	10 s/d 23 Februari 2025	Terlaksana
3	Kantor Cabang Biak	13 s/d 26 Februari 2025	Terlaksana
4	Kantor Cabang Tambrauw	12 s/d 25 Maret 2025	Terlaksana
5	Kantor Cabang Kaimana	13 s/d 26 Maret 2025	Terlaksana
6	Kantor Cabang Wasior	14 s/d 29 Maret 2025	Terlaksana
7	Kantor Cabang Jakarta	14 s/d 29 Maret 2025	Terlaksana
8	Kantor Cabang Arso	08 s/d 17 Mei 2025	Terlaksana
9	Kantor Cabang Kasonaweja	14 s/d 24 Mei 2025	Terlaksana
10	Kantor Cabang Agats	11 s/d 24 Mei 2025	Terlaksana
11	Divisi Sekretaris Perusahaan (SEKPER)	11 s/d 26 Juni 2025	Terlaksana
12	Divisi Pengelolaan Dana dan Jasa	11 s/d 30 Juni 2025	Terlaksana
13	Kantor Cabang Waren	22 Juli s/d 04 Agustus 2025	Terlaksana
14	Kantor Cabang Serui	14 s/d 26 Juli 2025	Terlaksana
15	Kantor Cabang Tiom	15 s/d 26 Juli 2025	Terlaksana
16	Kantor Cabang Karubaga	25 Agustus s/d 05 September 2025	Terlaksana
17	Kantor Cabang Wagate	24 Agustus s/d 04 September 2025	Terlaksana
18	Kantor Cabang Bintuni	17 s/d 30 September 2025	Terlaksana
19	Kantor Cabang Yogyakarta	19 s/d 26 September 2025	Terlaksana
20	Kantor Cabang Utama Nabire	21 September s/d 04 Oktober 2025	Terlaksana
21	Divisi <i>Treasury &amp; International Banking</i>	29 September s/d 14 Oktober 2025	Terlaksana
22	Divisi Umum	29 Oktober s/d 13 November 2025	Terlaksana
23	Divisi Akuntansi	29 Oktober s/d 13 November 2025	Terlaksana
24	Divisi Manajemen Modal Manusia	03 s/d 20 November 2025	Terlaksana
25	Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi	10 s/d 28 November 2025	Terlaksana
26	Divisi Risiko Bisnis	10 s/d 28 November 2025	Terlaksana
27	Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Bisnis	03 s/d 20 November 2025	Terlaksana
28	Divisi Teknologi Informasi	01 s/d 16 Desember 2025	Terlaksana
29	Divisi Teknologi Informasi	17 s/d 22 Desember 2025	Terlaksana

**Tabel 13.01**  
***Surprise* Audit**  
**Tahun 2025**

No	Auditee	Realisasi Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Kantor Cabang Teminabuan & Kantor Cabang Maybrat	16 s/d 21 Juni 2025	Terlaksana
2	Kantor Cabang Ransiki	21 Juli s/d 22 Agustus 2025	Terlaksana
3	Kantor Cabang Pembantu (KCP) Nimbokrang	26 Agustus 2025	Terlaksana
4	Kantor Cabang Pembantu (KCP) Anggi dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Oransbari	27 s/d 28 Agustus 2025	Terlaksana
5	Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simpati Muting	29 s/d 30 Agustus 2025	Terlaksana
6	Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cigombong	31 Desember 2025	Terlaksana

### C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tujuan dari Divisi Audit Internal adalah untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pengembangan strategi audit internal dan penetapan standar, kebijakan serta panduan audit yang efektif berdasarkan metodologi yang digunakan dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pemantauan tindak lanjut perbaikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Divisi Audit Internal terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan menyediakan *early warning system* bagi manajemen, serta mendeteksi indikasi terjadinya *fraud*.

Terhadap aspek dan unsur yang melekat pada organisasi Perseroan dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan struktur pengendalian internal, efektivitas struktur pengendalian internal, dan penilaian kualitas kerja serta mengevaluasi risiko, mengidentifikasi penyimpangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang memberi nilai tambah dalam menyelesaikan atau mengantisipasi masalah yang terkait dengan operasional perbankan yang meliputi pelaksanaan audit umum, audit TI dan anti *fraud* serta supervisi fungsi kontrol internal di setiap unit kerja.

Pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, merupakan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit melalui Satuan Internal Audit (Divisi Audit Internal) dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit ;



2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui audit ;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana ;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
5. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal Bank untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas, serta tersedia sumber daya yang memadai ;
6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan *Pending* Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara periodik; dan
7. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau *fraud* apabila diperlukan.

Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana secara berkala telah melaksanakan fungsi pemantauan serta melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit kepada Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

Selama Tahun 2025, Divisi Audit internal telah melakukan audit dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 14.00**  
**Progres Tindak Lanjut**  
**Temuan Internal Periode**  
**Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025**

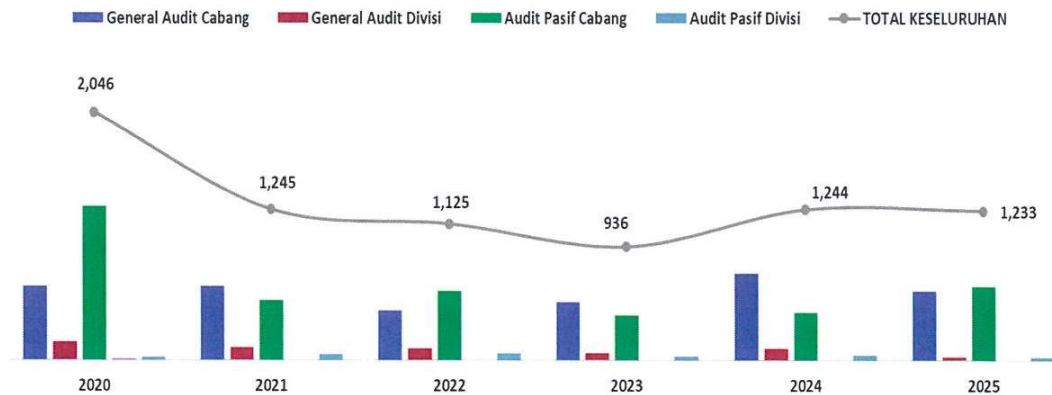
	GENERAL AUDIT	PROGRES TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN INTERNAL PERIODE DESEMBER 2025																	
		TAHUN																	
		2020			2021			2022			2023			2024			2025		
		STL	DTL	TDTL	STL	DTL	TDTL	STL	DTL	TDTL	STL	DTL	TDTL	STL	DTL	TDTL	STL	DTL	TDTL
1	General Audit Cabang	607	1	2	599	2	7	392	14	1	461	17	-	686	31	-	436	133	-
2	General Audit Divisi	140	5	1	97	5	-	95	2	-	54	1	1	88	7	-	18	10	-
3	Audit Pasif Cabang	1.264	2	-	485	5	-	558	7	2	362	9	1	366	26	-	560	51	-
4	Audit Pasif Divisi	24	-	-	45	-	-	54	-	-	30	-	-	40	-	-	20	5	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.035</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1.226</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1.099</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>907</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>1.180</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>1.034</b>	<b>199</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>2.046</b>			<b>1.245</b>			<b>1.125</b>			<b>936</b>			<b>1.244</b>			<b>1.233</b>		

Keterangan :

- STL = Sudah Tindak Lanjut
- DTL = Dalam Tindak Lanjut
- TDTL = Tidak Dapat Tindak Lanjut

- Total jumlah temuan pemeriksaan internal menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan jumlah terendah pada tahun 2023 sebanyak 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) temuan dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebanyak 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) temuan dan tahun 2025 sebanyak 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) temuan.
- Pada tahun 2025 tidak ada temuan yang masuk kategori Tidak Dapat di Tindak Lanjut (TDTL), sementara sebagian besar temuan Sudah di Tindak Lanjuti (STL) sebanyak 1.034 (seribu tiga puluh empat) temuan dan sisanya masih dalam tindak lanjut (DTL) sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) temuan

### General Audit Internal Periode Tahun 2020 - 2025



- Pada grafik tersebut terlihat bahwa General Audit Internal dilakukan secara teratur setiap tahun, dengan fokus pada unit Cabang dan Divisi baik untuk aspek umum maupun pasif. Jumlah temuan yang teridentifikasi menunjukkan adanya perbaikan kontinu dalam pengelolaan risiko dan proses operasional, meskipun terdapat fluktuasi pemantauan internal.
- Total keseluruhan temuan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 2.046 (dua ribu empat puluh enam) temuan, kemudian menurun secara berturut-turut hingga tahun 2023 sebanyak 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) temuan.
- Penurunan signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2023 kemungkinan terkait dengan perbaikan proses pengendalian internal, sementara kenaikan pada tahun 2024 dan tahun 2025 bisa jadi akibat perluasan cakupan audit atau peningkatan ketelitian pemeriksaan

**Tabel 14.01**  
**Progres Tindak Lanjut**  
**Anti *Fraud* s/d Periode Semester II Tahun 2025**

Progres Tindak Lanjut	Jumlah	Keterangan
Telah Diproses	2	Telah Proses sebanyak 2 (dua) kasus pelanggaran
Dalam Proses	6	Dalam Proses sebanyak 6 (enam) kasus pelanggaran
Belum Proses	4	Belum Proses sebanyak 4 (empat) kasus pelanggaran

## 7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 tanggal 04 September 2025 tentang Penunjukan KAP/AP Tahun Buku 2025 dan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 167/DK-BPD/2025 tanggal 08 September 2025 Perihal Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025, Dewan Komisaris telah menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Hertanto, M.S.Ak., CPA., CPMA., CA., CTA. Grace, Karuawan sebagai auditor Eksternal Independen Bank untuk tahun buku 2025. Rekomendasi Komite Audit yang disetujui Dewan Komisaris dan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat bahwa Kantor Akuntan Publik harus yang telah terdaftar sebagai Auditor IKNB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

## 8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *Risk Appetite* yang diinginkan. Bank Papua memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dievaluasi secara rutin oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur berdasarkan :

- a) SK Direksi Nomor : 03/DIR-BPD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ;
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 72.1/DIR-BPD/XI/2024 tanggal 20 November 2024 tentang *Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit* Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua ;
- c) Surat Keputusan Direksi Nomor : 79.2/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi Nomor 21/ DIR-BPD/IV/2016 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) *Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit* PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Peraturan tersebut mencakup antara lain :

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi ;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit ;

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko ;
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh.

Pengendalian risiko Bank dipantau, diukur dan diidentifikasi secara efektif yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko, yaitu :

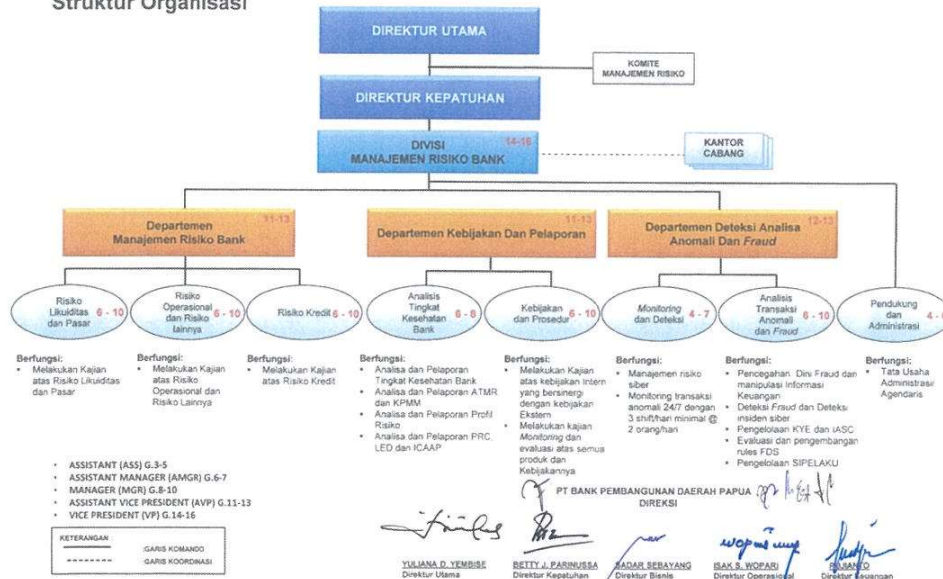
1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan.

#### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

Divisi Manajemen Risiko Bank saat ini dijabat oleh seorang Pemimpin Divisi yaitu Sdr. **Soleman Tarupadang**. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank telah diatur sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan *Job Profile* Divisi Manajemen Risiko Bank PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



**Struktur Organisasi**



Divisi Manajemen Risiko Bank berada pada Direktorat Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Divisi Manajemen Risiko Bank berfungsi mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan rencana dan strategi aspek manajemen risiko terhadap aspek dan unsur yang melekat pada organisasi Perseroan, menjadi anggota Unit Pendukung Strategis (*Strategic Supporting Unit*) dalam organisasi terkait Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit*.

**2. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum POJK Nomor : 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK Nomor : 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko Bank Papua memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengelola risiko yang melekat pada produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis Bank Papua.

2. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang.
3. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
4. Mengelola struktur permodalan yang memadai untuk mengcover risiko yang mungkin timbul.
5. Menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (*shareholders value*) Bank Papua.

Dalam upaya mendukung keakuratan penerapan manajemen risiko, Bank secara bertahap melakukan analisis risiko dimulai dari pendekatan yang lebih sederhana dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID), kemudian ditingkatkan kearah yang lebih kompleks dengan Pendekatan Internal Model dan selanjutnya kepada metode dengan kualifikasi yang terbaik (*best practice*) yang dikehendaki Bank maupun menurut Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Bank.

Untuk memenuhi tuntutan yang diamanatkan melalui POJK Nomor : 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK Nomor : 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Papua telah menyajikan laporan Profil Risiko sesuai kategori risiko yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan profil risiko Bank disampaikan setiap triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal yang ditetapkan. Gambaran profil risiko Bank disajikan dalam bentuk analisis terhadap risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional (*Inherent Risk*) Bank dan analisis terhadap risiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Risiko (*Risk Control System*) pada masing-masing risiko untuk setiap aktifitas fungsional yang ada.

Pada periode tahun 2025, hasil Tingkat Kesehatan PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana pada tabel dibawah ini :



**Tabel 15.00**  
**Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**  
**(Tahun 2023, 2024 dan 2025)**

NO	FAKTOR	PERINGKAT (RATING)		
		Des – 2023	Des - 2024	Des - 2025
1.	<i>Risk Profile</i>	2	2	2
2.	GCG	2	2	2
3.	<i>Capital</i>	2	1	1
4	<i>Earnings</i>	1	2	2
<b>NILAI KOMPOSIT</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Dasar penilaian mengacu ke POJK Nomor : 04/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor : 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berikut hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Papua :

**1. Risk Profile**

Secara keseluruhan hasil penilaian Profil Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua posisi Desember tahun 2025 (semester II) berada pada Peringkat Komposit 2 (dua) dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Memadai, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

**2 . Good Corporate Governance (GCG)**

Penilaian Tata Kelola Bank periode Desember tahun 2025 dinilai dengan Predikat Komposit 2 (dua), Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Bank yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank, karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan Bank.

### 3. Capital

Penilaian Permodalan Bank periode Desember tahun 2025 dinilai dengan Predikat Komposit 1 (satu) Sangat Memadai, hal ini mencerminkan Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relative terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Terdapat beberapa faktor Penilaian Permodalan Bank, antara lain :

#### A. Faktor Kecukupan Modal Bank :

- 1) Rasio Modal terhadap ATMR periode Desember 2025 adalah sebesar 23,31% mengalami penurunan sebesar 3,07% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 26,38%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Juni 2025) sebesar 22,93% mengalami peningkatan sebesar 0,38%.

Tabel 15.01  
Rasio Modal Terhadap ATMR  
Desember 2025

PARAMETER/INDIKATOR		PREDIKAT
Modal Dibagi ATMR		Sangat Memadai

RUMUS	NILAI	HASIL
Modal Inti (Tier 1)+Modal Pelengkap (Tier 2)	(4.455.488.500.000,00+201.047.540.000,00)	
ATMR (Risiko Kredit) + ATMR (Risiko Pasar) + ATMR (Risiko Operasional)	(15.882.755.000.000,00 + 3.860.898.000.000,00 + 230.369.000.000,00)	23,31 %

- 2) Rasio Modal Inti (*Tier-1*) terhadap ATMR periode Desember 2025 sebesar 22,31% mengalami penurunan sebesar 2,91% , jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 25,22%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Juni 2025) sebesar 21,90% mengalami peningkatan sebesar 1,01%.

Tabel 15.02

**Rasio Modal Inti (Tier-1) Terhadap ATMR  
Desember 2025**

PARAMETER/INDIKATOR		PREDIKAT
Modal inti (Tier-1) Dibagi ATMR		Sangat Memuaskan

RUMUS	NILAI	HASIL
Modal Inti (Tier 1)	4.455.488.500.000,00	22,31 %
ATMR (Risiko Kredit)+ATMR (Risiko Pasar)+ ATMR (Risiko Operasional)	(230.369.000.000,00+3.860.898.000.000,0 0+15.882.755.000.000,00)	

- 3) Rasio Penanganan Aset Produktif Bermasalah terhadap Modal Inti dan Cadangan Umum posisi periode Desember 2025 sebesar 4,85% mengalami peningkatan sebesar 2,20% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 2,65%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Juni 2025) sebesar 4,89% mengalami penurunan sebesar 0,04%.

Tabel 15.03

**Penanganan Aset Produktif Bermasalah Terhadap Modal Inti dan Cadangan Umum  
Desember 2025**

PARAMETER/INDIKATOR		PREDIKAT
Penanganan Aset Produktif Bermasalah		Sangat Memuaskan

RUMUS	NILAI	HASIL RASIO
Aset Produktif bermasalah (*)- CKPN Aset Produktif Bermasalah	(635.736.143.517,00-345.697.522.038,00)	4,85 %
Modal Inti (Tier 1)+Cadangan umum	(4.455.488.500.000,00+1.528.859.985.851,00)	

- 4) Rasio Penanganan Aset Kualitas Rendah dikurangi CKPN terhadap Modal Inti dan Cadangan Umum posisi periode Desember 2025 sebesar 55,95% mengalami peningkatan sebesar 9,42%, Jika dibandingkan dengan periode Desember 2024 sebesar 46,53%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Juni 2025) sebesar 47,41%, mengalami kenaikan sebesar 8,54%.

Tabel 15.04

Rasio Penanganan Aset Kualitas Rendah dikurangi CKPN terhadap Modal Inti dan Cadangan Umum.  
Desember 2025

PARAMETER/INDIKATOR		PREDIKAT
Rasio Penangan Aset Kualitas Rendah Dikurangi CKPN Aset Kualitas Rendah terhadap Modal Inti Ditambah Cadangan Umum		Sangat Memadai

RUMUS	NILAI	HASIL RASIO
Aset Kualitas Rendah-CKPN Aset Produktif Rendah	(3.753.196.362.072,00-404.744.757.835,00)	55,95 %
Modal Inti (Tier 1)+Cadangan umum	(4.455.488.500.000,00+1.528.859.985.851,00)	

5) Secara maksimal Dewan Komisaris melakukan monitoring KPMM secara berkala berdasarkan profil risiko, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur KPMM sesuai profil risiko & Bank telah mengajukan permohonan setoran modal kepada Pemegang Saham.

**B. Pengelolaan Permodalan Bank :**

Dalam pengelolaan permodalan, Bank Papua memiliki kebijakan dan prosedur, sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen permodalan.
2. KPMM sesuai profil risiko yang tertuang dalam SK Direksi Nomor : 21/DIR-BPD/IV/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)*.
3. Bank telah melakukan *stress test* dan *self assessment* permodalan dengan menggunakan aplikasi ICAAP.
4. Bank telah menggunakan pihak independen untuk melakukan penilaian permodalan.
5. Proses perencanaan permodalan telah dituangkan dalam RKAP dan RBB sesuai ketentuan Otoritas serta di *review* setiap triwulan dalam pelaksanaan realisasinya.
6. Bank memiliki kemampuan akses permodalan yang bersumber dari pemegang saham sedangkan dari sumber

internal belum dapat diandalkan dikarenakan rentabilitas Bank yang belum mendukung.

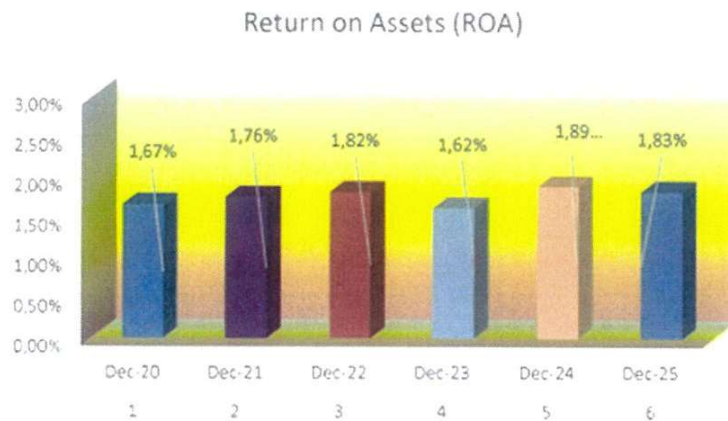
#### 4. Earning

Penilaian *Earning* Bank tahun 2025 dinilai dengan Predikat Komposit 2 (dua) Memadai, hal ini mencerminkan laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan. Hal ini didasarkan pada beberapa penilaian parameter indikator, sebagai berikut :

##### a. Kinerja Rentabilitas.

- 1) *Return On Asset (ROA)* posisi periode Desember 2025 sebesar 1.83% mengalami penurunan sebesar 0.06% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 1.89%.

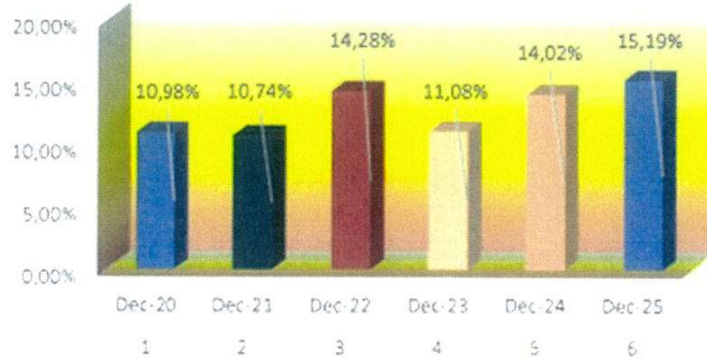
Tabel 15.05  
*Return On Asset (ROA)*  
Desember 2025



- 2) *Return On Equities (ROE)* posisi periode Desember 2025 sebesar 15.19% mengalami peningkatan sebesar 1.17% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 14.02%.

Tabel 15.06  
Return On Equities (ROE)  
Desember 2025

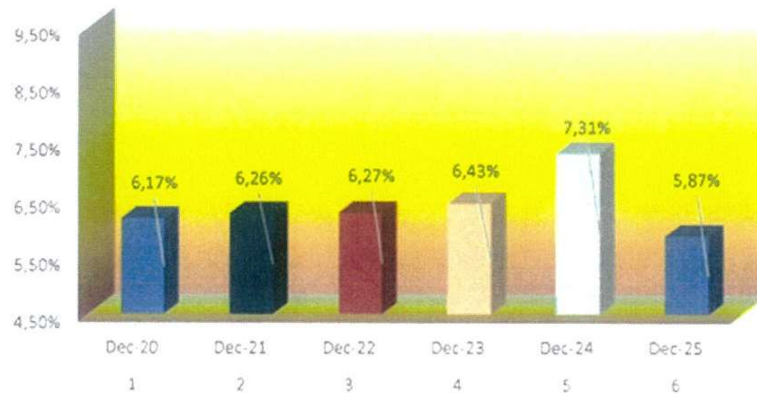
Return on Equities (ROE)



- 3) **Net Interest Margin (NIM)** posisi periode Desember 2025 sebesar 5.87% mengalami penurunan sebesar 1.44% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 7.31%.

Tabel 15.06  
Net Interest Margin (NIM)  
Desember 2025

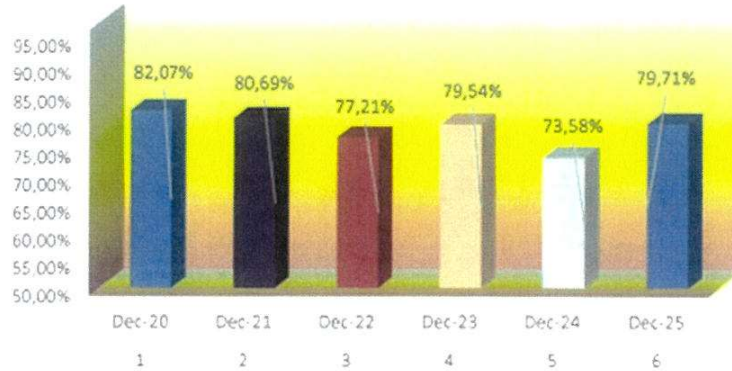
Net Interest Margin (NIM)



- 4) **Rasio BOPO** posisi periode Desember 2025 sebesar 79.71% mengalami peningkatan sebesar 6.13% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 73.58%.

**Tabel 15.07**  
**Rasio Efisiensi (BOPO)**  
**Desember 2025**

Rasio Efisiensi (BOPO)

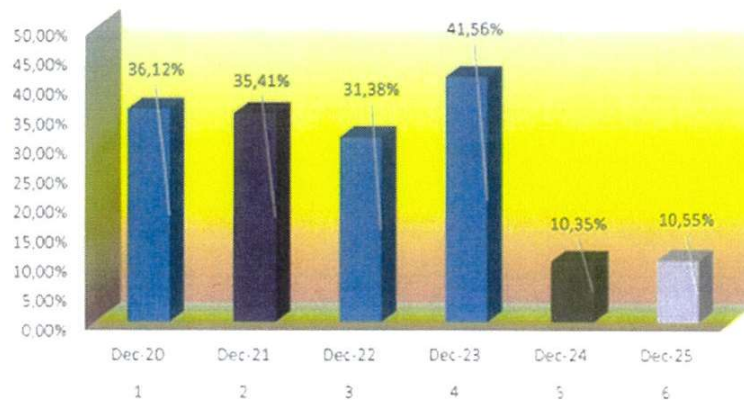


**b. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas**

- 1) Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Total Aset posisi periode Desember 2025 sebesar 10.55% mengalami peningkatan sebesar 0.20% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 10.35%.

**Tabel 15.08**  
**Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Total Aset**  
**Desember 2025**

Pendapatan Bunga bersih dibagi Rata-Rata Total Aset



- 2) Rasio Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga (Net) terhadap Rata - Rata Total Aset posisi periode Desember 2025 sebesar 1.45% mengalami peningkatan

sebesar 0.41% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 1.04%.

**Tabel 15.09**  
**Rasio Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga (Net) terhadap Rata - Rata Total Aset**  
**Desember 2025**

RUMUS	NILAI	HASIL RASIO
Pendapatan Operasional Selain Pendapatan Bunga (Disetahunkan)	484.990.776.894,09	1,45 %
Rata-rata Total Aset	33.472.548.000.000,00	

3) Rasio Beban *Overhead* terhadap Total Aset posisi periode Desember 2025 sebesar 5.11% mengalami peningkatan sebesar 2.01% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 3.10%.

**Tabel 15.10**  
**Rasio Beban *Overhead* terhadap Total Aset**  
**Desember 2025**

RUMUS	NILAI	HASIL RASIO
Beban <i>Overhead</i> (Disetahunkan)	1.709.733.458.256,24	5,11 %
Rata-rata Total aset	33.472.548.000.000,00	

4) Rasio Beban Pencadangan posisi periode Desember 2025 sebesar 0.34% mengalami penurunan sebesar 0.34% jika dibandingkan dengan posisi periode Desember 2024 sebesar 1.96%.

**Tabel 15.11**  
**Rasio Beban Pencadangan**  
**Desember 2025**

RUMUS	NILAI	HASIL RASIO
Beban Pencadangan (Disetahunkan)	113.410.908.389,21	0,34 %
Rata-rata Total Aset	33.472.548.000.000,00	

5) Rasio *Non Core Earnings* posisi periode Desember 2025 dinilai dengan Predikat Kurang Memadai.

**c. Komponen - komponen yang mendukung Rentabilitas**

1) Rasio *Core ROA* posisi periode Desember 2025 sebesar 5.49%.

Tabel 15.12  
*Rasio Core ROA*  
Desember 2025

RUMUS	NILAI	HASIL RASIO
Pendapatan operasional-Beban operasional	4.882.767.327.281,22- 3.045.200.202.102,31	5,49 %
Rata-rata Total Aset	33.472.548.000.000,00	

2) Prospek Rentabilitas, Bank memiliki kemampuan dalam mengelola sumber rentabilitas yang ada saat ini dan memiliki perencanaan yang terukur dalam mempertahankan dan meningkatkan rentabilitas, Bank juga melakukan penyusunan rencana bisnis dengan memperhatikan peluang terbentuknya rentabilitas yang stabil dan tumbuh sehingga Bank dapat mengendalikan biaya operasional yang berpotensi mengurangi sumber rentabilitas dan permodalan Bank.

**d. Manajemen Rentabilitas**

Berdasarkan penilaian terhadap komponen Manajemen Rentabilitas yang terdiri dari parameter/indikator kemampuan Bank dalam mengelola Rentabilitas sampai dengan posisi periode Desember 2025, maka berpredikat Memadai.

Hal ini sebagai dampak dari usaha Bank dalam melakukan perbaikan kualitas dalam aspek pendapatan laba, hal ini terlihat dari Bank Papua dari aspek.

## 9. PENYEDIAAN DANA PADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN DEBITUR BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait harus sejalan dengan POJK Nomor : 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan ketentuan internal Bank yang diatur sesuai anggaran dasar Bank serta diputus oleh manajemen secara independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK sebagaimana diatur dalam :

- a) SK Direksi Nomor : 72/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Tata Kelola Debitur Besar (*Large Exposure*) ;
- b) SK Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (BPP) PT Bank Pembangunan Daerah Papua ;
- c) SK Direksi Nomor : Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 82/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ;
- d) SOP Buku VI Pedoman Lainnya tentang Pedoman Pengelolaan Nasabah Besar.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan debitur besar (*large exposure*) telah dilakukan pengendalian serta pemantauan risiko di dalam proses penyediaan dana kepada pihak ketiga

sehingga risiko yang timbul atas kegiatan penyediaan dana tersebut tidak akan memberikan dampak secara signifikan terhadap Bank.

Tabel 16.00  
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) & Debitur Besar/Inti (*large exposure*)  
Periode 31 Desember 2025

No	Penyediaan Dana	Jumlah Pihak Terkait & Debitur Besar	Nominal (Dlm Jutaan Rupiah)
1	Pihak Terkait (Pemda)	9	468,344
2	Debitur Inti	25	6,625,585

#### 10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam rangka memenuhi aspek keterbukaan, PT Bank Pembangunan Daerah Papua selalu memaparkan perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham dan mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulanan / Semester ke media massa dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan tahunan Tata Kelola Bank. Dalam penyajian laporan tersebut, senantiasa menyempurnakan isi dan penyajian laporan sejalan dengan praktek Tata Kelola dan peraturan yang berlaku.

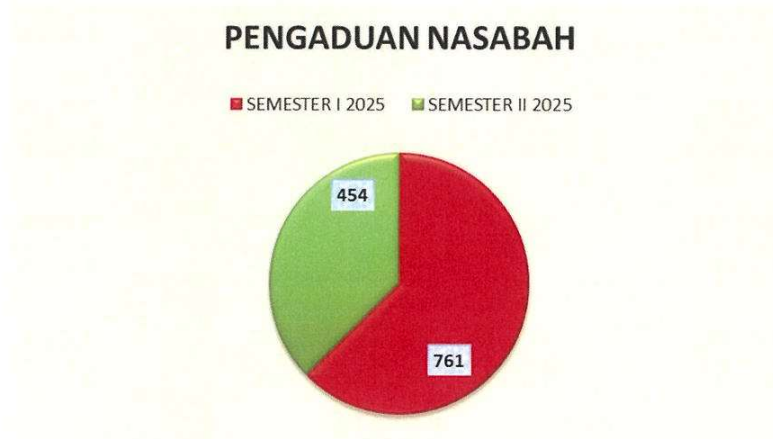
Informasi publik dapat diakses melalui *website* :

<http://www.Bankpapua.com>

Disamping itu, juga tersedia saran pos dan telepon untuk memfasilitasi para pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi dan menangani setiap keluhan yang diselesaikan dengan baik, untuk menyikapi setiap pengaduan permasalahan yang diajukan oleh Nasabah dalam beberapa kategori permasalahan sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Papua.

Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mendukung Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagaimana diatur sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bank telah menerima dan menyelesaikan pengaduan dari nasabah sepanjang tahun 2025 Berdasarkan data Pengaduan Nasabah dengan total 1.215 (seribu dua ratus lima belas) pengaduan yang telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16.01  
Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Tahun 2025



- Pengaduan Nasabah mengalami penurunan di Semester II tahun 2025 sebanyak 307 pengaduan atau mencapai 68% sehingga menjadi 454 pengaduan, jika dibandingkan pada Semester I tahun 2025 sebanyak 761 pengaduan. Jenis produk yang paling banyak menjadi sumber keluhan adalah sistem pembayaran ATM/Kartu Debit dengan permasalahan kegagalan atau keterlambatan transaksi.
- Selain itu, beberapa fitur pada aplikasi Papua *Mobile* belum dapat digunakan secara maksimal, yang berdampak pada kurangnya penggunaan transaksi melalui *platform* tersebut.
- Bank Papua telah mengambil langkah penanganan awal dengan menyelesaikan pengaduan langsung di Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu. Hal ini membuat frekuensi pengaduan resmi yang masuk ke layanan *Contact Center* Halo Bank Papua 1500-138 berkurang karena masalah dapat diselesaikan sejak tahap awal.

## A. KEPEMILIKAN SAHAM SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

### 1. DIREKSI

Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS. Jenis remunerasi : (gaji, bonus,

tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang dapat dimiliki dan yang tidak dapat dimiliki bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## 2. DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan sesama anggota komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

## B. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

1. Rasio gaji tertinggi pegawai diterima oleh Pemimpin Divisi dan gaji terendah diterima oleh pelaksana dengan rasio gaji terendah adalah 15.91% dari rasio gaji tertinggi pegawai.
2. Rasio gaji tertinggi Direksi diterima oleh Direktur Utama, sedangkan gaji anggota Direksi yang lain adalah 90% dari gaji Direktur Utama.
3. Rasio Gaji tertinggi Komisaris diterima oleh Komisaris Utama adalah 60% dari gaji Direktur Utama dan rasio gaji anggota Komisaris yang lain adalah 90% dari gaji Komisaris Utama.
4. Rasio gaji Direksi tertinggi diterima oleh Direktur Utama dan gaji tertinggi pegawai diterima oleh Pemimpin Divisi dengan rasio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 18,55% dari gaji Direktur Utama.

Tabel 17.00  
Rasio Gaji Tertinggi & Terendah  
Komisaris & Direksi Tahun 2025

Jumlah Remunerasi Dalam 1 Tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp 2 Miliar	0	5
Diatas Rp 1 Miliar s/d 2 Miliar	5	0
Diatas Rp 500 Juta s/d 1 Miliar	0	0
Rp 500 Juta ke bawah	0	0

### C. SHARES OPTION

*Share option* adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pengungkapan *share option* dilakukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 18.00  
Pengungkapan *share option* Tahun 2025

Keterangan>Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Nihil	-	-	-	-
Direksi	Nihil	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	Nihil	-	-	-	-
Total	Nihil	-	-	-	-

*Share Option* yang dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada Periode Tahun 2025 adalah Nihil. PT Bank Pembangunan Daerah Papua tidak melakukan penawaran sahamnya atau penawaran opsi dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

- **Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank.**

Bank tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back* obligasi mengingat Bank Papua belum menjual saham kepada masyarakat dan belum menerbitkan obligasi.

- **Hak-Hak Pemegang Saham.**

Para pemegang saham memiliki hak, sebagai berikut:

- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui undangan yang dikirim tercatat kepada seluruh Pemegang Saham.

- Memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh keuntungan/deviden sesuai proporsi kepemilikan saham.
- Memperoleh informasi penting mengenai perkembangan usaha Bank melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan media lainnya seperti laporan publikasi.

#### D. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada stakeholders. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*. Sekretaris Perusahaan juga berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator (OJK & BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut :

- Perencanaan strategi perusahaan dalam bidang kehumasan/*public relation*, peningkatan kualitas layanan yang ditawarkan Bank kepada nasabah serta merencanakan dan mengembangkan program kepedulian sosial/*Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- Perencanaan Kehumasan dan *Website* Bank Papua meliputi menyusun perencanaan media *planning*/siaran pers yang efektif, memanfaatkan *website* perusahaan secara maksimal, menerbitkan tulisan-tulisan editorial terpilih lewat media yang cocok serta

mengupdate jalur-jalur komunikasi internal, mempersiapkan *draft* pidato dan isi wawancara bagi para anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif Bank serta mengatur wawancara dan kontak lain dengan pihak media.

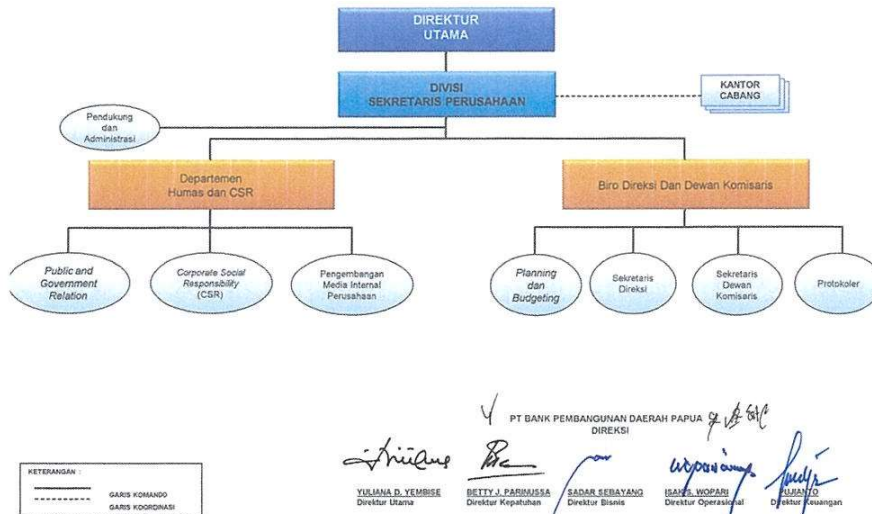
- Aktivitas agendaris meliputi mengawasi aktivitas penerimaan surat, naskah dan dokumen dan memastikan pemeriksaan, pemilahan, penomoran, penataan kearsipan atas surat, naskah dan dokumen yang masuk, meninjau dan memantau perjalanan atau pengiriman arsip, naskah dan dokumen sesuai dengan disposisi dan aktivasi pencatatannya.
- Program kepedulian sosial meliputi merancang dan mengembangkan program kepedulian sosial / CSR dan melaksanakannya sebagai proyek-proyek yang memiliki cakupan, pencapaian, batas waktu, batas anggaran dan hasil-hasil yang jelas serta mengevaluasi manfaat yang diperoleh Bank dari program-program CSR tersebut, dalam hal citra serta reputasi yang terbangun.
- Aktivitas kesekretariatan dan protokoler.

## 1. STRUKTUR ORGANISASI

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. **Matheus A. Mual**, Divisi Sekretaris Perusahaan berada dibawah Direktorat Direktur Utama. Struktur organisasi Divisi Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yakni Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 82/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang

## Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

### Struktur Organisasi



## 2. REALISASI CSR

Sepanjang tahun 2025, Bank Papua senantiasa memperhatikan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang digulirkan melalui CSR untuk membantu dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di tanah Papua. CSR Bank Papua diimplementasikan melalui beragam kegiatan sosial yang menyentuh seluruh sektor (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan/Bencana Alam, Keagamaan & Sosial).

Penerapan program CSR Bank Papua merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Adapun realisasi CSR Bank Papua sepanjang tahun 2025, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tanah Papua antara lain :

**Tabel 19.00**  
**Realisasi Penyaluran CSR Tahun 2025**  
**(Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan/Bencana Alam, Keagamaan & Sosial)**

NO	KETERANGAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI						KEMITRAAN	TOTAL BIAYA
				PENDIDIKAN	KESEHATAN	SOSIAL	KEAGAMAAN	LINGKUNGAN HIDUP		
1	PENYERAHAN BANTUAN CSR DI KAB. SUPIORI	SUPIORI	PAPUA		88.072.580					88.072.580
2	BANTUAN KEPADA GEREJA KHALOTIK SANTO FRASISKUS ASISI APO	KOTA JAYAPURA	PAPUA				52.500.000			52.500.000
3	BANTUAN KEPADA GEREJA OTTOUW	MERAUKE	PAPUA SELATAN				67.000.000			67.000.000
4	BANTUAN CSR TPPKK PROVINSI PAPUA	KOTA JAYAPURA	PAPUA	70.106.000						70.106.000
5	BANTUAN KEPADA MASJID AGUNG NURUL HUDA	KAB. KEEROM	PAPUA				55.625.000			55.625.000
6	BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG GKI BAHTERA ARSO	KAB. KEEROM	PAPUA					86.082.633		86.082.633
7	BANTUAN KEPADA PURA JAGAT NATHA	KAB. KEEROM	PAPUA				25.010.000			25.010.000
8	BANTUAN KEPADA GEREJA GKI PENABUR JAYA ASRI	KOTA JAYAPURA	PAPUA				49.980.000			49.980.000
9	BANTUAN KEPADA GKI FITO KISOR	KAB. MAYBRAT	PAPUA BARAT DAYA				53.550.000			53.550.000
10	PENANGGULANGAN AIDS. TBC DAN MALARIA	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	PAPUA PEGUNUNGAN		96.038.042					96.038.042
11	BANTUAN KEPADA GEREJA GPDI HALELUYA YAHIM	KAB. JAYAPURA	PAPUA				55.425.000			55.425.000
12	BANTUAN REVITALISASI FASILITAS SEKOLAH DAN BANTUAN BAGI SISWA TIDAK MAMPU	KAB. SORONG SELATAN	PAPUA BARAT DAYA	159.221.000						159.221.000
13	BANTUAN PAMERAN KRIYANUSA DEKRANASDA PROV. PAPUA	KOTA JAYAPURA	PAPUA					149.998.200		149.998.200
14	PENANGGULANGAN AIDS. TBC DAN MALARIA	KAB. SORONG SELATAN	PAPUA BARAT DAYA		156.474.080					156.474.080
15	BANTUAN CSR SEKOLAH STT JAFFRAY	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	100.200.000						100.200.000
16	BANTUAN TIKET GERAKAN MAHASISWA KRISTEN (GMKI)	KOTA JAYAPURA	PAPUA	21.018.990						21.018.990
17	BANTUAN KEPADA GEREJA GKI EBENHEAZER KAYO PULAU	KOTA JAYAPURA	PAPUA				140.500.000			140.500.000
18	BANTUAN KEPADA GKI BARNABAS KANTUMILENA	KAB. JAYAPURA	PAPUA							-
19	BANTUAN KEPADA GPDI WAROPEN	KAB. WAROPEN	PAPUA							-
20	BANTUAN KEPADA PAROKI HATI KUDUS	KAB. MAPPI	PAPUA SELATAN				50.000.000			50.000.000
21	DUKUNGAN KEGIATAN RRI FEST 2025	KOTA JAYAPURA	PAPUA					15.608.163		15.608.163
22	BANTUAN PONDOK PESANTREN DARUL QURAN	KOTA JAYAPURA	PAPUA				30.100.000			30.100.000
23	GENTING KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA		167.198.203					167.198.203
24	GENTING KABUPATEN SUPIORI	KAB. SUPIORI	PAPUA		169.643.216					169.643.216
25	GENTING KABUPATEN ASMAT	KAB. ASMAT	PAPUA SELATAN		162.338.755					162.338.755
26	BANTUAN KEPADA GSJA TABERNACLE OF DAVID	KAB. SORONG	PAPUA BARAT DAYA				36.500.000			36.500.000
27	PROGRAM PENANAMAN POHON MANGGROVE	KOTA JAYAPURA	PAPUA					22.309.429		22.309.429
28	BANTUAN KEPADA GBI PONDOK KEMULIAAN SENTANI	KAB. JAYAPURA	PAPUA			30.000.000				30.000.000
29	BANTUAN KEPADA PANTI ASUHAN AIR HAYAT ARSO	KAB. KEEROM	PAPUA			23.400.000				23.400.000
30	BANTUAN KEPADA PONDOK PESANTREN DDI ENTROP	KOTA JAYAPURA	PAPUA				22.495.000			22.495.000
31	BANTUAN TIKET BASEBALL DAN SOFT BALL	KOTA JAYAPURA	PAPUA	47.602.930						47.602.930
32	BANTUAN KEPADA PERWOSI	KOTA JAYAPURA	PAPUA	158.138.480						158.138.480
33	BANTUAN KEPADA GEREJA KHATOLIK KRING YESUS KIMBIGENGGE WUNAN		PAPUA				40.700.000			40.700.000
34	BANTUAN KEPADA GEREJA KHATOLIK KEPELA KRING SANTO YUSUF	MEMBERAMO TENGAH	PAPUA				44.700.000			44.700.000
35	BANTUAN KEPADA GEREJA GBGP KRISTUS AJAIB KALIMANGA	KAB. NABIRE	PAPUA TENGAH				53.900.000			53.900.000
36	BANTUAN KEPADA GKI MARANATHA AGUNG	KAB. TAMBRAUW	PAPUA BARAT DAYA				74.746.000			74.746.000
37	BANTUAN KEPADA GKI PELANGI SOWEK	KAB. SUPIORI	PAPUA				101.104.226			101.104.226
38	BANTUAN KEPADA GKI EILLO BUNDRU	KAB. JAYAPURA	PAPUA							-
39	BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA SARMI	KAB. SARMI	PAPUA			100.000.000				100.000.000
40	BANTUAN KEPADA GEREJA TORAJA	MAKASSAR	SULAWESI SELATAN				36.805.000			36.805.000
41	BANTUAN KEPADA PKBM MEKAR SARI			84.450.000						84.450.000
42	BANTUAN KEPADA PKBM MEKAR SARI	NABIRE	PAPUA TENGAH	53.900.000						53.900.000
43	BANTUAN BENCANA ALAM BANJIR DI SUMATRA					100.000.000				100.000.000
44	PENANGGULANGAN AIDS. TBC DAN MALARIA				149.251.520					149.251.520
45	BANTUAN MOTOR SAMPAH	NABIRE	PAPUA TENGAH					149.350.000		149.350.000
46	BANTUNA KEPADA GKI ELOHIM POLIMAK 1	KOTA JAYAPURA	PAPUA				42.962.500			42.962.500
47	BANTUAN KEPADA YAYASAN JANTUNG INDONESIA PROVINSI PAPUA	KOTA JAYAPURA	PAPUA	26.926.300						26.926.300
48	BANTUAN KEPADA GEREJA GKI YANSU KEMTUK GRESI	KAB. JAYAPURA	PAPUA				21.550.000			21.550.000
49	BANTUAN KEPADA GSJA JEMAAT ABEPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA				52.500.000			52.500.000
50	BANTUAN KEPADA GEREJA BETHEL JEMAAT CITY KOYA BARAT	KOTA JAYAPURA	PAPUA				50.640.000			50.640.000
51	BANTUAN KEPADA GEREJA KRISTEN NAZARENE TANAH PAPUA	KOTA JAYAPURA	PAPUA				48.800.000			48.800.000
52	BANTUAN KEPADA KAMPUNG WAKAF TRAYMELIAN DAN KAMPUNG ZAKAT KWIMI	KAB. JAYAPURA	PAPUA			35.629.000				35.629.000
53	BANTUAN SEMBAKO ASRAMA STT BAPTIS	KOTA JAYAPURA	PAPUA			21.445.000				21.445.000
54	BANTUAN KEPADA GPDI JEMAAT ALFA OMEGA HAMADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA				189.100.000			189.100.000
55	BANTUAN SARANA PENUNJANG PAUD GEREJA KINGMI	KAB. KEEROM	PAPUA	43.350.000						43.350.000
56	BANTUAN KEPADA GKI SIKHEM WABERFONDI	KAB. SUPIORI	PAPUA				57.500.000			57.500.000
57	BANTUAN KEPADA ASRAMA KARITAS DOK 5	KOTA JAYAPURA	PAPUA			20.385.000				20.385.000
58	BANTUAN KEPADA SD YPPGI AYAM 4SD PERSIAPAN NEGERU CUMNEW	KAB. ASMAT	PAPUA SELATAN	22.765.000						22.765.000
59	BANTUAN KEPADA GKI SOLAFIDE BOKONDINI	KAB. TOLIKARA	PAPUA PEGUNUNGAN				62.100.000			62.100.000
60	BANTUAN KEPADA GEREJA GPDI RAJAWALI SEJAHTERA	KAB. RAJA AMPAT	PAPUA BARAT				53.070.000			53.070.000
61	BANTUAN KEPADA SD YPPGI AYAM 4SD PERSIAPAN NEGERU CUMNEW	ASMAT	PAPUA SELATAN	82.758.000						82.758.000
62	BANTUAN KEPADA GKI VIADOLOROSA POLIMAK 4	KOTA JAYAPURA	PAPUA				53.350.000			53.350.000
63	BANTUAN KEPADA GPI JALAN SUCI JEMAAT YUDESA KAMBUSKATO	KABUPATEN MAYBRAT	PAPUA BARAT DAYA				59.250.000			59.250.000
64	BANTUAN MOTOR SAMPAH VIAR	KAB. MERAUKE	PAPUA SELATAN					422.321.104		422.321.104
65	PELATIHAN USAHA UMKM KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA					80.117.367		80.117.367
66	PROGRAM PENGALOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERNILAI EKONOMIS							132.370.640		132.370.640
<b>JUMLAH</b>				<b>870.436.700</b>	<b>989.016.396</b>	<b>330.859.000</b>	<b>1.681.462.726</b>	<b>609.588.696</b>	<b>448.568.840</b>	<b>4.929.932.358</b>

**Tabel 19.01**  
**Realisasi Biaya Operasional Penyaluran CSR Tahun 2025**  
**(Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan/Bencana Alam, Keagamaan & Sosial)**

NO.	URAIAN	BIAYA OPERASIONAL
1	BY OPERASIONAL BANTUAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI SORONG SELATAN	3.081.005
2	PKBM MEKAR SARI	2.186.122
	PEMBUATAN BAJU KAOS OPERASIONAL CSR	6.000.000
3	OPS BANTUAN MASJID AGUNG NURUL HUDA	153.061
4	OPERASIONAL BANTUAN CSR TPPKK PROV PAPUA	7.933.880
5	OPERASIONAL PIEMBANGUNAN PURA JAGAT NATHA KEEROM	280.612
6	OPERASIONAL CSR BIDANG KEAGAMAAN	13.695.061
7	PROGRAM PENANGGULANGAN AIDS, TBC DAN MALARIA DI KAB. PEGUNUNGAN BINTANG DAN GPDI HALELUYAH SENTANI	6.257.391
8	PROGRAM PENANGGULANGAN AIDS, TBC DAN MALARIA DI KAB. KEEROM	1.644.968
9	OPS BANTUAN MOTOR SAMPAH KAB NABIRE	975.000
10	OPS BANTUAN KEPADA GSJA ABEPURA	255.102
11	KEGIATAN SUPERVISI KCP KORIDO	6.981.633
12	BY OPERASIONAL KEGIATAN CSR	4.974.837
13	OPERASIONAL BANTUAN CSR KEPADA YPPGI AYAM DAN SD PERSIAPAN CUMNEU	17.283.804
14	OPERASIONAL BANTUAN VIAR MERAUKE	7.455.000
	<b>TOTAL</b>	<b>79.157.476</b>

**Tabel 19.02**  
**Total Realisasi Penyaluran CSR Tahun 2025**  
**(Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan/Bencana Alam, Keagamaan & Sosial)**





No	Keterangan	Nominal Jumlah Bantuan CSR
1	Total Realisasi CSR Tahun 2025	Rp 4.929.932.358,-
2	Total Realisasi Biaya Operasional 2025	Rp 79.157.476,-
	<b>Total Jumlah CSR 2024</b>	<b>Rp 5.009.089.834,-</b>

### 3. PENGHARGAAN







Apresiasi dan penghargaan terus menjadi motivasi untuk mewujudkan kolaborasi dan kerja sama kepada seluruh pihak dalam mencapai visi dan misi Bank Papua. Bank Papua telah membuktikan mampu terus tumbuh positif ditengah kondisi yang menantang dan terus berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi di tanah Papua dan Nasional.

Selama periode tahun 2025, Bank Papua telah mendapatkan penghargaan sebanyak 15 (lima belas) penghargaan dengan rincian, sebagai berikut :






**Tabel 20.00  
Penghargaan Bank Papua Tahun 2025**

No.	Nama Penghargaan	Deskripsi Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Acara/Kegiatan	Tempat & Tanggal Diberikan	Keterangan
1	<i>Top Digital Corporate Brand Award 2025</i>	Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil menunjukkan kinerja positif dalam membangun merek digital yang kuat. Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi pemacu semangat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.	Info Ekonomi.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia	<i>Top Digital Corporate Brand Award 2025</i>	Hotel Sultan, Jakarta, 20 Maret 2025	
2	<i>The most Innovative Future Finance Awards 2025 for Encouraging MSME Development and Strengthening Business Development and Espansoin untuk kategori Regional Bank</i>	Penghargaan ini diberikan kepada lembaga keuangan untuk mengatasi hambatan dalam akses layanan keuangan, baik dari segi inklusivitas, regulasi, teknologi, maupun kesenjangan social ekonomi serta mendorong inovasi dan memastikan layanan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat guna membangun kepercayaan pelanggan melalui layanan yang bertanggung jawab serta mengedepankan keberlanjutan bisnis yang mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis sambil tetap menjaga kualitas layanan dan etika bisnis.	Plus Idea Komunika bekerjasama dengan goodmoney.ID	<i>Innovative Future Finance Awards 2025</i>	Grand Ballroom, JW Marriot Hotel Jakarta, 19 Juni 2025	
3	<i>The Best CEO in the Regional Bank 2025 for Maintaining Profitability Growth and Innovative Digital Services</i> untuk kategori Regional Bank yang diberikan kepada Ibu Yuliana D. Yembise.	Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin yang mampu menjawab kompleksitas dunia keuangan modern dengan solusi yang kreatif, berbasis etika, dan berdampak nyata. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menginspirasi pemimpin lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga ketahanan institusi dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.	Plus Idea Komunika bekerjasama dengan goodmoney.ID	<i>Innovative Future Finance Awards 2025</i>	Grand Ballroom, JW Marriot Hotel Jakarta, 19 Juni 2025	
4	<i>The Most Outstanding Women 2025</i> kepada Yuliana D. Yembise	Penghargaan ini diberikan kepada Para Wanita luar biasa yang sukses dalam karirnya dan berkiprah di sektor keuangan, BUMN, dan lembaga public. Menyimak kunci keberhasilan para pemimpin di sektor jasa keuangan, BUMN, dan lembaga publik serta bagaimana mereka mendorong kaum wanita Indonesia untuk berperan dalam perekonomian.	PT. Infobank Media Group	<i>The Most Outstanding Women 2025</i>	Mason Pine Hotel Bandung, 04 Juli 2025	



5	<i>The Most Outstanding Women 2025</i> kepada Betty J. Parinussa	Penghargaan ini diberikan kepada Para Wanita luar biasa yang sukses dalam karirnya dan berkiprah di sektor keuangan, BUMN, dan lembaga public. Menyimak kunci keberhasilan para pemimpin di sektor jasa keuangan, BUMN, dan lembaga publik serta bagaimana mereka mendorong kaum wanita Indonesia untuk berperan dalam perekonomian.	PT. Infobank Media Group	<i>The Most Outstanding Women 2025</i>	Mason Pine Hotel Bandung, 04 Juli 2025	
6	<i>The Asian Post Best Regional Champion 2025, Predikat Excellent for The Financial Performance During 2023-2024</i>	Penghargaan ini diberikan secara khusus untuk menilai kinerja bank milik pemerintah daerah seperti BPD, BPR, dan BPRS, berdasarkan laporan keuangan triwulan ketiga tahun 2024. Penilaian dilakukan terhadap lima aspek utama: permodalan, kualitas aset, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas.	<i>The Asian Post Research</i>	<i>The Asian Post Research</i>	Shangri-La Hotel, Jakarta 16 Mei 2025	
7	<i>Woman Empower Woman Award 2025</i>	Penghargaan ini diberikan kepada Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise dan Direktur Kepatuhan Bank Papua Betty J. Parinussa atas kepemimpinan dan kontribusi strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta penguatan tata kelola perusahaan.	Majalah Kebaya Indonesia	<i>Ajang Woman Empower Woman Award 2025</i>	Birawa Ballroom, Hotel Bidakara, Jakarta, 04 Desember 2025	
8	Infobank Top 100 CEO 2025	Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin perusahaan di Indonesia yang dinilai memiliki kepemimpinan visioner, adaptif, serta mampu membawa institusi yang dipimpinnya tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika dan tantangan industri keuangan yang semakin kompleks.	Majalah Infobank	<i>Closing Year Forum and Appreciation: The Heart of Ledaership – The Future Depends on What You Do Today</i>	Shangri-La Hotel, Jakarta, 8 Desember 2025	
9	Penghargaan sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak tahun 2025	Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KPP Pratama Sorong atas kontribusi Bank Papua KCU Sorong dalam memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak, khususnya dalam proses pembayaran dan penyetoran pajak melalui layanan perbankan.	KPP Pratama Sorong	Forum Konsultasi Publik 2025	Kantor Pajak Pratama Sorong, 04 Desember 2025	
10	Mitra Strategis Pendukung Implementasi Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bank Papua juga dinobatkan sebagai Mitra Strategis berkat perannya dalam mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk dalam penguatan sistem pembayaran digital yang transparan, akuntabel, dan efisien. Upaya ini selaras dengan program nasional percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan.	Bank Indonesia	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, Tangguh dan Mandiri : Sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan	Jayapura, 03 Desember 2025	



11	Bank Pendukung Distribusi dan Layanan Kas Uang Rupiah Terbaik	Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Bank Papua dalam mendukung pelaksanaan tugas distribusi serta layanan kas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) di Tanah Papua. Melalui jaringan layanan yang diperkuat serta kolaborasi bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah, Bank Papua dinilai mampu menjaga ketersediaan uang Rupiah dan memastikan layanan kas tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Bank Indonesia	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, Tangguh dan Mandiri : Sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan	Jayapura, 03 Desember 2025	
12	Penghargaan CSR	Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui berbagai program sosial yang berdampak nyata di Tanah Papua.	Plus Idea Komunika bekerja sama dengan Netralnews.com (NNC)	Indonesia Sustainable Synergy and SDGs Visionary Leader Award 2025	The Sultan Hotel & Residence Jakarta, 10 November 2025	
13	Penghargaan Sebagai Bank Daerah Pendukung Ekonomi Papua Barat pada Peringatan HUT ke-26 Provinsi Papua Barat	Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Bank Papua dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk penyaluran kredit produktif bagi UMKM, pembiayaan sektor prioritas, layanan perbankan digital untuk masyarakat, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyentuh bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Papua Barat	Lapangan Upacara Kantor Gubernur Papua Barat 13 Oktober 2025	
14	Penghargaan Sebagai Kontribusi Utama Penerima Pajak Tahun 2024 dan Edukasi Coretax	Penghargaan ini diberikan atas kontribusi dan dukungan terhadap program perpajakan yang dijalankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku	Acara sosialisasi Coretax dan Forum Konsultasi Publik	Aula Gedung Keuangan Negara Lantai 8 Jayapura, 30 September 2025	
15	Penghargaan The Best Service Performance Excellence Nasional	Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Bank Papua dalam menghadirkan layanan perbankan yang prima, inklusif, dan adaptif di tengah berbagai tantangan industri perbankan, khususnya pada era transformasi digital saat ini.	PT Artajasa bekerja sama dengan Majalah Infobank	ATM Bersama Awards 2025	Manado, 19 September 2025	

#### 4. SK & SE DIREKSI

##### a. Surat Keputusan Direksi

Selama periode tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah mengeluarkan peraturan - peraturan internal perusahaan dengan mengacu kepada ketentuan perundangan – undangan yang berlaku serta ketentuan regulator guna menunjang kegiatan perusahaan.



Adapun peraturan - peraturan internal perusahaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 21.00**  
**Surat Keputusan Direksi Tahun 2025**

No	Nomor SK	Tanggal/Bulan/Tahun	Perihal
1.	01/DIR-BPD/II/2025	06 Januari 2025	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dan Proses Pelaporan Keuangan
2.	02/DIR-BPD/II/2025	14 Januari 2025	Tata Cara Pelaksanaan Semarak Undian Berhadiah Tabungan Bank Papua Per Februari 2025 – Januari 2026
3.	03/DIR-BPD/II/2025	21 Januari 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Teminabuan Tahun 2025
4.	03.1/DIR-BPD/II/2025	21 Januari 2025	Penonaktifan Status <i>Customer Information File</i> Bank Papua
5.	04/DIR-BPD/II/2025	24 Januari 2025	Bonus Tahun 2024 Bagi Pegawai Bank Papua
6.	05/DIR-BPD/II/2025	24 Januari 2025	Pencadangan Tantiem Tahun 2024
7.	06/DIR-BPD/III/2025	17 Februari 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Wamena Tahun 2025
8	06.1/DIR-BPD/III/2025	03 Februari 2025	Tata Kelola Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmentasi Pemerintah Daerah
9	07/DIR-BPD/III/2025	17 Februari 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kebersihan <i>Cleaning Service</i> Kantor Cabang Wamena Tahun 2025
10	07.1/DIR-BPD/III/2025	21 Februari 2025	Penunjukan Tim Pengembangan <i>E-Prorecruitment</i> Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Pusat Bank Papua Tahun 2025
11	08/DIR-BPD/III/2025	24 Februari 2025	Suku Bunga Dasar Kredit Bank Papua
12	09/DIR-BPD/III/2025	24 Februari 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kebersihan <i>Cleaning Service</i> Kantor Cabang Sentani Tahun 2025
13	10/DIR-BPD/III/2025	26 Februari 2025	Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 – 2027
14	11/DIR-BPD/III/2025	26 Februari 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Sewa Aplikasi Sistem Monitoring ATM dan CRM Tahun 2025
15	12/DIR-BPD/III/2025	28 Februari 2025	Hasil <i>Business Meeting</i> Bank Papua Tahun 2025
16	12.1/DIR-BPD/III/2025	03 Maret 2025	Pengangkatan Ketua dan Dewan Komisaris Bank Papua
17	13/DIR-BPD/III/2025	11 Maret 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Manokwari Tahun 2025
18	14/DIR-BPD/III/2025	11 Maret 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengemudi <i>Driver</i> Kantor Cabang Manokwari Tahun 2025
19	15/DIR-BPD/III/2025	11 Maret 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kebersihan <i>Cleaning Service</i> Kantor Cabang Manokwari Tahun 2025
20	16/DIR-BPD/III/2025	11 Maret 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Fak-fak Tahun 2025
21	17/DIR-BPD/III/2025	11 Maret 2025	Tata Cara Pelaksanaan Semarak Undian Berhadiah Tabungan Bank Papua Periode Maret 2025 - Februari 2026
22	18/DIR-BPD/III/2025	12 Maret 2025	Panitia Penghapusan Barang Inventaris di Lingkungan Bank Papua Tahun 2025
23	19/DIR-BPD/III/2025	12 Maret 2025	Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 Kepada Pegawai dan PKWT Bank Papua

24	20/DIR-BPD/III/2025	12 Maret 2025	Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank Papua
25	21/DIR-BPD/III/2025	17 Maret 2025	Pembayaran Bonus Tahun 2024
26	22/DIR-BPD/III/2025	17 Maret 2025	Perubahan atas SK DIR NO. 67.1/DIR-BPD/XI/2024 Tentang Panitia Penyelenggara Undian Simpeda Tingkat Nasional Tahap II PER XXXV TAHUN 2025 dan Seminar
27	23/DIR-BPD/III/2025	20 Maret 2025	Perubahan atas SK DIR NO. 67.1/DIR-BPD/XI/2024 Tentang Panitia Penyelenggara Undian Simpeda Tingkat Nasional Tahap II PER XXXV TAHUN 2025 dan Seminar
28	24/DIR-BPD/VI/2025	08 Mei 2025	Pengangkatan Sdr Johanis Walasary Sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Papua Periode Tahun 2025 – Tahun 2029
29	25/DIR-BPD/VI/2025	08 Mei 2025	Pengangkatan Sdr Abraham Krey Sebagai Direktur Keuangan Dana Pensiun Bank Papua Periode Tahun 2025 – Tahun 2029
30	26/DIR-BPD/VI/2025	20 Mei 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kebersihan <i>Cleaning Service</i> Kantor Cabang Bintuni Tahun 2025
31	26.1/DIR-BPD/VI/2025	20 Mei 2025	Panitia Pengadaan Kelender dan Buku Agenda Tahun 2026 Bank Papua
32	27/DIR-BPD/VI/2025	22 Mei 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengemudi <i>Driver</i> Kantor Cabang Biak Tahun 2025
33	28/DIR-BPD/VI/2025	27 Mei 2025	Tabungan Berjangka Rencana Bank Papua Simanja Berencana (SIRENA)
34	29/DIR-BPD/VI/2025	16 Juni 2025	Perubahan Ke III (tiga) atas Surat Keputusan Direksi NO. 60/DIR-BPD/X/2023 Tentang Penunggalan <i>Customer Information File</i> (CIF) Ganda di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
35	30/DIR-BPD/VI/2025	16 Juni 2025	Manajemen Reksa Dana PT Bank Pembangunan Daerah Papua
36	31/DIR-BPD/VI/2025	16 Juni 2025	Penetapan <i>Culture Team</i> Budaya Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
37	32/DIR-BPD/VI/2025	18 Juni 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Keppi Tahun 2025
38	33/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Ransiki Tahun 2025
39	34/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Arso Tahun 2025
40	35/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	Tarif dan Biaya Transaksi Produk dan Jasa Bank Papua
41	36/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 – 2027 PT Bank Pembangunan Daerah Papua
42	37/DIR-BPD/VI/2025	30 Juni 2025	Peraturan Perjalanan Dinas PT Bank Pembangunan Daerah Papua
43	38/DIR-BPD/VII/2025	02 Juli 2025	Pembayaran Tunjangan Pendidikan Kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua
44	39/DIR-BPD/VII/2025	16 Juli 2025	Deposito <i>On Call</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua
45	40/DIR-BPD/VII/2025	21 Juli 2025	Penunjukan User Administrasi SLIK OJK di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
46	41/DIR-BPD/VII/2025	21 Juli 2025	Panduan <i>Monitoring Closed Circuit Television</i> (CCTV) <i>Integrated</i> Bank Papua

47	42/DIR-BPD/VII/2025	21 Juli 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Waghete Tahun 2025
48	43/DIR-BPD/VII/2025	22 Juli 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Asisten Rumah Tangga (ART) di Kediaman Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2025
49	44/DIR-BPD/VII/2025	22 Juli 2025	PENUNJUKAN Tim Pengadaan dan Implementasi Solusi <i>Backup Server HCL Data Center (Hyperconverged Infrastructure Data Center)</i>
50	45/DIR-BPD/VII/2025	22 Juli 2025	Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) PT Bank Pembangunan Daerah Papua
51	46/DIR-BPD/VII/2025	25 Juli 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Keamanan <i>Security</i> Kantor Cabang Agats Tahun 2025
52	47/DIR-BPD/VII/2025	25 Juli 2025	Penetapan Pengurus Pusat Bank Papua Club Periode Tahun 2023 - 2026
53	48/DIR-BPD/VII/2025	31 Juli 2025	Tim Implementasi dan Pendampingan Sertifikasi ISO IIEC 27001 PT Bank Pembangunan Daerah Papua
54	48.1/DIR-BPD/VII/2025	05 Agustus 2025	Penilaian Kualitas Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua
55	50/DIR-BPD/VIII/2025	28 Agustus 2025	Pembentukan Tim Pengadaan dan Implementasi <i>Active Directory Domain Services (ADDS)</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua
56	51/DIR-BPD/VIII/2025	29 Agustus 2025	Pelaporan <i>Climate Risk Management System</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua
57	51.1/DIR-BPD/VIII/2025	30 Agustus 2025	Mekanisme Pemberian <i>Sponsorship</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua
58	51.2/DIR-BPD/VIII/2025	30 Agustus 2025	Mekanisme Pemberian <i>Sponsorship</i> Kepada Klub Sepakbola di Wilayah Tanah Papua Periode 1 (satu) Musim Kompetisi di Indonesia
59	52/DIR-BPD/IX/2025	15 September 2025	Kredit Usaha Rakyat (KUR)
60	53/DIR-BPD/IX/2025	15 September 2025	Pinjaman Usaha Mikro (PUM)
61	54/DIR-BPD/IX/2025	16 September 2025	Pembentukan Panitia Semarak Undian Tabungan Bank Papua Tahun 2025
62	55/DIR-BPD/IX/2025	22 September 2025	Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2025 – 2027 PT Bank Pembangunan Daerah Papua
63	56/DIR-BPD/IX/2025	29 September 2025	Manajemen Kinerja Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua
64	57/DIR-BPD/IX/2025	29 September 2025	Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua
65	58/DIR-BPD/IX/2025	30 September 2025	Sertifikasi Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua
66	59/DIR-BPD/IX/2025	30 September 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengemudi <i>Driver</i> Kantor Cabang Utama Nabire Tahun 2025
67	60/DIR-BPD/X/2025	01 Oktober 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kebersihan <i>Cleaning Service</i> Kantor Cabang Utama Nabire Tahun 2025
68	61/DIR-BPD/X/2025	10 Oktober 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengemudi <i>Driver</i> Kantor Pusat Tahun 2025
69	62/DIR-BPD/X/2025	27 Oktober 2025	Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kebersihan <i>Cleaning Service</i> Kantor Cabang Utama Sorong Tahun 2025
70	63/DIR-BPD/X/2025	29 Oktober 2025	Mekanisme Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana Secara <i>Online</i> Melalui

			Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI)
71	64/DIR-BPD/XI/2025	03 November 2025	Pelaporan <i>Loss Event Data Base</i> (LED) PT Bank Pembangunan Daerah Papua
72	65/DIR-BPD/XI/2025	25 November 2025	Tim Penyusunan <i>Review</i> Buku Pedoman Pelaksanaan Perkreditan Bank Papua
73	66/DIR-BPD/XI/2025	25 November 2025	Service Excellence Award Bank Papua
74	67.1/DIR-BPD/XI/2025	27 November 2025	Kredit Konstruksi Untuk Pembangunan Rumah (KKPR) PT Bank Pembangunan Daerah Papua
75	67.2/DIR-BPD/XI/2025	27 November 2025	Penerbitan Bank Garansi PT Bank Pembangunan Daerah Papua
76	68/DIR-BPD/XI/2025	28 November 2025	Penilaian Profil Risiko Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Papua
71	69/DIR-BPD/XI/2025	28 November 2025	Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2025 - 2028 PT Bank Pembangunan Daerah Papua
72	70/DIR-BPD/XI/2025	28 November 2025	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun Buku 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua
73	70.1/DIR-BPD/XII/2025	02 Desember 2025	Tabungan Sirena Bank Papua
74	71/DIR-BPD/XII/2025	02 Desember 2025	Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi NO. 34.1/DIR-BPD/V/2025 Tentang Mekanisme Penggunaan Biaya Pemasaran dan Baya Promosi
75	72/DIR-BPD/XII/2025	02 Desember 2025	Tim Penyusun <i>Annual Report, Sustainability Report dan Company Profile</i> PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2025
76	73/DIR-BPD/XII/2025	03 Desember 2025	Penyelesaian Selisih ATM PT Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2025
77	73.1/DIR-BPD/XII/2025	15 Desember 2025	Penetapan Piagam Audit Internal ( <i>Internal Audit Chartered</i> )
78	74/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Divisi Manajemen Risiko Bank (MRB)
79	75/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Divisi Audit Internal (DAI)
80	76/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Standar Operasional Prosedur (SOP) Deteksi Analisa Anomali <i>Fraud 24/7</i>
81	77/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Standar Operasional Prosedur (SOP) Fungsil Ketahanan dan Keamanan Siber
82	78/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi <i>Fraud Detection System (FDS)</i>
83	78.1/DIR-BPD/XII/2025	17 Desember 2025	Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua AN. Saudara Yohanes Mandang
84	78.2/DIR-BPD/XII/2025	18 Desember 2025	Pembukaan Kantor Kas Yukase di Wilayah Operasional Kantor Cabang Maybrat
85	79/DIR-BPD/XII/2025	19 Desember 2025	Buku Pedoman Pelaksanaan Anti <i>Fraud</i>
86	80/DIR-BPD/XII/2025	19 Desember 2025	Perubahan Pertama Strktur Struktur Organisasi dan <i>Job Profile</i> Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Kelas IV (empat)
87	81/DIR-BPD/XII/2025	19 Desember 2025	Perubahan Pertama <i>Job Profile</i> Divisi Operasional dan Jasa, Akuntansi, <i>Treasury</i> , Teknologi, Kepatuhan dan Hukum
88	82/DIR-BPD/XII/2025	19 Desember 2025	Perubahan Kelimas atas Surat Keputuputusam Direksi No. 48/DIR-BPD/VII/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
89	83/DIR-BPD/XII/2025	19 Desember 2025	Pedoman Tata Kelola Sosial Media

90	84/DIR-BPD/XII/2025	30 Desember 2025	Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Tahun 2025
91	88/DIR-BPD/XII/2025	31 Desember 2025	Panitia Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
92	89/DIR-BPD/XII/2025	31 Desember 2025	Tunjangan Akhir Tahun 2025 Untuk Pegawai
93	90/DIR-BPD/XII/2025	31 Desember 2025	Tunjangan Akhir Tahun 2025 Untuk Direksi dan Dewan Komisaris
94	91/DIR-BPD/XII/2025	31 Desember 2025	Penetapan Risk Appetite dan Risk Limit Tahun 2026

## b. Surat Edaran Direksi

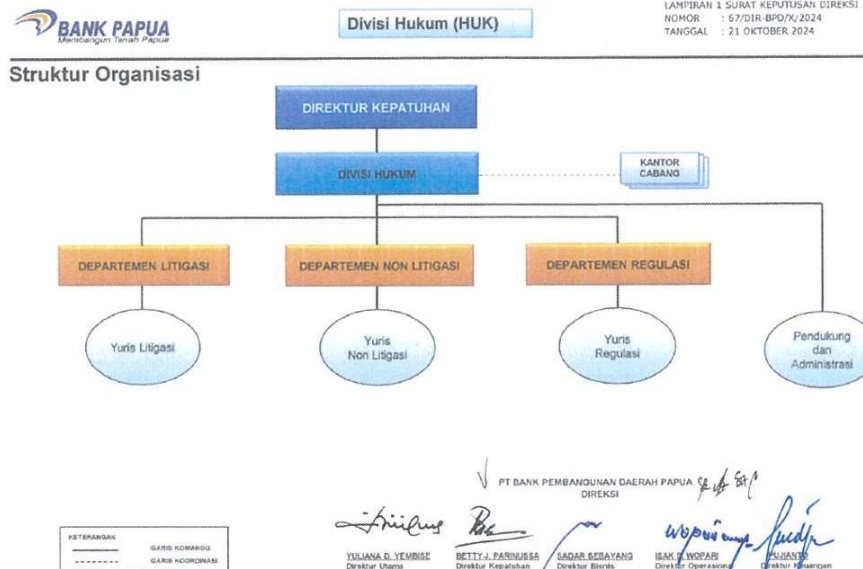
Tabel 22.00  
Surat Edaran Direksi Tahun 2025

No	Nomor SE	Tanggal/Bulan/Tahun	Perihal
1.	01/SE-BPD/II/2025	13 Januari 2025	Pelaksanaan Implementasi Layanan Transaksi Kupva (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing)
2.	02/SE-BPD/II/2025	24 Januari 2025	Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kebutuhan Struktur Organisasi Bank Papua
3.	03/SE-BPD/II/2024	24 Januari 2025	Kebijakan Umum Direksi (KUD) Dalam Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 s/d 2027
4	04/SE-BPD/II/2025	31 Januari 2025	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Tahun 2024
5	05/SE-BPD/II/2025	28 Februari 2025	Implementasi Nilai Loyal Sebagai Tematik Budaya Perusahaan
6	06/SE-BPD/IV/2025	30 April 2025	Tugas dan Tanggung Jawab Divisi atau Departemen Yang Menangani Pemantauan Anomali Transaksi
7	07/SE-BPD/IV/2025	30 Juni 2025	Ketentuan Pemakaian Seragam Dinas Pegawai Bank Papua
8	08/SE-BPD/IV/2025	25 Juli 2025	Penegasan Ketentuan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan
9	09/SE-BPD/VIII/2025	07 Agustus 2025	Pengujian <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) dan Pengujian Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) Bank Papua Tahun 2025
10	11/SE-BPD/XI/2025	05 November 2025	Petunjuk Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2025
11	12/SE-BPD/XII/2025	04 Desember 2025	Implementasi Penilaian Profil Risiko Cabang (PRC) dan Pelaporan <i>Loss Event Data Base</i> (LED)
12	13/SE-BPD/XII/2025	15 Desember 2025	Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Pantail, Batasan Harga Jual Rumah, Besaran Limit Kredit, Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
13	14/SE-BPD/XII/2025	22 Desember 2025	Operasional Bank Papua Selama Natal dan Tahun Baru
14	15/SE-BPD/XII/2025	29 Desember 2025	Cuti Pegawai Bank Papua Tahun 2026
15	16/SE-BPD/XII/2025	31 Desember 2025	Kewajiban Supervisi Kredit Produktif Dengan Plafond Diatas RP.500,000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

## E. DIVISI HUKUM

### 1. STRUKTUR ORGANISASI

Pada periode tahun 2025, Divisi Hukum dijabat oleh seorang Pemimpin Divisi yaitu Sdr. **Meaky G.A Bolang**. Struktur organisasi Divisi Hukum berada dibawah Direktorat Direktur Kepatuhan dan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 82/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Direksi Nomor 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.



## 2. VISI MISI

- **Visi**

“Mewujudkan Insan Bank Papua yang taat hukum sehingga mampu menopang kelangsungan bisnis Bank Papua”.

- **Misi**

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman setiap Insan Bank Papua akan pentingnya hukum dalam setiap tugas dan pekerjaan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan dan sosialisasi berbasis hukum bagi Insan Bank Papua.
- c. Melakukan penelaahan terhadap setiap produk hukum yang terkait dengan bisnis Bank serta implementasinya di Bank Papua.
- d. Meningkatkan koordinasi penyusunan dan pengembangan setiap aturan yang sudah diberlakukan di Bank Papua.
- e. Melakukan pendampingan dan konsultasi hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi Bank Papua serta Insan Bank Papua dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Meningkatkan penyelesaian masalah/sengketa hukum terkait bisnis yang dijalankan Bank Papua.
- g. Meningkatkan terlaksananya publikasi, dokumentasi dan informasi hukum atas usaha yang dijalankan Bank Papua.

## 3. PROGRAM KERJA DIVISI HUKUM

Perkara hukum yang dihadapi Bank Papua pada Semester II tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara. Khusus kasus hukum utusan *inkracht* meningkat sebanyak 7 (tujuh) perkara, sehingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) perkara, dibandingkan Semester I tahun 2025 yang hanya 20 (dua puluh) perkara. Selain itu, kasus hukum dalam proses kasasi mengalami penurunan menjadi 6 (enam) perkara pada Semester II tahun 2025, dari 8 (delapan) perkara di Semester I tahun 2025. Beberapa perkara Perdata juga sedang dilaksanakan, pada Semester II tahun

2025 terdapat lebih banyak Perkara Gugatan Sederhana dengan nominal maksimal Rp 500.000.000,- dan sesuai permintaan Kantor Cabang bahwa sebagian besar putusan dalam perkara tersebut adalah *Inkracht*, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 23.00**  
Penyelesaian Perkara Hukum Tahun 2025

Indikator	Status Perkara	Perbandingan	
		Semester I 2025	Semester II 2025
1). Kasus Hukum yang telah mendapat kekuatan hukum tetap	Putusan Inkracht	20	27
2). Kasus Hukum yang sedang dalam proses	Proses Kasasi, Proses Sidang dan Proses Perlawanan	8	6
3). Kasus Hukum yang tidak ditindaklanjuti	-	Nihil	Nihil
4). Kasus Hukum yang telah ditindak lanjuti	Gugatan Perdata Umum, Gugatan Perdata Khusus dan Gugatan Sederhana	Nihil	Nihil
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>33</b>

### Status Perkara Hukum



## 11. RENCANA STRATEGIS BANK

### A. JANGKA PANJANG

Rencana Jangka Panjang Bank disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 05/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK Nomor : 12/SEOJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Rencana korporasi yang disusun sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah disetujui Dewan Komisaris. Penyusunan rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) secara umum telah diupayakan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan secara lengkap, realistis dan terukur dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Berdasarkan Nota Persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 176/DK-BPD/2025 Tanggal 22 September 2025 Perihal Persetujuan Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 s/d 2027 dan telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 55/DIR-BPD/IX/2025 Tanggal 22 September 2025 Tentang Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2025 s/d 2027 PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Direksi telah menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Nota Nomor : 07/03/REN/2025 tanggal 28 Januari 2026 Perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2025.

Dalam laporan tersebut memuat upaya – upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pencapaian RBB triwulan IV tahun 2025, antara lain :

1. Seluruh unit kerja Bank Papua diharapkan untuk memfokuskan upaya pada pencapaian target dan realisasi rencana kerja, dengan memprioritaskan program yang bersifat penting dan mendesak, guna mendorong peningkatan kinerja bisnis serta produktivitas Bank Papua.
2. Memaksimalkan upaya penagihan dan supervisi kredit serta memperkuat pengelolaan portofolio kredit secara optimal guna menjaga kualitas kredit, menurunkan rasio NPL dan mengendalikan peningkatan CKPN setiap bulan secara efektif dan terukur.
3. Berkolaborasi dengan pihak – pihak terkait termasuk Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), sebagai peluang untuk memperluas layanan digital *Banking* serta meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Papua.
4. Meningkatkan ekspansi kredit pada sektor – sektor potensial melalui koordinasi yang sinergis antara seluruh kantor cabang

dengan Divisi BKK, BUK dan RBS dalam penyaluran kredit. Secara khusus, perlu dilakukan optimilisasi pembiayaan disektor UMKM yang masih dibawah target, dengan memanfaatkan berbagai event dan kebijakan pemerintah sebagai momentum peningkatanpenyaluran kredit produktif.

5. Memperkuat pengawasan terhadap penagihan kredit pada sektor konstruksi yang telah dicairkan serta menerapkan selektivitas tinggi dalam penyaluran kredit baru, guna meminimalkan risiko gagal tagih.
6. Menjaga sinergitas antara kantor cabang pemegang kas daerah dan Pemerintah Daerah guna mempererat komunikasi serta kerjasama kelembagaan, dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan dana Pemda di Bank Papua.
7. Seluruh *first line of defense* pada unit kerja Bank Papua wajib meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prosedur operasional serta memperkuat sistem Kepatuhan dan monitoring transaksi, guna memitigasi risiko operasional dan menjaga integritas tata kelola Bank.
8. Memfokuskan kinerja pada pencapaian target dan realisasi program kerja hingga akhir Tahun Buku 2025 serta memastikan seluruh aktivitas operasional mengikuti ketentuan dalam SE Direksi mengenai petunjuk Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2025.
9. Melakukan monitoring pembayaran kredit kontraktng serta penagihan aktif terhadap debitur jatuh tempo dan kredit macet/hapus buku, sekaligus memaksimalkan penagihan dan supervisi serta memperkuat pengelolaan portofolio untuk menjaga kualitas kredit, menurunkan NPL dan mengendalikan CKPN.
10. Kantor Cabang memanfaatkan momentum kebijakan Presiden terkait Pasar Murah dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan transaksi melalui *e-channel* dan *digital banking* Bank Papua.
11. Meningkatkan ekspansi kredit, khususnya Kredit Pegawai sebagai *captive market* Bank Papua melalui optimalisasi promosi Gebyar

Kredit Pegawai, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua dengan memperluas penyaluran kredit pada sektor UMK yang potensial secara *prudent*.

12. Melakukan monitoring dan menjaga transfer dana daerah untuk mendukung likuiditas triwulan IV, serta memastikan pengelolaan kas yang memadai dalam mengantisipasi peningkatan transaksi menjelang hari raya dan tutup buku.
13. Meningkatkan *cost control* dan *cost cutting* untuk mendukung profitabilitas Bank Papua.
14. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan memprioritaskan dana murah. Seluruh FO cabang diharapkan mengelola dana secara proaktif melalui pembinaan hubungan dan silaturahmi yang baik, khususnya dengan nasabah prima, guna menjaga loyalitas mereka terhadap Bank Papua.
15. Menyiapkan strategi yang tepat dalam menyikapi target tahun 2026, sehingga target yang ditetapkan sejalan dengan kapasitas bisnis dan potensi wilayah operasional masing-masing.
16. Melakukan ekspansi kredit pada seluruh sektor potensial, termasuk korporasi, komersial dan UMKM dengan optimalisasi khusus pada *captive market* (kredit konsumen) melalui pemanfaatan kebijakan Pemerintah, seperti kenaikan UMP dan prioritas APBN, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
17. Melaksanakan monitoring secara intensif terhadap penagihan kredit, khususnya pembayaran kredit konstruksi, serta memastikan pelunasan atas kredit yang telah jatuh tempo guna meminimalkan risiko kerugian.
18. Mengoptimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui prioritas pada dana murah (tabungan dan giro) dengan tetap menjaga stabilitas dan berkesinambungan deposito.
19. Pro aktif dalam memasarkan produk digital Bank Papua, seperti Papua *Mobile*, Papua *Pandai*, Papua *Cash* dan Internet *Banking*, guna meningkatkan aspek keamanan nasabah serta manajemen risiko.

20. Mengantisipasi potensi keterlambatan realisasi APBD dengan menjaga *buffer* likuiditas yang memadai serta menyesuaikan perencanaan kas cabang terhadap kemungkinan penarikan dana besar di awal tahun, yang juga berpotensi mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran kredit, khususnya kredit konsumtif, sehingga meningkatkan risiko tunggakan kredit.
21. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan Bank Papua.

## B. JANGKA MENENGAH DAN PENDEK

Rencana Bisnis Bank dibuat secara lengkap, prospektif, realistis, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System Strategic Risk*.

Rencana bisnis selalu dikomunikasikan kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan dilaksanakan cukup efektif. Pelaksanaan rencana bisnis Bank selalu diawasi oleh Dewan Komisaris.

Pada Tahun 2025, Bank Papua telah melakukan evaluasi dan realisasi Jaringan Kantor baik Pembukaan Kantor, Perubahan Status Kantor dan Relokasi Kantor, sesuai tabel dibawah ini :

**Tabel 24.00**  
**Rekap Pengembangan Jaringan Kantor Sesuai RBB tahun 2025 (Semester I & II)**  
**(Pembukaan Kantor, Peningkatan Status Kantor, Relokasi Pemindahan Alamat Kantor & Penutupan Kantor)**

A	PEMBUKAAN KANTOR	BULAN	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	KETERANGAN
1	Kantor Kas Yukase	Maret	Maybrat	Papua Barat Daya	Operasional Tanggal 15 Desember 2025
B	PENINGKATAN STATUS KANTOR				
1	-	-	-	-	-
C	RELOKASI PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR				
1	Kantor Cabang Makassar	Januari	Makassar	Sulawesi Selatan	Operasional Tanggal 20 Januari 2025
2	Kantor Cabang Pembantu Pasar Remu	Juli	Sorong	Papua Barat Daya	Operasional Tanggal 02 Juli 2025
3	Kantor Cabang Pembantu Bade	September	Mappi	Papua Selatan	Operasional Tanggal 16 September 2025
4	Kantor Cabang Pembantu Karang Tumaritis	Juni	Nabire	Papua Tengah	Operasional Tanggal 16 Juni 2025

5	Kantor Kas RSUD Madi	Maret	Paniai	Papua Tengah	Operasional Tanggal 12 Maret 2025
D	<b>PENUTUPAN KANTOR</b>				
1	-	-	-	-	-

## VII. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA BANK PAPUA

### • Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment

Sesuai SEOJK No 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum bahwa Bank berkewajiban untuk melakukan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank, maka telah dilakukan penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) dengan berpedoman pada faktor penilaian yang terdiri dari 16 (enam belas) faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilampirkan dalam bentuk hasil *Self Assessment* Semester I (satu) dan Semester II (dua) tahun 2025 dengan Nilai Komposit 2.

Predikat Nilai Komposit 2 Mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip tata kelola Bank umum, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan Bank dan Rencana Bisnis Bank.

Tabel 25.00  
Penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG)  
Semester I & II tahun 2025

#### ➤ Semester I Posisi 30 Juni 2025

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	1	15 %	0,15
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10 %	0,10
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6 %	0,06

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6 %	0,06
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6 %	0,12
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6 %	0,12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5 %	0,10
9	Pemberian Remunerasi	2	5 %	0,10
10	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> )	2	5 %	0,10
11	Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi	2	6 %	0,12
12	Rencana Strategis Bank	2	5 %	0,10
13	Aspek Pemegang Saham	2	5 %	0,10
14	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , Termasuk Anti Penyuapan	2	5 %	0,10
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	2	5 %	0,10
16	Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5 %	0,10
<b>NILAI KOMPOSIT   PREDIKAT</b>			<b>100 %</b>	<b>1,63   2</b>

➤ **Semester II**  
**Posisi 31 Desember 2025**

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	1	15 %	0,15
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10 %	0,10
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6 %	0,06

*Handwritten signature*

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6 %	0,06
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6 %	0,12
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6 %	0,12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5 %	0,10
9	Pemberian Remunerasi	2	5 %	0,10
10	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> )	2	5 %	0,10
11	Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi	2	6 %	0,12
12	Rencana Strategis Bank	2	5 %	0,10
13	Aspek Pemegang Saham	2	5 %	0,10
14	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , Termasuk Anti Penyuapan	2	5 %	0,10
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	2	5 %	0,10
16	Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5 %	0,10
NILAI KOMPOSIT   PREDIKAT			100 %	1,63   2

Jayapura, 16 April 2025



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

KOMISARIS UTAMA

DIREKSI

YORGEMES D. HEGEMUR

YULIANA D. YEMBISE  
Direktur Utama

BETTY J. PARINUSSA  
Direktur Kepatuhan